

# **KONSTRUKSI PRASANGKA DALAM KELOMPOK KEAGAMAAN**

**Studi Kasus Front Pembela Islam Dalam Penolakan Basuki Tjahaja Purnama  
Sebagai Gubernur DKI Jakarta**



**Muhammad Fadli Agniandi  
4815122450**

Skripsi Ini Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan (S.Pd)

**PROGRAM PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2017**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Fadli Agniandi

No. Registrasi : 4815122450

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Konstruksi Prasangka Dalam Kelompok Keagamaan, Studi Kasus Front Pembela Islam Dalam Penolakan Basuki Tjahaja Purnama Sebagai Gubernur DKI Jakarta” ini sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Jakarta, 31 Januari 2017

Tanda Tangan



Muhammad Fadli Agniandi

## Abstrac

**Muhammad Fadli Agniandi.** Construction prejudice in Religious Groups, Study Case of *Front Pembela Islam* in rejection of Basuki Tjahaja Purnama as DKI Jakarta Governor. Sociology Education Thesis, Sociology Major, Social Science Faculty, Jakarta State University.

This research goal is to analyze the process of prejudice forming and dynamic prejudice of FPI to DKI Jakarta Governor recently Basuki Tjahaja Purnama called Ahok as well as observe the effect which occurs due to FPI prejudice towards DKI Jakarta Governor currently. This research uses qualitative approach supported by interview technique and enclose the secondary data.

FPI as a fundamental religion community which religion is set as ideology has a big goal : arise Islam in social, economy, politic, and law aspect. In this case, FPI rebels by creafing a prejudice towards DKI Governor to build Jakarta with basis Islam. It is actualited by a prejudice which comes from Islam politic ideology and supported by negative asiesments in attitude aspect of Basuki Tjahaja Purnama leadership

Based in the data which collected, the main prejudice is Islam politic ideology tells to its members of Moeslem to vote the leader/governor from Islam background. Besides the religion, FPI also assumess that they feel Ahok leadership is bed and doesn't support his citizen, especially for poor people and Moeslems. Those two reasons support of occuring FPI "resistensi" as an Islam representative in DKI Jakarta. An actualiation from the prejudice is they do a lot effort to jail Ahok because of breaking the rule and look for a candidat ti fight with Ahok in the next governor election who has a same ideology with FPI and not against Islam rule

Keywords : FPI, Governor DKI Jakarta dan Prejudice

## Abstrak

**Muhammad Fadli Agniandi.** Konstruksi Prasangka Kelompok Keagamaan, Studi kasus Front Pembela Islam Dalam Penolakan Basuki Tjahaja Purnama Sebagai Gubernur DKI Jakarta. Skripsi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terbentuknya prasangka dan dinamika prasangka FPI terhadap Gubernur DKI Jakarta saat ini yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok serta melihat dampak yang terjadi akibat dari prasangka FPI terhadap Gubernur DKI Jakarta saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan teknik wawancara dan menyertakan data-data sekunder.

FPI sebagai kelompok keagamaan fundamentalis yang menjadikan agama sebagai ideologinya mempunyai tujuan besar yakni membangkitkan kejayaan Islam dalam aspek bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum. Pada kasus ini, FPI melakukan pemberontakan dengan cara menciptakan sebuah prasangka kepada Gubernur DKI Jakarta saat ini Basuki Tjahaja Purnama untuk menciptakan Jakarta yang damai bersyariah. Penolakan atau resistensi tersebut diaktualisasikan melalui prasangka yang bersumber kepada ideologi politik Islam dan didukung oleh penilaian-penilaian negatif dalam aspek sikap dan kepemimpinan terhadap Basuki Tjahaja Purnama.

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti peroleh, prasangka yang utama adalah ideologi politik Islam menyerukan kepada umatnya untuk memilih pemimpin berlatar belakang Islam juga. Selain agama, FPI juga menilai bahwa mereka merasa figur pemimpin yang bersikap buruk serta kepemimpinan Ahok yang tidak berpihak kepada rakyat khususnya rakyat kecil dan umat Islam. Kedua alasan tersebut mendukung munculnya resistensi FPI sebagai representatif kelompok Islam di DKI Jakarta. Aktualisasi dari prasangka tersebut mereka melakukan banyak upaya untuk menjatuhkan Ahok secara hukum dan mencari lawan untuk ikut kompetisi pada Pilgub yang akan datang yang tentunya sesuai dengan keinginan FPI dan tidak bententangan dengan syariat Islam.

**Kata Kunci :** FPI, Gubernur DKI Jakarta dan Prasangka

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Penanggung Jawab / Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M.Si  
NIP. 19630412 199403 1 002

No	Nama	TTD	Tanggal
1	<u>Dr. Robertus Robet, MA</u> NIP. 19710516 200604 1 001 Ketua Sidang		17-02-2017
2	<u>Rusfadia Saktiyanti Jahja, M.Si</u> NIP. 19781001 200801 2 016 Sekretaris Sidang		19-02-2017
3	<u>Ubedilah Badrun, M.Si</u> NIP. 19720315 200912 1 001 Penguji Ahli		17-02-2017
4	<u>Rakhmat Hidayat, PhD</u> NIP. 19800413 200501 1 001 Dosen Pembimbing I		17-02-2017
5	<u>Abdul Rahman Hamid, SH., MH</u> NIP. 19740504 200501 1 002 Dosen Pembimbing II		17-02-2017

**Tanggal Lulus: 31 Januari 2017**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Serta ucapan terima kasih atas dukungan orang tua, Atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Prasangka Elit Front Pembela Islam Sebagai Penolakan Basuki Tjahaja Purnama Menjadi Gubernur DKI Jakarta” untuk mengikuti Sidang Skripsi. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada

1. Dr. Muhammad Zid, M.Si, selaku Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
2. Dr. Robertus Robet, MA, selaku Koordinator Program Studi Sosiologi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
3. Abdi Rahmat, M.Si, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
4. Rakhmat Hidayat PhD, selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi. Terima kasih atas semua saran dan masukan yang telah diberikan. Hal tersebut membuat penulis selalu belajar dan termotivasi
5. Abdul Rahman Hamid, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing 2. Terima kasih atas semua nasihat yang telah diberikan dan kontribusi pada skripsi ini
6. Drs. Rosita Adiani, MA, selaku Pembimbing Akademik penulis di Jurusan Sosiologi atas atensinya

7. Bapak Ubaidillah Badrun, M.Si, yang telah menjadi teman diskusi komunikasi politik dan memberikan saran serta menjadi narasumber untuk triangulasi data
8. Seluruh dosen dan staff Jurusan Sosiologi FIS UNJ dalam memberikan wawasan yang berharga dan pengalaman-pengalaman penelitian yang tidak pernah dilupakan
9. Bapak Herdiyan Maulana Dosen Psikologi Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan masukan dan penjelasan tentang materi Psikologi sosial
10. Sahabat-sahabat diskusi dari diskusi yang bersifat akademik maupun bersifat informal Afdhal, Fatoni Ihsan, Danies Mudeatama, Angga Mardiansya, Handika Arnando, Mulyani, Lisa Andriati, Arlaine, Maryatul Qibliyah, Febri Yusita Ramadhani, Kak Dicky, Kak Aji dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu
11. Teman-teman dari Jurusan Sosiologi maupun dari Prodi Sosiologi angkatan 2012 untuk kebersamaan dan keceriaanya
12. Para narasumber dari Bapak Syahrozi, Habib Idrus, Habib Ali Alatas, Bapak Maman yang telah memberikan informasi secara terperinci dalam melengkapi data penelitian
13. Terima kasih pula kepada pihak-pihak lain yang menjadi informan dalam skripsi ini.

## **MOTTO**

Jika kau bisa tetap tenang saat semua orang panik maka situasi akan terkendali, dan jika kau bisa tetap percaya diri saat semua orang meragukanmu maka pekerjaan menjadi efektif dan efisien

**(Muhammad Fadli Agniandi)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua yang hebat dalam hidup saya serta orang-orang yang ada disekeliling saya yang telah berkontribusi dalam masukan-masukan, ide-ide menarik dan sebagainya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu membuat karya ilmiah dan berfikir diluar zona aman dan nyaman

Semoga skripsi ini mampu menjadi sumber referensi pada masalah-masalah hubungan antar kelompok yang cukup sering terjadi di Indonesia saat ini.

**(Muhammad Fadli Agniandi)**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR SKEMA</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xii

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian .....	5
D. Tinjauan Penelitian Sejenis .....	6
E. Kerangka Konsep .....	15
1. Kemunculan Kelompok Keagamaan .....	15
2. Konstruksi Sosial .....	21
3. Prasangka .....	23
F. Hubungan Antar Konsep .....	30
G. Metodologi Penelitian .....	32
1. Lokasi Penelitian.....	33
2. Peran Peneliti .....	34
3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
4. Analisis Data.....	36
5. Triangulasi Data.....	36
H. Keterbatasan Penelitian .....	37
I. Sistematika Penulisan.....	37

### **BAB II**

#### **KARAKTERISTIK FPI**

A. Pengantar .....	40
B. Periodisasi Gerakan FPI .....	40
1. Pada Periode 1998-2005 .....	40
2. Pada Periode 2005-2012 .....	43
3. Pada Periode 2012-2016 .....	46
C. Visi FPI .....	47
D. Pola Rekrutmen Anggota FPI .....	48
E. Struktur Organisasi FPI.....	50
F. Landasan Dasar Gerakan dan Tujuan FPI.....	58
G. Program Kerja FPI .....	60
H. Penutup .....	64

<b>BAB III</b>	
<b>PROSES KONSTRUKSI PRASANGKA FPI TERHADAP GUBERNUR DKI JAKARTA</b>	
A. Pengantar .....	65
B. Ideologi Politik Sebagai Prasangka Utama FPI Terhadap Ahok .....	66
C. Penilaian Negatif FPI Terhadap Ahok .....	70
1. Sikap Ahok Menjadi Fokus Oleh FPI .....	70
2. Pandangan FPI Terhadap Kepemimpinan Ahok .....	72
D. Konsensus Penolakan FPI Terhadap Ahok .....	79
E. Bentuk-Bentuk Sosialisasi Penolakan FPI Terhadap Ahok .....	83
F. Penutup.....	86
<b>BAB IV</b>	
<b>DINAMIKA PRASANGKA FPI TERHADAP GUBERNUR DKI JAKARTA</b>	
A. Pengantar .....	89
B. Problematika FPI dengan Ahok .....	90
C. Makna <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> Dalam Penolakan Ahok .....	97
D. Diskriminasi Sebagai Dampak Prasangka.....	102
E. Gubernur DKI Jakarta Menghadapi Prasangka FPI .....	109
1. Menanggapi Prasangka Agama .....	109
2. Menanggapi Prasangka Sikap dan Kepemimpinan .....	110
F. Penutup.....	110
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	117
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## **DAFTAR TABEL**

I.1	Tinjauan Pustaka .....	14
I.2	Tipe Prasangka Menurut Robert K. Merton .....	27
I.3	Daftar Informan Peneliti.....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

III.1	Alat-alat Mensosialisasikan Gubernur Muslim untuk Jakarta .....	84
III.2	Spanduk Posko dan Daftar Nama Calon Gubernur yang Diusung oleh GMJ .....	86
IV.1	Elektabilitas Kadidat Gubernur .....	106
IV.2	Popularitas dan Elektabilitas 3 Pasangan Kadidat .....	106
IV.3	Calon yang Didukung Oleh GMJ .....	107
IV.4	Keakraban GMJ dengan Calon Yang Didukung .....	108

## DAFTAR SKEMA

I.1	Peta Konsep Kelompok Keagamaan .....	21
I.2	Konstruksi Sosial Petel L. Berger .....	23
I.3	Hubungan Antar Konsep .....	32
II.1	Alur Rekrutmen Anggota FPI Secara Formal .....	49
II.2	Alur Rekrutmen Anggota FPI Secara Informal.....	50
II.3	Struktur Majelis Syura FPI.....	52
II.3	Struktur Badan Pengurus Harian FPI .....	57
III.1	Terciptanya Prasangka .....	69
III.2	Kerangka Kerja Penelitian.....	88
IV.1	Tahapan Munculnya Terjadi Resistensi .....	94
IV.2	Kerangka Analisis Dinamika Prasangka FPI dengan Gubernur DKI Jakarta .....	112

## DAFTAR SINGKATAN

ADART	: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
BAF	: Badan Ahli Front
BIF	: Badan Investasi Front
BPF	: Badan Pengkaderan Front dan
BTF	: Badan anti-Terror Front,
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
FMI	: Front Mahasiswa Islam
FPI	: Front Pembela Islam
GMJ	: Gubernur Muslim untuk Jakarta
HAM	: Hak Asasi Manusia
HILMI	: Hilal Merah Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KTA	: Kartu Tanda Anggota
LDF	: Lembaga Da'wah Front,
LEF	: Lembaga Ekonomi Front
LBF	: Lembaga Bantuan Front
LIF	: Lembaga Informasi Front
LPI	: Laskar Pembela Islam,

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat  
MPI : Mujadilah Pembela Islam,  
PMF : Pemantau Maksiat Front  
Pemilu : Pemilihan Umum  
Pemprov DKI : Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah  
Pilpres : Pemilihan Presiden  
PSAD : Pusat Studi Agama dan Peradaban  
SARA : Suku, Agama dan Ras  
SekJend : Sekertaris Jenderal  
SEPILIS : Sekuler, Pluralisme dan Liberalisme  
SPF : Serikat Pekerja Front

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan sosial secara horozontal cukup sering terjadi di Indonesia dalam bidang Suku, Agama dan Ras (SARA). Agama sering digunakan sebagai alat politik dalam perebutan kekuasaan atau jabatan. Salah satu contohnya adalah kasus penolakan masyarakat muslim Lenteng Agung terhadap Lurah Susan pada tahun 2013.<sup>1</sup> Selain Lurah Susan, ditahun yang sama kasus penolakan juga terjadi kepada Lurah Pejaten Timur yaitu Lurah Grace Tiaramudi.<sup>2</sup> Tahun 2013 merupakan bertepatan dengan memanasnya suhu politik karena menjelang Pemilu Pilpres tahun 2014. Isu Sara juga dilontarkan kepada Basuki Tjahaja Purnama Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menjadi PLT Gubernur jika Pak Joko Widodo yang saat itu menjadi Gubernur dan ingin maju menjadi Presiden pada Pilpres 2014. Jumlah kasus isu SARA memang relatif lebih kecil dari permasalahan Ipoleksosbud (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya), tetapi Kementerian Dalam Negeri mencatat setidaknya ada delapan kasus mengenai Isu Sara menjelang Pilpres 2014 walaupun kasus isu SARA menurun di tahun 2015.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Lenny Tristia Tambun, *Pelolakan Lurah Susan* <http://sp.beritasatu.com/home/penolakan-lurah-susan-bentuk-nyata-diskriminasi/42614> diakses pada tanggal 9 Maret 2016 Pukul 18.40 WIB

<sup>2</sup>M. Andi Perdana, *Diincar FPI, Lurah Grace No Coment* <https://metro.tempo.co/read/news/2013/10/29/064525447/diincar-fpi-lurah-grace-no-comment> diakses pada tanggal 9 Maret 2016 Pukul 18.45 WIB

<sup>3</sup>Data Ipoleksosbud tahun 2014, [kesbangpol.kemendagri.go.id/files/pdf](http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files/pdf) diakses pada tanggal 9 Maret 2016 Pukul 19.10 WIB



Setidaknya ada tiga motif yakni intrik persaingan internal, digerakkan provokator, dan memolitisasi isu SARA. Isu SARA kian berkembang dalam proses pemilihan calon-calon pemimpin di Indonesia, konflik dan tindak kekerasan bernuansa SARA, termasuk di dalamnya adalah agama masih saja menjadi persoalan yang tak kunjung reda di negeri yang multi-etnik dan multi-religi ini. Realitas keberagaman yang menjadi karakter unik kebangsaan bukan hanya dipahami sebagai kemajemukan bangsa, dalam beberapa kasus malah ia kerap kali muncul sebagai pemicu konflik. Agama seolah berbicara banyak hal yang diyakini sebagai memecahkan masalah, tetapi belum mampu memberikan solusi bagi masalah-masalah kemanusiaan yang terus berkembang. Dengan kata lain agama juga kerap menjadi sumber masalah terjadinya konflik horizontal antar pemeluknya. Gerakan radikalisme dan fundamentalisme agama adalah contoh paling nyata bahwa agama menjadi sumber kekacauan, isu SARA dewasa ini menjadi ajang berdebatan terutama dalam memilih calon pemimpin. Kemuculan ormas berlatar belakang agama yang dapat dikatakan termasuk kategori “keras” tidak terlepas dari perubahan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat serta perubahan politik yang turut menjadi suburnya ormas – ormas seperti Front Pembela Islam selanjutnya disingkat FPI.

Munculnya radikalisme berlatar belakang agama pada FPI dengan dilatarbelakangi oleh visi misi *Amar ma'ruf nahi munkar* bertujuan melawan penyimpangan sosial yang dilakukan sebagian masyarakat sebagai imbas dari perubahan sosial yang terjadi agar sebagian masyarakat yang tidak rusak dapat terlindungi dari penyimpangan sosial. FPI dalam melakukan dakwah *amal ma'ruf*

*nahi mungkarnya* mempunyai cara yang berbeda dibandingkan organisasi-organisasi keagamaan pada umumnya, mereka lebih menyukai cara-cara yang nyata dalam memberantas penyimpangan sosial di Indonesia, misalnya saja penghancuran berbagai tempat yang digunakan sebagai sarang maksiat.<sup>4</sup>

Setelah Pemilu Presiden, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil dengan sebutan Ahok menggantikan posisi Gubernur sebelumnya yaitu Joko Widodo. Setelah menjabat menjadi pengganti Gubernur sebelumnya, Ahok kerap kali bersinggungan dengan salah satu organisasi masyarakat yaitu FPI. Tidak heran jika FPI menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena latar belakang beliau sebagai umat Kristen. Hal itu dikarenakan beliau memiliki latar belakang yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat DKI Jakarta yang mayoritas beragama Islam sedangkan Ahok sendiri non-muslim. Kenyataan-kenyataan tersebut menunjukkan agama tidak lagi dapat menjadi tali kasih dan perdamaian kalau sudah bercampur dengan faktor-faktor lain seperti ekonomi, politik, identitas kelompok, dan kebudayaan. Jadi timbulah konflik peran dari agama dalam kehidupan masyarakat. Di satu pihak agama diharapkan menjadi peredam masalah-masalah yang dapat mengancam kehidupan masyarakat, dipihak lain agama itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor-faktor yang akan diredamnya itu. Pada masalah yang dipaparkan diatas, hal tersebut mengindikasikan sebuah prasangka yang tidak lepas dari latar seseorang yang berjumlah minoritas.

---

<sup>4</sup> Reza Febriansyah, *Radikalisme Berlatar Belakang Agama Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Ormas Front Pembela Islam Di Kota Palembang)*, Skripsi, Program Studi Sosiologi, Universitas Sriwijaya, 2013 Hlm 2.

Penelitian menggunakan kasus prasangka antar pemeluk agama masih sangat jarang digunakan oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana proses pembentukan prasangka kepada Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama di tubuh organisasi FPI serta bagaimana dampak prasangka tersebut bagi organisasi FPI maupun Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur. Dalam pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan metode observasi dengan teknik wawancara secara mendalam kepada para pemuka agama pada organisasi FPI.

## **B. Rumusan Masalah**

Peran FPI sebagai fokus utama yang akan saya bahas di dalam tulisan ini. Prasangka yang muncul menyebabkan perbedaan pendapat antara FPI dengan Ahok dan perpecahan yang menghambat terwujudnya rasa kebhinekaan antar umat beragama. Dari latar belakang telah dijelaskan munculnya prasangka antar umat beragama di tengah masyarakat menggunakan isu-isu SARA di atas, maka rumusan masalah yang saya ajukan adalah

1. Bagaimana proses terbentuknya prasangka kepada Gubernur DKI Jakarta di tubuh organisasi FPI?
2. Bagaimana dinamika prasangka organisasi masyarakat FPI terhadap Gubernur DKI Jakarta saat ini?

### C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Penelitian ini tentu saja mempunyai tujuan dan manfaat seperti penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut antara lain

1. Menjelaskan proses terbentuknya prasangka FPI kepada Gubernur DKI Jakarta.
2. Menjelaskan dinamika prasangka yang terjadi pada organisasi masyarakat FPI terhadap Gubernur DKI Jakarta saat ini
3. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai alat pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk dikembangkan dalam proses pendidikan serta menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam mengatasi masalah sosial dalam bentuk prasangka dan diskriminasi ini tanpa merugikan pihak tertentu di dalam masyarakat yang mudah terhasut isu-isu SARA.

Selain tujuan dan manfaat, penelitian ini mempunyai signifikansi secara teoritis, sosial dan praktik antara lain sebagai berikut:

1. *Secara Teoritis*, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi serta memperkaya kajian tentang prasangka dalam dunia pendidikan, khususnya di dalam organisasi atau kelompok formal
2. *Secara Sosial*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan secara umum untuk memahami secara mendalam pentingnya mengakui perbedaan dalam rangka meningkatkan integrasi dan meminimalisasi konflik yang dilatarbelakangi oleh isu SARA.

3. *Secara Praktis*, secara praktis penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana prasangka dapat terbentuk di dalam organisasi masyarakat lokal.

#### **D. Tinjauan Penelitian Sejenis**

Sudah banyak para akademisi melakukan penelitian atau riset tentang sebuah hubungan kelompok sosial. Pada penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian tentang pandangan LSM yaitu FPI terhadap birokrasi yang dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama. Penelitian tentang FPI sudah beberapa kali dibahas oleh akademisi lain tetapi yang membuat penelitian ini menarik adalah peneliti membahas FPI sebagai kelompok keagamaan fundamentalis yang mempunyai prasangka kepada kepala daerah tertentu dari aspek identitas, sikap dan kepemimpinan yang bersumber pada ideologi keagamaan FPI. Dari prasangka-prasangka itulah timbul usaha-usaha untuk menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta salah satunya adalah terbentuknya sebuah konsensus kelompok keagamaan Islam yang mana mempunyai tujuan yang sama yaitu menjatuhkan Ahok dari posisinya.

Pada tinjauan penelitian sejenis yang pertama adalah Kekerasan Massa FPI Terhadap Tempat Hiburan di Jakarta oleh Yal Robiansyah.<sup>5</sup> Penelitian ini meneliti tentang faktor penyebab kekerasan massa oleh FPI terhadap tempat hiburan di kawasan Kemang Jakarta Selatan dan kekerasan massa FPI di kantor majalah *Playboy Indonesia*. Adapun penyebab kekerasan FPI terhadap majalah *Playboy Indonesia*

---

<sup>5</sup> Yal Robiansyah, *Kekerasan Massa Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Tempat Hiburan di Jakarta*, Tesis Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2006.

adalah *Pertama* diabaikannya seruan dari beberapa tokoh masyarakat, anggota DPR, Pemerintah dan Ormas-ormas Islam agar pihak *Playboy Indonesia* menghentikan penerbitannya. *Kedua* aparat hukum lamban dan tidak melakukan tindakan apa-apa atas terbit dan beredar luasnya majalah *Playboy* di masyarakat. *Ketiga* telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan oleh pihak *Playboy Indonesia* yang akan menampilkan gambar dan foto-foto yang sopan dan tidak menyanggahkan foto telanjang. *Keempat*, dengan terbitnya dan beredarnya majalah *Playboy Indonesia* membawa citra yang buruk bagi Indonesia dimata umat Islam di dunia.

Tindakan FPI tersebut dimaknai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum tetapi tindakan tersebut tidak mempercayai integritas moral aparat penegak hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kemaksiatan yang terjadi di masyarakat karena menurut mereka aparat penegak hukum telah memberikan sebuah proteksi terhadap praktek-praktek kejahatan. Selain itu tindakan kekerasan tersebut merupakan bagian dari ekspresi keyakinan agama yang diposisikan sebagai tindakan suci dan selalu berpatokan pada pendekatan teologis dalam mengimplementasikan tindakan mereka tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh FPI merupakan realisasi dari tafsir atau interpretasi dai hukum positif, khususnya dalam penegakan hukum. Saat FPI menafsirkan penegakan hukum positif, maka tindakan FPI ini seakan-akan melakukan tindakan yang legal karena tindakan tersebut didukung oleh ormas-ormas Islam lainnya sehingga tuduhan melakukan tindakan menghakimi sendiri mudah untuk ditepis.

*Amar ma'ruf nahi munkar* sebagai bentuk pengendalian sosial dipahami sebagai mendorong anggota dan masyarakat untuk berperilaku konformitas dan tidak melakukan penyimpangan terhadap norma-norma yang ada dimasyarakat. *Nahi munkar* merupakan gagasan inti berdirinya FPI, gagasan ini merupakan hasil penafsiran atas teks-teks keagamaan dan sosial. Pada tataran operasionalisasi nahi munkar tersebut, FPI menjadi dalam konteks kelompok keagamaan di Indonesia dan filosofi nahi munkar tersebut menjadi agenda yang spesifik pada transformasi gagasan di kalangan kelompok FPI dengan masyarakat luas, meskipun ajaran amar maruf itu sendiri beriringan dan saling berkaitan dengan nahi munkar. Dari *nahi munkar* inilah, sering kali menjadi muara FPI dalam pelaksanaannya.

Pada tinjauan penelitian selanjutnya berjudul *Islam Fundamentalisme Radikal dan Kepolitikan di Indonesia (Gerakan dan Pemikiran FPI, Majelis Mujahidin, Laskar Jihad dan HTI Tahun 1998-2003)* oleh M. Zaki Mubarak.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsepsi gagasan dan pemikiran organisasi yang menjadi subyek kajian ini hampir semuanya secara frontal bertolak belakang dengan nilai dan prinsip demokrasi. Lebih jauh demokrasi dianggap sebagai sistem kufur yang harus diperangi dan beberapa diantaranya masih bersiteguh untuk mendirikan suatu kekuasaan politik berbentuk negara Islam atau *Daulah Khilafah Islamiyyah*. Konstruksi politik yang diangankan oleh kelompok-kelompok ini diukur dari cara pandang demokrasi, sangat jelas bersifat eksklusif dan diskriminatif. Tentu adanya

---

<sup>6</sup> M. Zaki Mubarak, *Islam Fundamentalisme Radikal dan Kepolitikan di Indonesia (Gerakan dan Pemikiran FPI, Majelis Mujahidin, Laskar Jihad dan HTI Tahun 1998-2003)*, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2003.

kenyataan yang demikian menjadi tantangan serius bagi seluruh elemen yang berkomitmen dengan penegakan prinsip demokrasi, yang menghargai pluralitas dan toleransi.

Perubahan politik di Indonesia terutama perubahan tingkat kepemimpinan nasional sering kali berlangsung secara tak terduga. Kelompok-kelompok Islam tidaklah luput dari kecenderungan yang demikian merupakan entitas yang secara penuh turut pula terlibat dalam tarik menarik antara kekuatan politik. Umat Islam merupakan salah satu kekuatan strategis yang dapat dimanfaatkan untuk agenda-agenda kepentingan tertentu. Dengan jumlah massa yang sangat besar kelompok Islam merupakan modal politik yang sangat menggiurkan bagi para politikus-politikus di negeri ini contohnya pada saat berlangsungnya Sidang Istimewa MPR 1998 membuktikan bagaimana elit politik dengan cerdas memanfaatkan kantong-kantong kaum muslim untuk kepentingan politik dirinya. Banyak elit-elit politik yang masih melihat “kartu Islam” merupakan modal yang sangat potensial untuk menghangatkan isu-isu menjelang pemilu pasca reformasi. Orientasi untuk meraih kekuatan ormas Islam tampak jelas pada kebijakan membebaskan tahanan politik terutama narapidana politik Islam yang telah sekian lama dipenjara akibat kasus subversif pada masa Orde baru dan memberikan bantuan finansial kepada lembaga keagamaan.



Tinjauan penelitian selanjutnya adalah Organisasi Keagamaan FPI oleh Bakti Andriyono.<sup>7</sup> Tesis ini mendeskripsikan kajian ini mengenai organisasi keagamaan FPI. Perhatian utama tesis ini adalah kegiatan FPI dengan menggunakan cara-cara radikal sehingga menimbulkan kekerasan kolektif dan konflik. Dalam kajian tesis ini organisasi FPI dilihat dari kegiatan anti maksiat sehingga memperoleh dana (materi) untuk memenuhi kebutuhan individu anggota maupun organisasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aksi-aksi FPI dengan menggunakan cara-cara radikal sehingga menimbulkan kekerasan kolektif dan konflik. Cara-cara radikal itu terkait dengan eksistensi dan kegiatan organisasi.

Eksistensi dan kegiatan organisasi itu adalah (a) anggota FPI sebagian besar adalah golongan masyarakat yang tidak berkecukupan dan kurang terpelajar, (b) FPI membentuk Laskar Pembela Islam yang dikerahkan untuk melakukan aksi-aksi radikal, (c) FPI tergolong organisasi tradisional dan menggunakan manajemen Pesantren, (d) kegiatan FPI dalam bentuk pelayanan keagamaan, pelayanan politik, bisnis organisasi, dan aksi-aksi radikal sehingga menimbulkan kekerasan kolektif dan konflik, (e) dukungan dana (materi) dari anggota, donatur luar kepada organisasi FPI serta donatur luar kepada anggota FPI.

Aksi-aksi radikal yang dilakukan FPI adalah berupa unjuk rasa atau kekerasan kolektif di tempat-tempat yang dianggap maksiat dengan sasaran kafe, diskotik bar dll. Selain itu tempat-tempat sasaran aksi radikal yang dilakukan FPI adalah kantor

---

<sup>7</sup> Bakti Andriyono, *Organisasi Keagamaan Front Pembela Islam*, Tesis Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003.

Pospol Petamburan Jakbar, Komnas HAM, Pembajakan Bus di Depan Kejaksaan DKI Jakarta. Buntut dari keributan anggota FPI dengan penjual kupon di Kembangan dan Palmerah terjadi keributan dan pengeroyokan. Pada penelitian ini hanya dijelaskan berbagai macam kasus kekerasan yang dianggap amar maruf nahi munkar oleh FPI mulai dari kasus Ketapang, kasus dengan Pemda DKI Jakarta, konflik dengan Polda metro jaya, kasus diskotik eksotik, dan respon FPI terhadap Serang Amerika kepada Irak, respon FPI terhadap konflik ambon dan aceh, peristiwa Komnas HAM dan Konflik dengan Satgas PDIP serta yang terakhir peristiwa bendungan hilir.

Tinjauan penelitian yang terakhir adalah Kontrol Sosial Organisasi Sosial Keagamaan (Kasus FPI di Prov DKI Jakarta) oleh Ahmad Haerurohim.<sup>8</sup> Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan sosial *gerakan Islam keras* muncul kembali diantara gerakan-gerakan sosial yang lain pada era reformasi. Sepanjang di Indonesia gerakan ini telah mengalami pasang surut, sekaligus mengindikasikan adanya kekuatan spritual yang berasal dari nilai-nilai agama yang dikonstruksi oleh sebagian penganutnya dan pada kondisi tertentu muncul sebagai gerakan ini merupakan model keberagaman fundamentalis yang secara ideologis adalah *salafiah radikal*. Mereka mengklaim dirinya sebagai pengikut orang-orang terdahulu (tokoh Islam zaman awal). Ideologi ini dipengaruhi pemikiran Ibnu Taimiyah yang menentang infiltrasi budaya lokal dalam mempraktekan agama dan gerakan pemurnian ajaran agama Wahabiah.

---

<sup>8</sup> Ahmad Haerurohim, *Kontrol Sosial Organisasi Sosial Keagamaan (Kasus FPI di Prov DKI Jakarta)*, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005.

Salah satu kelompok masyarakat yang melakukan gerakan secara radikal pada pasca reformasi adalah FPI. Agenda utamanya adalah penerapan syariat Islam melalui amar maruf nahi munkar. Di antara aksinya adalah melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan syariat dengan upaya remoralisasi masyarakat. Permasalahannya, ketika FPI menggunakan alasan-alasan agama untuk melakukan kontrol sosial dan diantara terdapat kekerasan. Diperlukan penjelasan secara sosiologis yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan model keberagaman yang terdapat dalam FPI dengan kontrol sosial yang dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik organisasi sosial keagamaan, karakteristik kontrol sosial, dan kontekstualisasi dari kedua variabel tersebut. Dengan menggunakan kerangka teori *Fundamentalisme Islam* dan *Kontrol Sosial*, serta pendekatan kualitatif diperoleh temuan-temuan

1. FPI merupakan organisasi sosial keagamaan yang dipengaruhi oleh ideologi fundamentalisme Islam dengan ciri-ciri
  - ✓ Lahir sebagai respon atas keadaan sosial dan politik terutama kemaksiatan dan kemukaran merajalela dan marginalisasi umat Islam
  - ✓ Prinsip nilai yang dipakai adalah ajaran Islam, sebagai sesuatu yang berasal dari yang suci, bersifat final dan mengatur seluruh kehidupan umat manusia
  - ✓ Didirikan oleh tokoh kharismatik
  - ✓ Tujuan pokok yang ingin dicapai adalah penerapan syariat Islam

- ✓ Struktur organisasi cenderung terpusat pada satu orang sebagai ketua umum
  - ✓ Cenderung menjadi organisasi yang militan dan eksklusif
  - ✓ Cenderung menonjolkan simbol-simbol agama
2. Kontrol sosial yang dilakukan merupakan cerminan dari fundamentalisme yang terdapat dalam FPI
- ✓ Merupakan kontrol sosial para era elit FPI
  - ✓ Nilai-nilai yang diusung merupakan nilai-nilai yang dikonstruksi oleh para elit dengan sikap konservatif terhadap nilai-nilai Islam masa awal, sehingga tidak ada upaya merekonstruksi nilai-nilai yang lebih kontekstual
  - ✓ Kontrol sosial yang dilakukan sebatas pada tataran teknis tidak sampai pada tataran rekonstruksi nilai-nilai yang disepakati oleh berbagai kelompok masyarakat.

**Tabel I.1**

**Perbandingan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yal Robiansyah (2006)	Kekerasan Massa Terhadap Tempat Hiburan (Kekerasan Massa FPI Terhadap Tempat Hiburan Di Jakarta	Tindakan FPI tersebut dimaknai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum tetapi tindakan tersebut tidak mempercayai integritas moral aparat penegak hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kemaksiatan yang terjadi di masyarakat karena menurut mereka aparat penegak hukum telah memberikan sebuah proteksi terhadap praktek-praktek kejahatan.	Membahas tentang kontribusi FPI di dalam masyarakat	Tidak membahas kontribusinya di dalam kontestasi politik

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	M. Zaki Mubarak (2003)	Islam Fundamental Radikal dan Kepolitan di Indonesia (Gerakan dan Pemikiran FPI, Majelis Mujahidin, Laskar Jihad dan HTI Tahun 1998-2003)	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa gerakan Islam fundamental muncul karena perubahan sosial yang cepat pasca reformasi. Semua kelompok Islam ini dimanfaatkan keberadaannya sebagai alat politik karena mereka adalah kelompok keagamaan yang mempunyai jumlah massa yang banyak untuk melawan pemberontakan mahasiswa dan sebagai Pam Swakarsa yang memberi tekanan pada SI MPR 1999.	Membahas tentang FPI sebagai kelompok keagamaan radikal	Tidak membahas FPI sebagai aktor utama kontestasi politik
3	Bakti Andriyono (2003)	Organisasi Keagamaan FPI	Dalam penelitian ini hanya dijelaskan sejarah, ideologi organisasi, pendapatan, sarana-sarana sosial, struktur organisasi, tugas dan wewenang, keanggotaan, program kerja, strategi aksi dan kegiatan FPI secara lengkap dan juga menjelaskan aksi-aksi mereka yang menelan korban jiwa dan pemrusakan sarana umum dalam menyampaikan aspirasinya.	Membahas tentang aksi-aksi yang dilakukan oleh FPI	Tidak membahas aksi-aksi FPI sebagai upaya membangkitkan kejayaan Islam
4	Ahamd Haerurohim (2005)	Kontrol Sosial Organisasi Sosial Keagamaan (Kasus FPI di Prov DKI Jakarta)	Dalam penelitian ini dijelaskan FPI lahir sebagai respon atas keadaan sosial dan politik terutama kemaksiatan dan kemukaran merajalela dan marginalisasi umat Islam. Prinsip nilai yang digunakan adalah ajaran Islam, sebagai sesuatu yang berasal dari yang suci, bersifat final dan mengatur seluruh kehidupan umat manusia dan tentunya tujuan pokok yang ingin mereka capai adalah penerapan syariat Islam sebagai dasar negara	Membahas tentang FPI sebagai kontrol sosial	Tidak membahas prasangka FPI terhadap Pemprov DKI Jakarta

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini FPI sebagai representatif kelompok masyarakat yang menolak Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Penolakan-penolakan tersebut dilakukan melalui berbagai prasangka. Prasangka FPI terhadap Basuki Tjahaja

Purnama mempunyai dua makna antara lain prasangka dimaknasi sebagai alasan menolak Ahok sebagai kepala daerah dan prasangka dimaknai sebagai praktek yang mencirikan kelompok keagamaan (jihad). Pada penelitian ini nantinya akan menjelaskan bagaimana prasangka muncul dan akan menjelaskan dinamika prasangka FPI terhadap Ahok.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Kemunculan Kelompok Keagamaan**

FPI merupakan sebuah organisasi yang berbasis kepada ajaran agama Islam yang muncul pada saat runtuhnya era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto saat itu. Disini penulis ingin menunjukkan bahwa FPI juga termasuk bagian dari kelompok keagamaan fundamentalis. Keruntuhan rezim Soeharto dan lahirnya Reformasi tahun 1998 membawa lembaran baru, yakni terbukanya keran demokrasi secara luas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di era baru itu bukan hanya lahir partai-partai politik yang mengusung politik aliran baik dari kalangan Islam maupun golongan masyarakat lainnya, tetapi juga organisasi-organisasi atau gerakan-gerakan keagamaan yang membawa misi dan simbol keagamaan termasuk dikalangan umat Islam.<sup>9</sup>

Kelompok Islam yang membangkitkan kembali partai politik berlabel formal Islam, termasuk mengusung isu Piagam Jakarta dan penerapan syari'at Islam. Tergolong dalam kategori Islam ideologis atau dalam istilah yang belakang populer

---

<sup>9</sup> Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAD) Muhammadiyah, 2007. Hlm 269

disebut Islamisme. Dikatakan sebagai Islam ideologis karena watak dan orientasi keagamaannya berbasis pada pandangan Islam sebagai ideologi, yang mempertautkan secara langsung hubungan Islam dan negara atau politik serta memperjuangkan cita-cita politik Islam.<sup>10</sup> Bagi para pengikut paham Islam sebagai ideologis menyatakan bahwa Islamisasi harus dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial maupun politik.

Munculnya gerakan keagamaan yang bersifat radikal merupakan fenomena penting yang turut mewarnai citra Islam kontemporer Indonesia. Karena itu Islam yang bersifat radikal memiliki tempat tersendiri dalam diskursus dalam kehidupan sosial politik. Proses mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut dilakukan untuk mendefinisikan istilah-istilah seperti ‘Islam Radikal atau Islam Revivalis atau Islam Fundamentalis. Secara sederhana “Islam Radikal” adalah kelompok-kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung.<sup>11</sup> Dalam kegiatan aksi atau kegiatannya mereka sering kali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka. Secara sosio-kultural dan sosio-religius, kelompok radikal ini mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan diri dan seringkali bergerak secara gerilya, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm 271

<sup>11</sup> Jamhari J. Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2004. Hlm 3

John L. Esposito menggunakan istilah 'Islam revivalis' untuk menunjukkan gerakan Islam kontemporer tersebut. Esposito mengidentifikasi beberapa landasan ideologis yang dijumpai dalam gerakan-gerakan tersebut antara lain:<sup>12</sup>

- *Pertama*, kelompok-kelompok ini berpendapat bahwa Islam adalah sebuah pandangan hidup yang konprehensif dan bersifat total
- *Kedua*, mereka seringkali menganggap bahwa ideologi masyarakat Barat harus ditolak. Mereka meyakini bahwa masyarakat muslim telah gagal membangun masyarakat beragama yang ideal karena telah berpaling dari 'jalan lurus' sesuai dengan syari'at Islam dengan mengikuti cara pandang Barat yang sekuler dan materialis (termasuk modernisasi, liberalisasi dan kapitalisme)
- *Ketiga*, mereka cenderung mengajak pengikutnya untuk 'kembali kepada Islam' sebagai sebuah usaha untuk perubahan sosial. Perubahan ini hanya mungkin dilakukan dengan mengikuti sepenuhnya ajaran-ajaran Islam yang otentik seperti Al-Quran dan Al-Hadist
- *Keempat*, karena ideologi barat harus ditolak, maka secara otomatis ideologi dari Barat harus ditolak termasuk warisan kolonialisme. Sebagai gantinya masyarakat Muslim harus menegakan hukum Islam sebagai satu-satunya sumber hukum yang diterima
- *Kelima*, meskipun banyak yang menganggap kelompok-kelompok ini terlalu mengagung-agungkan kejayaan Islam di masa lalu yang tercermin pada sikap

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm 4



puritan dalam upaya pemberlakuan sistem sosial dan hukum yang sesuai dengan masa Nabi Muhammad dan dengan jelas menolak ideologi barat, tetapi pada diwaktu yang sama sebenarnya mereka tidak menolak modernisasi seperti halnya tidak menolak sains dan teknologi. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana mereka melakukan sosialisasi gagasan dan demonstrasi dengan menggunakan alat-alat komunikasi modern seperti telepon seluler, dan internet.

- *Keenam*, mereka meyakini bahwa upaya-upaya Islamisasi pada masyarakat Muslim tidak akan berhasil tanpa menekankan aspek pengorganisasian ataupun pembentukan sebuah kelompok dengan ideologi yang kuat. Dengan cara seperti itulah mereka dapat meyakini para pengikutnya untuk menjalankan tugas suci keagamaan dalam rangka menegakan hukum Islam.

Untuk melihat gejala yang lebih kontemporer, apa yang diperlihatkan para aktifis gerakan-gerakan tersebut terkadang melampaui beberapa landasan ideologis diatas. Tetapi terdapat karakteristik yang dapat di identifikasi mengapa sebuah kelompok layak disebut sebagai ‘Islam radikal’<sup>13</sup>

- *Pertama*, mereka masih menunjukkan mentalitas ‘Perang Salib’ Dalam konteks sekarang, hegemoni dunia barat, khususnya bangsa-bangsa barat sering dianggap sebagai salah satu bentuk ‘penjajahan baru’ (*neo-colonialism*). Sementara itu ide-ide mengenai adanya konspirasi dunia barat, termasuk di

---

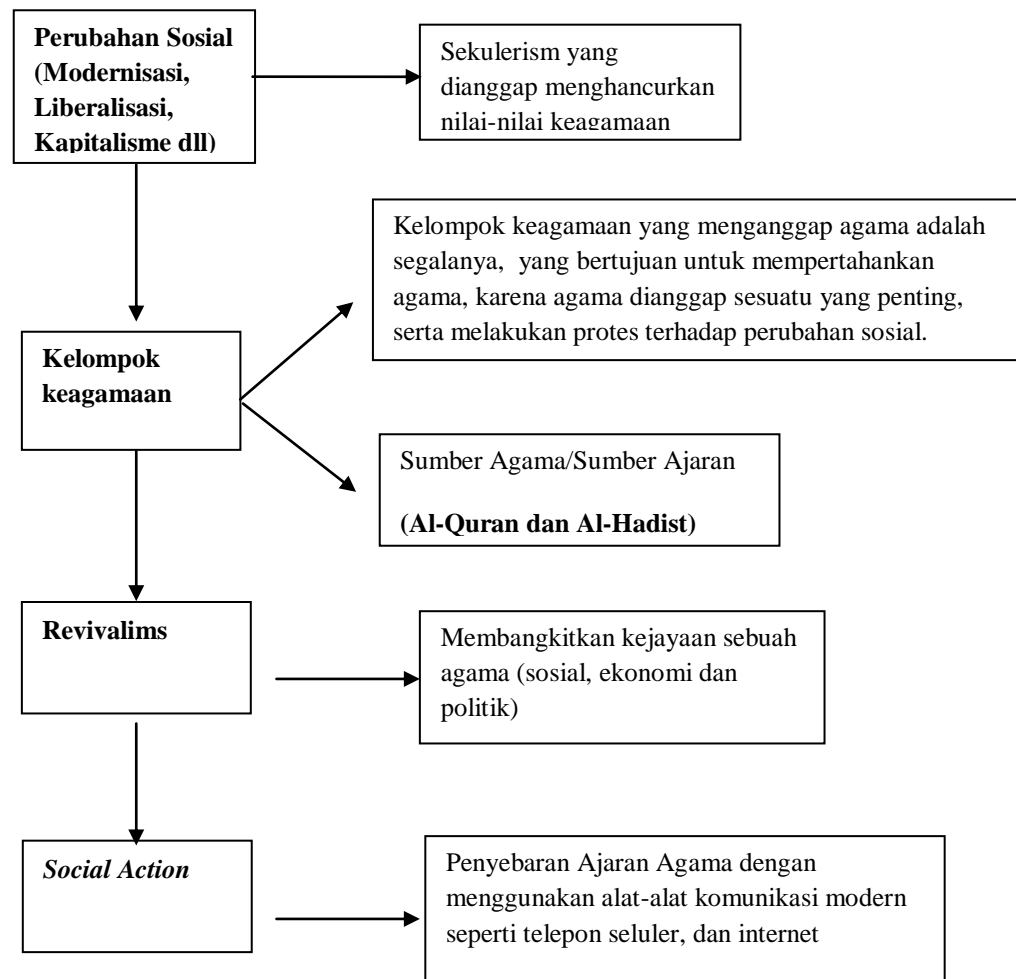
<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm 5

dalamnya gerakan Zionisme Yahudi, yang menentang Islam dan Dunia Islam tetap berkembang dalam kelompok ini.

- *Kedua*, penegakan hukum Islam yang juga kerap diupayakan dengan keras oleh kalangan revivalis dan fundamentalis muslim tidak lagi dianggap sebagai sebuah jalan alternatif melainkan sudah menjadi suatu keharusan. Dengan kata lain tidak ada lagi jalan yang sah selain menjadikan Islam sebagai landasan utama bagi segalanya termasuk dalam kehidupan agama, sosial dan politik
- *Ketiga*, terdapat sebuah kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah berikut sistem-sistemnya yang mapan tapi dianggap tidak sah khususnya masalah ‘penyakit sosial’ yang diidentifikasi sebagai perbuatan ‘maksiat’ dan ‘kemungkaran’
- *Keempat*, semangat untuk menegakan agama sebagai lambang supremasi kebenaran ajaran Tuhan dengan jalan jihad dengan sendirinya mendapatkan tempat yang terhormat (surga).
- *Kelima*, pengalaman-pengalaman melihat masalah sentimen antar agama yang menyangkut agama Islam, Kristen dan Yahudi secara signifikan mempengaruhi persepsi kelompok ‘Islam Radikal’. Hal tersebut para pengikut ‘Islam radikal’ melihat kaum Yahudi dan Kristen sebagai kaum yang memiliki kesatuan tujuan dalam melakukan konspirasi melawan Islam dan Dunia Islam.

### Skema I.1

#### Peta Konsep Kelompok Keagamaan



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2016

Perbedaannya dengan Islam Moderat, agama Islam ditampilkan secara progresif, penuh toleransi dan liberal. Mengutip Charles Kurzman menyatakan bahwa tema-tema yang diajukan oleh kalangan Islam Liberal diantaranya adalah menentang teokrasi, mendukung demokrasi, menghormati hak asasi perempuan, menghormati hak-hak non-muslim, kebebasan berfikir, dan gagasan tentang kemajuan, perlu dikedepankan ditandai dengan tumbuhnya moderatisme Islam Indonesia yakni post-

tradisionalisme Islam seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.<sup>14</sup> Kehadiran dua arus kelompok Islam Moderat tersebut, tak lepas dari munculnya fenomena kelompok Islam Radikal yang kerap melakukan aksi-aksi dengan kekerasan dengan dalih memberantas kemaksiatan dan melindungi kaum Muslim dari keteraniayaan.<sup>15</sup>

## 2. Konstruksi Sosial

Istilah konstruksi sosial atas realitas didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara bersama secara subjektif. Dalam memahami konstruksi sosial, peneliti menggunakan proses dialektik fundamental dari Peter L. Berger dan Luckman. Peter L. Berger dan Luckman mengatakan proses dialektik fundamental dari masyarakat terdiri dari tiga momentum atau langkah antara lain eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, lebih jelasnya perhatikan yang dibawah ini<sup>16</sup>

- *Eksternalisasi*, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia, kedalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Manusia akan mencurahan diri ketempat dimana ia berada. Hal tersebut dilakukan dikarenakan dalam proses eksternalisasinya individu mengidentifikasi dirinya dengan peranan-peranan sosial yang sudah mereka tentukan.

---

<sup>14</sup> Rocky Sistarwanto, *Potensi Ideologisasi Jihad Yang Mengarah Pada Aksi Terorisme Oleh Kelompok-Kelompok Islam Radikal di Indonesia*. Tesis Pasca Sarjana FISIP UI. 2010. Hlm 89

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci, Agama sebagai Realitas sosial*, (Terjemahan Hartono), Jakarta: LP3ES 1991. Hlm 4

- *Objektifikasi*, yaitu hasil yang telah dicapai baik dengan mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil dari eksternalisasi ini manusia menciptakan alat demi kemudahan ataupun alat untuk memudahkan kegiatan manusia bisa dalam bentuk materil maupun non-materil. Objektifikasi maksudnya adalah individu dalam dunia sosial memanifestasikan dirinya dalam produk-produk kegiatan manusia yang telah tersedia, baik sebagai produsen maupun bagi orang lain sebagai unsur-unsur dunia bersama.<sup>17</sup>
- *Internalisasi*, merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian pula sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh dunia sosial. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil masyarakat karena ia dibentuk dan dikonstruksi. Fase ini merupakan fase dimana pemahaman dan penafsiran dari suatu peristiwa obyektif sebagai pengungkapan suatu makna

.<sup>18</sup>

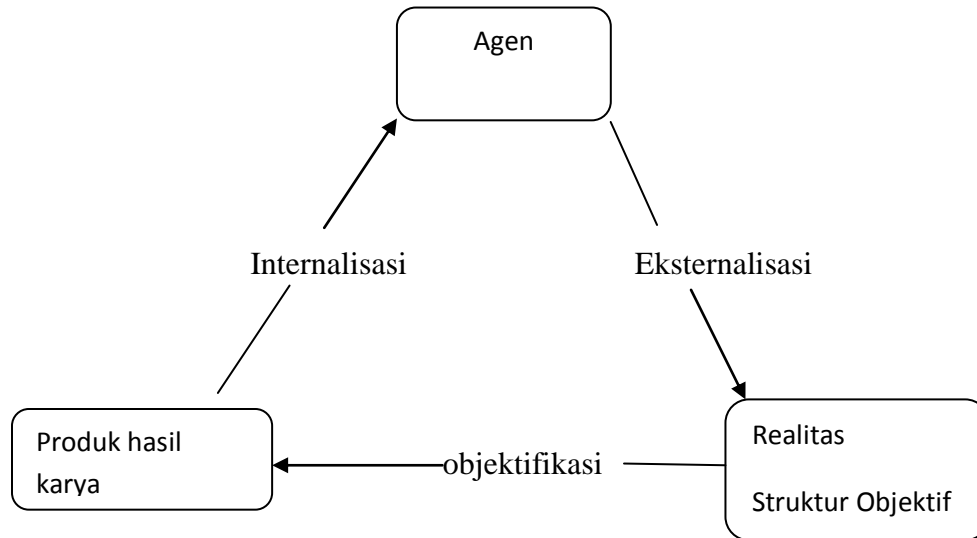
---

<sup>17</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Terjemahan Hasan Basari) Jakarta : LP3ES, 2013. Hlm 47

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm 177

## Skema I.2

### Konstruksi Sosial Peter L. Berger



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2016

### 3. Prasangka

Setiap umat beragama mempunyai keyakinan bahwa agamanya memiliki ajaran yang paling benar. Maka mereka merasa lebih tinggi daripada semua pemeluk agama yang lain, dengan kacamata superior itu memandang segala sesuatu yang ada pada golongan agama lain serba salah karena dibandingkan dengan ajaran dari kelompok sendiri (*ingroup*). Keseluruhan masalah kompleks yang terjadi diatas disebut juga dengan istilah prasangka. Prasangka (*prejudice*) adalah praduga berupa penilaian negatif mengenai suatu kelompok dan setiap individu dari anggotanya. Gordon Allport menulis konsep prasangka dalam bukunya, *The Nature of Prejudice*

bahwa prasangka adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah atau generalisasi yang luwes.<sup>19</sup>

Johnson mengatakan, prasangka adalah sikap positif atau negatif berdasarkan keyakinan stereotip kita tentang anggota dari kelompok tertentu. Seperti halnya sikap, prasangka meliputi keyakinan untuk menggambarkan jenis perbedaan terhadap orang lain sesuai dengan peringkat nilai yang kita berikan. Menurut Jones, prasangka adalah sikap antipati yang berlandaskan pada cara menggeneralisir yang salah dan tidak fleksibel. Hal tersebut dikarenakan prasangka merupakan sikap negatif yang diarahkan kepada seseorang atas dasar perbandingan dengan kelompok sendiri. Effendi, sebagaimana dikutip Liliweri mengemukakan bahwa prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan berat bagi komunikasi, karena orang-orang berprasangka belum apa-apa sudah curiga dan menentang komunikator yang melancarkan komunikasi. Dalam prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar syakwasangka, tanpa menggunakan pikiran dan pandangan kita terhadap fakta yang nyata<sup>20</sup>

Prasangka adalah sikap, sikap adalah kombinasi yang jelas dari perasaan, kecenderungan bertindak dan keyakinan. Orang yang memiliki prasangka mungkin membenci seseorang yang berbeda dengan dirinya dan berperilaku dengan arah yang diskriminatif, misalnya dengan menyakini jika orang-orang tersebut bodoh dan rendahan.

---

<sup>19</sup> Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik Komunitas Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005. Hlm 199

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm 200

Melakukan stereotip juga berarti menggeneralisasi. Generalisasi tersebut kurang lebih bisa benar (tidak selalu negatif), permasalahan stereotip muncul ketika mereka terlalu digeneralisasikan atau keliru dalam menggeneralisasikan.<sup>21</sup> Prasangka dapat muncul dari perbedaan status sosial dan keinginan orang yang membenarkan serta mempertahankan perbedaan tersebut. Institusi sosial kita juga dapat berfungsi dalam mempertahankan dan mendukung prasangka. Prasangka tumbuh dari status yang tidak seimbang dan dari sumber sosial lainnya, termasuk nilai dan sikap.<sup>22</sup> Menurut Theodore M. Newcomb suatu prasangka sosial adalah sikap yang tidak menyenangkan, karena kemudahan untuk mengamati, berbuat, berfikir dan merasakan dan cara-cara yang bertentangan daripada untuk orang atau kelompok lain.<sup>23</sup> Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan prasangka, seperti:<sup>24</sup>

- Diskriminasi adalah perbuatan negatif terhadap kelompok tertentu. Diskriminatif kadang-kadang mengikuti prasangka
- Kesukuan adalah prasangka melalui seorang berbasi suku
- Paham sex (Sexism) adalah prasangka melalui individu-individu pada basis jenis kelamin
- Stereotip adalah keyakinan yang lebih disederhanakan dan dibuat umum tentang kejelasan yang bersifat pribadi dari kelompok orang-orang tertentu.

---

<sup>21</sup> David G. Myers diterjemahkan oleh Aliya Tusyani, *Psikologi Sosial*, PT Salemba Humanika, 2012. Hlm 7

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm 22

<sup>23</sup> Slamet Santoso, *Penerapan Psikologi Sosial*, Bandung; PT Refika Aditama, 2010. Hlm 54

<sup>24</sup> *Ibid*



Berbeda dengan Samovar dkk dalam Turmono Raharjo menguraikan tiga karakteristik dari prasangka yaitu :<sup>25</sup>

- Prasangka merupakan sebuah sikap kategoris, yaitu sikap terhadap kelompok atau kategori orang, bukan secara khusus.
- Prasangka mempersyaratkan keyakinan yang salah, sebab prasangka didasarkan pada gagasan-gagasan yang terlalu disederhanakan, digeneralisasi atau dilebih-lebihkan tentang kelompok seseorang. Prasangka didasarkan pada stereotip, karenanya prasangka biasanya cenderung menjadi kesalahan dalam menilai, yaitu penilaian yang tidak akurat terhadap suatu kelompok atau seseorang yang menjadi anggota kelompok tersebut. Dalam pemahaman ini, prasangka merupakan sikap irasional.
- Prasangka merupakan sikap yang secara emosional bersifat kaku. Seseorang yang berprasangka tidak berkeinginan untuk merubah sikapnya.

Bobo, dalam Baron & Byrne, menyatakan bahwa kompetisi merupakan sumber prasangka yang paling mendasar.<sup>26</sup> Menurut pandangan ini, prasangka terjadi karena adanya kompetisi diantara kelompok sosial dalam mendapatkan komoditas maupun kesempatan yang berharga. Dapat dikatakan prasangka berkembang karena perjuangan dalam mencapai kesejahteraan (*struggle for the welfare*). Jika kompetisi itu berlangsung terus maka akan muncul pandangan yang negatif terhadap orang

---

<sup>25</sup> Lihat Turmono Raharjo, *Mindfulness Dalam Komunikasi Antar Etnis (Studi Tentang antar Etnis Cina dengan Etnis Jawa ; Kasus Sudiroprajan, Solo)*. Disertasi, Departemen Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia, 2004.Hlm 41-42

<sup>26</sup>Joko Kuncoro, *Prasangka Dan Diskriminasi*, Jurnal Fakultas Psikologi UNISSULA Semarang. Hlm 6

lain, hingga orang lain dianggap sebagai musuh. Zastrow mengemukakan bahwa prasangka bersumber dari (1) proyeksi maksudnya adalah upaya mempertahankan ciri kelompok secara berlebihan; (2) frustrasi, agresi, kekecewaan yang mengarah kepada sikap pertentangan; (3) ketidaksamaan dan kerendahan hati; (4) kesewenang-wenangan; (5) alasan historis; (6) persaingan yang tidak sehat dan menjerus ke eksploitasi; (7) cara-cara sosialisasi yang berlebihan; (8) cara memandang kelompok lain dengan pandangan sinis.<sup>27</sup>

Seorang sosiolog Robert K. Merton mengemukakan tentang prasangka dan diskriminasi dalam sikap dan perilaku masyarakat dan beliau menemukan empat kategori tipe manusia antara lain (1) orang yang tidak berprasangka dan tidak diskriminatif; (2) orang yang tidak berprasangka namun diskriminatif; (3) orang yang berprasangka namun tidak diskriminatif; (4) orang yang berprasangka dan diskriminatif.<sup>28</sup>

**Tabel I.2**

**Empat Tipe Prasangka Menurut Robert K. Merton**

	<b>Tidak Diskriminatif</b>	<b>Diskriminatif</b>
<b>Tidak Berprasangka</b>	<b>Tipe 1</b> Orang yang tidak berprasangka dan tidak diskriminatif	<b>Tipe 2</b> Orang yang tidak berprasangka namun diskriminatif
<b>Prasangka</b>	<b>Tipe 3</b> Orang yang berprasangka namun tidak diskriminatif	<b>Tipe 4</b> Orang yang berprasangka dan diskriminatif

**Sumber: Alo Liliweri, 2005**

Tipe 1 dan 2 digolongkan sebagai orang yang liberal, dengan ciri-ciri sangat kuat memegang komitmen terhadap keseimbangan dan kesetaraan antar individu

<sup>27</sup> Alo Liliweri, *Op.Cit* Hlm 204

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm 204

dalam masyarakat. Bagi kelompok 1 dalam keadaan apapun keseimbangan dan kesetaraan itu sangat perlu. Biasanya dalam kelompok 1 ini diisi oleh individu-individu yang tidak peduli (cuek, bodo amat), dengan kata lain “urusan anda menjadi urusan anda dan urusan saya menjadi urusan saya” dan pada akhirnya semua individu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Sedangkan kelompok 2 hanya mengakui bahwa pada saat-saat tertentu orang menjadi sangat liberal, dalam hal ini mereka tidak mempermasalahkan suatu perbedaan kelompok, namun karena beberapa faktor seperti solidaritas kelompok dan pencitraan diri mereka melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain tanpa memikirkan adanya sebuah prasangka kepada kelompok lain. Tipe kelompok 3 dan 4 merupakan orang yang tidak percaya pada perlakuan yang adil atau perlakuan yang tidak sama. Mereka lebih yakin pada tindakan yang mereka lakukan. Tipe kelompok 3 disebut *timid-bigot*, yakni yang malu-malu dan pada saat tertentu dia menjadi orang yang fanatik, maksudnya adalah kelompok ini diisi dengan orang-orang yang mempunyai prasangka tetapi tidak berani mengaktualisasi prasangka tersebut. Sebaliknya tipe kelompok 4 berani/fanatik kapan pun saja untuk mengaktualisasi prasangka dengan tindakan-tindakan diskriminatif.

Menurut Meinarto mengatakan bahwa prasangka adalah sikap yang tidak menguntungkan, baik bagi individu, golongan, atau kelompok lain, karena didasarkan pada pandangan yang belum terbukti kebenarannya.<sup>29</sup> Prasangka ini terdiri dari dua jenis yaitu prasangka eksplisit dan prasangka implisit. Prasangka eksplisit adalah

---

<sup>29</sup> Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*, Jakarta : PT RajaGrafindo 2014. Hlm 37

prasangka yang diutarakan secara terbuka di hadapan publik. Sementara itu prasangka implisit adalah prasangka yang merupakan bagian dari nilai, kepercayaan atau sikap masyarakat. Ada empat fungsi sosial utama prasangka antara lain sebagai berikut<sup>30</sup>

- Prasangka berfungsi untuk melestarikan dan meningkatkan harga diri.
- Prasangka menawarkan kontrol dan melegitimasi hierarki. Prasangka sering mengandung pembenaran untuk tatanan sosial yang ada. Dengan menjelaskan mengapa kelompok tertentu memiliki kekayaan dan kekuatan yang lebih besar daripada yang lain mereka mampu mempertahankan status quo.
- Prasangka pasokan "pengetahuan" dan "orientasi". Prasangka memberikan bingkai yang berguna sebagai acuan untuk memahami dunia. Inilah sebabnya mengapa prasangka muncul terutama dalam situasi krisis, seperti ekonomi, bencana alam atau bencana kelaparan, di mana kebutuhan untuk penjelasan sangat kuat. "Pengetahuan" berbasis stereotip pada gilirannya menuntun persepsi kelompok dalam situasi nyata. Informasi tentang kelompok, misalnya imigran, sering diterima dan dipilih sesuai stereotip yang ada. Ini juga dapat terjadi pada laporan media, yang menyaring informasi untuk mereka pilih dan menyajikan melalui stereotip.
- Prasangka menunjukkan yang bisa dipercaya dan yang tidak bisa. "Pengetahuan" disampaikan oleh prasangka juga untuk memberitahukan

---

<sup>30</sup> Andreas Zick dkk, *Intolerance, Prejudice and Discrimination A European Report*, Berlin: Universitäts-Buchdruckerei, 2011. Hlm 32.

kepada penerimanya mana individu dan kelompok yang bisa dipercaya dan yang tidak bisa.

#### **F. Hubungan Antar Konsep**

Dalam kasus ini, eksternalisasi dimaksudkan sebagai cara FPI memaknai realitas sosial yang terjadi saat ini. FPI sebagai kelompok keagamaan melihat permasalahan realitas sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial dalam bentuk modernisasi, liberalisasi serta kapitalisme yang dapat menimbulkan sikap sekulerisme yang dianggap menghancurkan nilai-nilai keagamaan yang berlandaskan kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadist. Dalam kasus ini FPI dihadapkan oleh perubahan sosial yaitu fenomena kepala daerah Jakarta yang memiliki perbedaan mencolok dengan kepala daerah Jakarta sebelumnya. Seorang kepala daerah memiliki perbedaan antar agama yang dianut oleh mayoritas penduduk DKI Jakarta dengan kepala daerah yang saat ini memimpin DKI Jakarta saat ini. Lalu di dukung oleh penilaian negatif terhadap dengan kepala daerah sebelumnya dan memiliki kebijakan yang dinilai belum prorakyat. Penilaian-penilaian tersebut lalu mendukung terjadinya prasangka terhadap kepala daerah DKI Jakarta saat ini dengan sikap kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap kepala daerah tersebut.

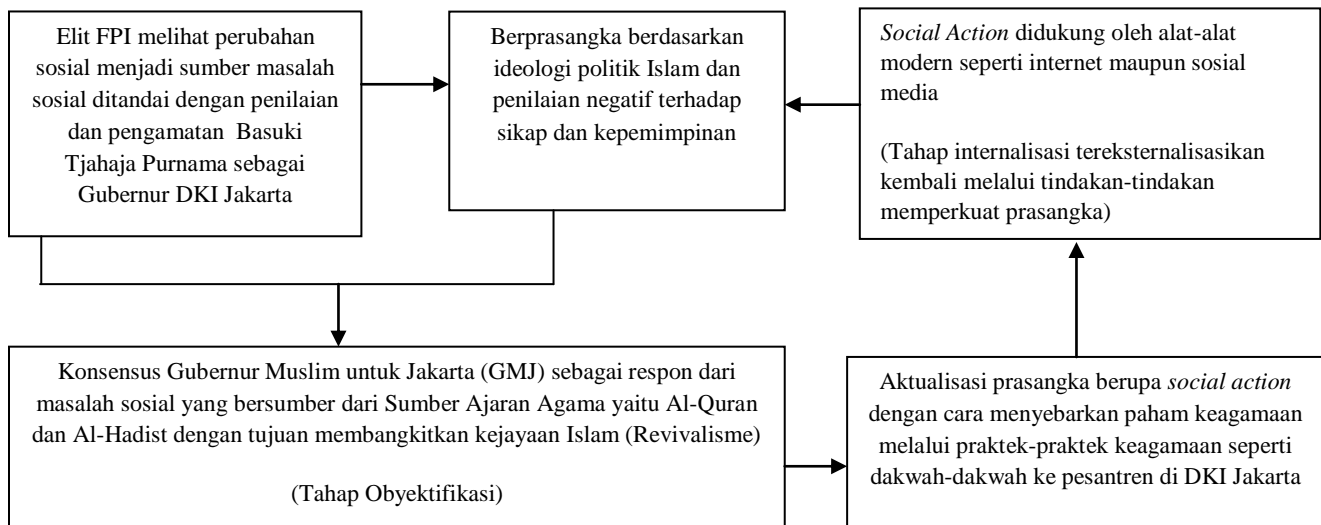
Pada tahap objektifikasi adalah tindak lanjut atau respon FPI melihat permasalahan sosial. Tindak lanjut dari setelah melihat permasalahan sosial ini adalah memberikan solusi yang tepat melalui konsensus. Respon tersebut divisualisasikan dalam bentuk GMJ (Gubernur Muslim untuk Jakarta) yaitu suatu perkumpulan

kelompok keagamaan yang mempunyai struktur kepengurusan, ideologi, visi dan misi, tujuan perkumpulan kelompok keagamaan, serta yang terakhir praktik keagamaan. Tujuan GMJ adalah mewujudkan keinginan berbagai kelompok keagamaan Islam yaitu menciptakan sistem pemerintahan yang kebijakannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam bentuk perencanaan upaya-upaya revivalis (membangkitkan kejayaan Islam). GMJ menjadi sebuah perkumpulan dalam kontestasi Pemilihan yang akan datang melawan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Rencana-rencananya dalam bentuk upaya yang dilakukan GMJ secara konstitusional lainnya adalah melaporkan Ahok kepada pihak-pihak yang berwajib terkait kasus-kasus yang melanda Ahok dan beraspirasi di depan publik dengan cara berdemo dan menyampaikan aspirasi kepada DPRD DKI Jakarta.

Tahap terakhir adalah tahap internalisasi adalah proses setelah perkumpulan kelompok keagamaan terbentuk, mereka melakukan proses sosialisasi penanaman nilai-nilai ideologi. Sosialisasi ini penanaman nilai-nilai yang ingin dicapai dari individu kepada individu yang lain. Individu yang telah mempunyai nilai-nilai yang baru ini akan mengeksternalisasikan kembali dalam bentuk aktualisasi rencana-rencana yang sudah matang untuk menghambat dan menjatuhkan Ahok dari jabatannya. Aktualisasi prasangka melalui pelaksanaan program kerja tersebut secara langsung FPI melalui GMJ telah melakukan tindakan diskriminatif sebagai tindakan memperkuat prasangka

### Skema I.3

#### Hubungan Antar Konsep



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2016

### G. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian.<sup>31</sup> Pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yang merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilakukan individu atau sekelompok orang. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data

<sup>31</sup> Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*, Yogyakarta : PT "Paradigma", 2005. Hlm 5

secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan data.<sup>32</sup>

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Markas Pusat FPI yang berlokasi di Jl. Petamburan 3, Tanah Abang Jakarta Pusat. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat bertemu langsung kepada para pemimpin atau tokoh masyarakat yang berpengaruh besar di tubuh organisasi FPI, sehingga data yang peneliti butuhkan didapatkan oleh sumber yang terpercaya. Subjek penelitian ini pun lebih difokuskan kepada para pimpinan FPI sebagai pembuat keputusan di dalam tubuh organisasi FPI. Hal ini dikarenakan judul yang diangkat oleh penulis mengenai Konstruksi Prasangka Elit FPI terhadap Gubernur DKI Jakarta. Selain para pimpinan/pemuka agama FPI, subjek penelitian ini juga terfokus melihat bagaimana proses konstruksi prasangka pimpinan FPI terhadap kepala daerah yang berlatar belakang berbeda dari kepala daerah sebelumnya, serta dampak proses sosialisasi antar umat bergama. Subjek penelitian ini antara lain

### **2. Peran Peneliti**

Peran peneliti disini adalah untuk menjelaskan latar belakang terjadinya konstruksi prasangka kepada Gubernur DKI pada organisasi keagamaan yang cukup terkenal di Indonesia ini yaitu FPI, serta merangkai semua temuan data dianalisis melalui teori-teori yang peneliti gunakan. Masalah yang terjadi pada kasus ini

---

<sup>32</sup> Miles dan Huberman 1994, dalam John W. Creswell, 2013. *Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta; Pustaka Belajar, Hlm 5



berawal dari penolakan FPI kepada Basuki Tjahaja Purnama yang menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah menggantikan Gubernur sebelumnya yang telah menjadi Presiden NKRI saat ini. Peneliti ingin menjelaskan penyebab apa saja yang melatarbelakangi penolakan tersebut serta motif dari tindakan FPI tersebut. Langkah-langkah yang harus ditempuh peneliti antara lain membuat *review* berbagai macam referensi dari buku, jurnal serta skripsi maupun tesis dan disertasi. Hal tersebut untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu langkah yang harus ditempuh oleh peneliti adalah mengurus proses administrasi perizinan untuk melakukan penelitian di FPI dengan cara mengurus surat-surat di BAAK UNJ.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode

- **Metode Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan atau narasumber yaitu kepada para elit FPI. Elit FPI disini dimaksudkan kepada tokoh-tokoh cendekiawan keagamaan FPI yang berperan, berpengaruh dan terlibat langsung terhadap semua aktivitas ormas FPI. Pada metode ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan akar permasalahan secara lebih rinci saat informan yaitu pada tokoh cendekiawan keagamaan FPI

diajukan beberapa pertanyaan atau diminta pendapat. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka penulis juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, dokumentasi, atau material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar

**Tabel I.3**

**Daftar Informasi Peneliti**

No.	Nama Informan	Posisi	Status Informan
1.	Habib Ali Alatas	Pimpinan DPP FMI (Salah satu Sayap Organisasi FPI bidang Intelektual)	Informan Kunci
2.	Habib Idrus	Pimpinan Lembaga Dakwah FPI	Informan Kunci
3	M. Syahroji	Sekretaris FPI	Informan Kunci
4	Ust. Maman Suryadi	Panglima LPI Nasional	Informan Kunci
5	Ubaidillah Badrun	Pengamat Politik	Informan Pendukung
6	Prof. Hamdi Muluk	Pengamat Politik	Informan Pendukung
7	Richard Saerang	Pendiri Teman Ahok	Informan Pendukung

- **Metode Observasi**

Peneliti melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian serta berinteraksi secara intens dengan nara sumber selama pengumpulan data. Hal ini dilakukan agar data yang didapat lebih lengkap dan terperinci. Dalam hal ini, penulis dalam melakukan pengumpulan data, menyatakan terus terang kepada informan atau narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas seseorang yang sedang meneliti.

- Metode Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan sebelum penelitian ini dilakukan, hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan banyak referensi dengan memanfaatkan berbagai macam penelitian pustaka, seperti buku, jurnal serta skripsi maupun tesis sejenis yang relevan dengan tema penelitian yang tengah diangkat oleh penulis.

#### 4. Analisis Data

Serangkaian langkah-langkah harus ditempuh oleh peneliti antara lain adalah membuat kategori-kategori atas informasi yang diperoleh (*open coding*), lalu memilih salah satu kategori dan menempatkannya dalam satu model teoritis (*axial coding*), lalu merangkai sebuah cerita dari hubungan antar kategori ini (*selective coding*)<sup>33</sup>. Peneliti juga melakukan analisis wacana (*discourse analysis*) yaitu suatu cara atau metode untuk mengkaji wacana yang terdapat di dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual.<sup>34</sup> Analisis wacana ini berkenaan dengan isi pesan komunikasi yang sebagian diantaranya berupa teks seperti naskah pidato, transkrip sidang ataupun perdebatan yang artiketlnya dimuat di surat kabar.

#### 5. Triangulasi Data

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini memerlukan triangulasi data dalam melihat proses konstruksi pembentukan prasangka yang dilakukan oleh FPI serta hasil yang diperoleh dari konstruksi stereotip tersebut yang melibatkan para

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 275

<sup>34</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara, 2007. Hlm 170

*stakeholder* FPI. Oleh karena itu untuk mendapatkan keabsahan data yang optimal maka diperlukan verifikasi data hasil wawancara informan kunci dengan hasil wawancara informan pendukung. Setelah melakukan wawancara kepada para *stakeholder* FPI, peneliti pun akan melakukan kroscek dengan mewawancarai pengamat. Berkenaan dengan pengamat adalah mengkroscek hasil data yang didapat di lapangan dalam perspektif sosiologis.

#### **H. Keterbatasan Penelitian**

Karya ilmiah ini memiliki hambatan yang sulit ditempuh antara lain adalah karya ilmiah ini belum dapat menemui dan mewawancarai tokoh-tokoh sentral dan tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh besar terhadap FPI. Disini peneliti pada awalnya menginginkan penelitian ini bisa mendapatkan data dari tokoh-tokoh sentral tersebut yang merupakan para Elit FPI seperti Habib Rizieq sebagai Imam Besar FPI, KH. Ahmad Sabri sebagai Ketua FPI, KH Misbahul Anam sebagai Ketua Majelis Syuro FPI, dan Bapak Munarman sebagai Sekertaris Jendral FPI. Dalam mensiasatinya dalam memperoleh data penelitian, peneliti mencari data dari beberapa Habaib dan Panglima LPI seperti Habib Ali Alatan, Habib Idrus serta Ustadz Maman Suryadi. Selain itu peneliti juga mendapatkan data dari sumber-sumber sekunder antara lain dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan media elektronik.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Pada bab 1 pendahuluan, penulis ingin menjabarkan latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, tinjauan pustaka,

kerangka teori dan metodologi penulisan. Alasan mengapa peneliti memilih judul “Konstruksi Prasangka Elit FPI Terhadap Gubernur DKI Jakarta” adalah karena penulis menemukan realitas sosial dimana terjadi penolakan FPI kepada Gubernur DKI Jakarta yang dilandasi oleh perbedaan kepentingan.

Pada bab 2 peneliti akan menjelaskan FPI sebagai kelompok keagamaan, sejarah terbentuknya FPI, visi dan misi serta praktik keagamaan dalam bentuk program kerja yang dilaksanakan oleh FPI yang berlokasi di Jl. Petamburan III No.17, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain itu pada bab ini akan dijelaskan tentang struktur organisasi dan *stakeholders* yang ada di dalam organisasi FPI.

Pada bab 3 peneliti akan menjelaskan proses terbentuknya prasangka FPI terhadap Gubernur DKI Jakarta, dimana pada bab ini akan mengurai alasan terbentuknya prasangka dan hal-hal apa saja yang melatarbelakangi prasangka tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta, mendeskripsikan prasangka-prasangka menurut FPI, aktualisasi prasangka, dan bagaimana mensosialisasikan prasangka kepada masyarakat luas.

Pada bab 4 peneliti akan memaparkan inti dari penelitian ini yaitu konstruksi prasangka FPI terhadap Gubernur DKI Jakarta. Pada bab ini akan mengurai prasangka apa saja yang terjadi lalu tindakan apa saja yang dilakukan FPI setelah prasangka tersebut muncul menggunakan konsep-konsep yang sudah dipersiapkan oleh peneliti sebelumnya.

Pada bab 5 penulis akan menguraikan kesimpulan berdasarkan pemaparan penelitian dari bab-bab sebelumnya dan juga peneliti akan memberikan saran yang positif yang dapat membangun bagi pembaca pada umumnya dan peneliti sendiri khususnya.

## **BAB II**

### **KARAKATERISTIK FRONT PEMBELA ISLAM**

#### **A. Pengantar**

FPI merupakan salah satu organisasi Islam yang cukup penting pasca reformasi. Gerakannya diwujudkan dalam tindakan-tindakan dan aksi-aksi yang radikal telah menimbulkan ketakutan dan bahkan menjadi momok bagi sebagian anggota masyarakat. FPI termasuk salah satu kelompok Islam yang kerap dikategorikan sebagai Islam Fundamentalis. Jargon-jargon dari doktrin pembelaan kalimat Allah, lebih khusus lagi pemberlakuan syariat Islam dan penolakan mereka yang tegas terhadap dunia barat. Organisasi ini dengan cepat dikenal masyarakat sejak beberapa tahun belakangan. Hal ini berhubungan erat dengan kegiatan utama mereka yaitu merazia tempat-tempat hiburan yang mereka percaya sebagai sarang maksiat seperti klub malam, diskotik, kafe, dan kasino.

#### **B. Periodisasi Gerakan FPI**

##### **B.1 Pada Periode 1998-2005**

FPI sebagai suatu gerakan yang terorganisir dipelopori oleh beberapa tokoh antara lain : KH Cecep Bustomi (Alm. dan Pengasuh Ponpes Di Serang Banten), KH Manarul Hidayat (Pengasuh Ponpes Al-Mahbubiyah Jakarta), KH Misbahul Anam (Pengasuh Ponpes Al-Umm), Habib Muhammad Rizieq Syihab, KH Didin Damanhuri, Habib Muhsin Alatas, KH Fahrurrazi Ishak, KH Amin Sabirni, Habib Muhdor Al-Muhdor, KH Salim Nasir, KH Oemar Syahroni, Habib Abdurrahman Al-

Khirit, H Tubagus Shidiq, KH Zuhri Yakub, KH Soemarno Syafi'i dan sebagainya.<sup>35</sup> Mereka adalah Mubalig yang senantiasa melaksanakan dakwah ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia, bahkan diantaranya pernah berdakwah keliling ke berbagai negara. Dari pengalaman selama mereka berkeliling berdakwah muncul keprihatinan atas berbagai kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela di berbagai sudut wilayah Indonesia. Setelah melalui upaya sosialisasi ide, pada kesempatan tablig akbar, para Kiyai, Ulama, Habaib dan umat yang dimotori oleh Habib Rizieq, mendeklarasikan FPI sebagai sebuah kelompok yang ditujukan untuk wadah perjuangan melawan kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi di Indonesia. Deklarasi FPI dilakukan di pesantren Al-Umm di Kelurahan Kampung Utan Kecamatan Ciputat, Jakarta Selatan yang tidak jauh dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tanggal 17 Agustus 1998.<sup>36</sup> Pada saat itu kondisi sosial politik Indonesia menepati tahap awal perubahan yang signifikan yaitu awal dari demokrasi bangsa Indonesia. Momen demokrasi di awal era Reformasi ini dimanfaatkan oleh sekelompok tokoh agama yang kemudian mendirikan FPI.

Ada tiga kondisi sosial utama yang melatarbelakangi lahirnya organisasi masyarakat FPI, antara lain yang pertama adalah adanya derita panjang umat Islam Indonesia karena kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oknum penguasa. Alasan kedua adalah adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sekitar kehidupan.

---

<sup>35</sup> Ahmad Haerurohim, *Kontrol Sosial Organisasi Sosial Keagamaan (Studi Kasus Front Pembela Islam Di Provinsi DKI Jakarta)*, Tesis Program Pasca Sarjana, FISIP UI, 2005. Hlm 38

<sup>36</sup> Muhammad Rizieq, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar :Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Maksiat di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Ibnu Sidah, Hlm 126



Sedangkan yang terakhir alasan berdirinya FPI adalah adanya kewajiban menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam.<sup>37</sup> Pada awal masa kehadirannya, gerakan menumpas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa kerap dilakukan dengan cara mengadakan investigasi kasus teror, pembantaian dan pembunuhan pada Ulama, Kiyai dan beberapa Guru Pengajian yang disangkakan sebagai dukun santet pada beberapa wilayah di Indonesia. Dalam merespon kasus tersebut FPI membuat pernyataan “Seruan Jihad FPI” menghadapi serangan teror terhadap cendikiawan agama dan menuntut pertanggungjawaban Orde Baru. Pada tahun yang sama FPI merespon terjadinya insiden Kupang, Nusa Tenggara Timur bahwa terjadi pembakaran rumah ibadah dan penganiayaan sejumlah umat Islam. Selain itu FPI juga mengeluarkan pernyataan sikap tentang penutupan tempat-tempat maksiat menjelang Bulan Ramadhan.<sup>38</sup>

Pada periode ini, FPI lebih sering melakukan pemberantasan maksiat antara lain pernyataan sikap terhadap media-media pornografi, perjudian dan penindasan terhadap agama Islam dan umat Islam. Hal ini merupakan partisipasi mereka terhadap penegakan hukum dalam bentuk melakukan “Pawai Anti Maksiat” serta melakukan penutupan secara paksa tempat pelacuran/prostitusi dan diskotik yang dianggap sarang narkoba dan yang paling mencolok adalah penolakan FPI terhadap majalah *Playboy Indonesia* yang berujung pada kekerasan.<sup>39</sup> Pada pernah melakukan upaya-

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm 127

<sup>38</sup> Bakti Andriyono, *Organisasi Keagamaan Front Pembela Islam*, Tesis Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003.

<sup>39</sup> Yal Robiansyah, *Kekerasan Massa Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Tempat Hiburan di Jakarta*, Tesis Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2006.

upaya penegakan Islam sebagai ideologi negara pernah diupayakan antara lain yang mengusulkan Pengembalian Piagam Jakarta sebagai dasar negara.<sup>40</sup> Dalam gerakan sosialnya, ormas FPI berkontribusi besar dalam mengirim sukarelawan pada saat bencana Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam tahun 2004. Mereka membantu melakukan evakuasi korban-korban bencana alam dan memberi bantuan logistik serta menjaga kesucian Masjid Raya Baiturrahman. Selain itu mereka juga melakukan Tim Kemanusiaan untuk kemanusiaan menyampaikan bantuan ke Irak.

## **B.2 Pada Periode 2005-2012**

Pada awal periode ini, FPI masih berfokus kepada memberikan bantuan kemanusiaan di Aceh, tetapi pada pertengahan 2005 mereka juga cukup sering melakukan *sweeping* dan merazia tempat-tempat yang mereka anggap maksiat salah satunya Kontes Miss Waria di Gedung Sarinah Jakarta dan menegakan Islam kepada hakikatnya seperi menyambang kantor Jaringan Islam Liberal. Pada periode ini FPI juga sering berkontribusi pada bantuan kemanusiaan dibuktikan pada Bencana jebolnya Situ Gintung, Bencana Alam di Mentawai, Merapi dan Gempa di Padang. Mereka memberikan bantuan logistik dan bantuan evakuasi korban bencana alam tersebut yang menelan banyak korban jiwa. Selain itu FPI kawal korban Mesuji untuk mencari keadilan pada penampu kebijakan. Para korban kekejian aparat tersebut didampingi oleh Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab beserta Badan Hukum Front (BHF) dan Laskar FPI. Ahmad Hanafi SH, salah seorang

---

<sup>40</sup> M. Zaki Mubarak, *Islam Fundamental Radikal dan Kepolitikan di Indonesia (Gerakan dan Pemikiran FPI, Majelis Mujahidin, Laskar Jihad dan HTI Tahun 1998-2003)*, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2003.

advokat BHF FPI mengatakan, para korban Mesuji ditampung di Wisma FPI, di Jalan Petamburan III. Tidak hanya korban Mesuji, FPI pernah mendatangi Kalimantan Tengah atas undangan Warga Dayak yang meminta bantuan FPI atas berbagai ketidakadilan di Kalteng.<sup>41</sup>

Dalam melakukan penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, mereka juga menyambangi tempat-tempat yang merusak moral bangsa antara lain menggerebek 11 lokasi tempat hiburan dan warung minuman keras di Kampung Kresek Pondok Gede, Bekasi. Dalam menghentikan perbuatan maksiat, mereka melakukan aksi menolak miras kepada Kemendagri yang berusaha ingin melegalkannya. Selain itu FPI dan Laskar Pembela Islam (LPI) mendatangi Hotel Bumi Wiyata di Jalan Margonda Raya, Beji, Depok, Jawa Barat untuk membubarkan Seminar Waria yang sedang berlangsung. Selain itu, FPI menghadang bintang porno Jepang Maria Ozawa di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Rencana kedatangan artis porno dari Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi.<sup>42</sup> Akibat aksi-aksi FPI tersebut, Polri pada tanggal 30 Mei 2006 menggelar pertemuan dengan anggota DPR membahas desakan pihak-pihak yang menghendaki FPI itu dibubarkan. Kondisi ini sebagai cemin bahwa hubungan FPI dengan pemerintah selalu kontradiktif, yang berujung ditahannya beberapa orang tokoh sentral FPI termasuk Habib Rizieq. FPI curiga, bahwa wacana pembubaran FPI disebabkan intervensi asing (konspirasi), sebab wacana itu baru digulirkan dua hari setelah kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald

---

<sup>41</sup> Alfi Dwi, *Rangkuman Kegiatan FPI 1988-2012* <http://www.bamah.net/2012/02/rangkuman-kegiatan-fpi-tahun-1998-2012/> di akses 1 Februari 2017 pukul 15.30 WIB

<sup>42</sup> *Ibid*

Rumsfeld. Di sini tampak adanya rasa saling tidak percaya antara FPI dan pemerintah, yang terus bertahan hingga sekarang ini.<sup>43</sup>

Pada periode ini yang paling mencolok adalah ketika pada tahun 2008 massa FPI bentrok massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) yang sebagian besar terdiri dari aktivis liberal, kaum homoseks, dan beberapa organisasi menyimpang lainnya di sekitar Monas. Massa AKK-BB waktu itu sedang berdemo memprotes SKB Ahmadiyah. AKKBB juga dianggap melakukan provokasi sebelum terjadi bentrokan. Pada insiden ini, Munarman muncul sebagai salah satu tokoh sentral yang ingin bertanggung jawab pada insiden monas.<sup>44</sup> Dari beberapa media elektronik disebutkan bahwa Munarman mengatakan lebih baik polisi menangkap dirinya daripada menangkap anggota Laskar Pembela Islam pada insiden Monas. Bapak Munarman menunjukkan posisinya pada ormas FPI dimana Munarman mengeluarkan ancaman akan menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jika berani membubarkan organisasi masyarakat seperti FPI. Ancaman itu dikeluarkan dalam menanggapi pernyataan Presiden di Kupang, dalam acara peringatan Hari Pers Nasional yang mengatakan “ormas yang terbukti melanggar hukum melakukan kekerasan, dan meresahkan masyarakat, jika perlu harus dibubarkan.”

---

<sup>43</sup> Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI (Front Pembela Islam): Mengungkap Rahasia-Rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial*, Jakarta : Non Publisher, 2008.

<sup>44</sup> Daftar Aksi Front Pembela Islam, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_aksi\\_Front\\_Pembela\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_aksi_Front_Pembela_Islam) di akses 1 Februari 2017 pukul 15.00 WIB

### B.3 Pada Periode 2012-2016

Pada periode ini terjadi metamorfosis pada gerakannya, pada periode ini mereka cukup sering menolak kebijakan-kebijakan pemerintah antara lain menolak kebijakan Kemendagri dalam pelegalan minuman keras. Selain itu, FPI juga semakin berani untuk melakukan razia lokalisasi di Kendal, Jawa Tengah. Akibat razia tersebut, FPI dan warga terlibat cekcok dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa akibat tertabrak mobil Avanza yang dimudikan anggota FPI.

Penolakan FPI terhadap kebijakan pemerintah dilanjutkan kepada aksi massa yang ingin menggagalkan kontes Miss World 2013 yang diadakan di Bali. Tetapi tidak selamanya FPI bersikap kontra terhadap kebijakan pemerintah, terkadang mereka juga pro dengan kedaulatan NKRI diaktualisasi dengan cara massa FPI berdemo di depan Kedutaan Besar Australia karena telah menyadap sejumlah petinggi Indonesia seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono. Pada tahun 2013, seorang sosiolog Prof. Tamri disiram teh oleh Munarman yang tidak bersikap demokrasi disaat dialog langsung di salah satu acara debat televisi swasta.<sup>45</sup>

Pada saat DKI Jakarta di pimpin oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, FPI cukup sering melakukan penolakan terhadap pemimpin yang identitas agamanya tidak sama dengan mayoritas penduduk setempat, antara lain penolakan Lurah Susan di Lenteng Agung, Lurah Grace di Pejaten Timur. Saat itu kepala daerah

---

<sup>45</sup> Rangkuman Kegiatan FPI 1988-2012 <http://www.bamah.net/2012/02/rangkuman-kegiatan-fpi-tahun-1998-2012/> di akses 1 Februari 2017 pukul 15.30 WIB

DKI Jakarta membuat kebijakan lelang jabatan, dimana setiap peserta dapat mendaftar menjadi camat, lurah, kepala bidang, dan kepala seksi yang nantinya para peserta tersebut akan diseleksi kualitasnya. Penolakan FPI yang paling mencolok adalah penolakan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur yang saat itu Bapak Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu kepolisian menangkap Novel Bamukmin sebagai koordinator otak kerusuhan sekaligus beserta 21 anggota FPI yang terlibat kerusuhan pada pengangkatan Ahok sebagai gubernur.

Penolakan tersebut dilanjutkan munculnya Maklumat Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam & Markas Daerah Laskar Pembela Islam DKI Jakarta Tentang Penolakan Pemimpin Kafir dan pada saat yang sama Habib Rizieq mewajibkan Anggota FPI Ikut Aksi Lengserkan Ahok. Penolakan tersebut diaktualisasikan munculnya Gerakan Masyarakat Jakarta, yang terdiri dari 90 ormas termasuk FPI dan Forum Betawi Rempug, melantik Fahrurrozi Ishaq sebagai Gubernur Rakyat Jakarta atau Gubernur Tandingan. Pelantikan ini dilakukan di sela-sela demo penolakan Gubernur Ahok di depan Gedung DPRD DKI Jakarta

### **C. Visi FPI**

Sesuai dengan latar belakang pendiriannya, maka FPI mempunyai sudut pandang yang menajadi kerangka berfikir organisasi (*visi*) bahwa penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezhaliman dan kemunkaran. Tanpa penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, mustahil kezhaliman dan

kemunkaran akan sirna dari kehidupan umat manusia di dunia. FPI bermaksud menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* secara *kaffah* disegenap sektor kehidupan dengan tujuan menciptakan umat sholih yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>46</sup>

#### **D. Pola Rekrutmen Anggota FPI**

FPI memiliki beberapa pola rekrutmen yaitu ada formal maupun informal. Pada saat formal, beberapa waktu FPI mengedarkan formulir pendaftaran untuk menjadi anggota FPI. Formulir yang mereka buat diedarkan dikampus-kampus, majelis ta'lim sampai kalangan masyarakat bawah. Dalam proses rekrutmen ini, dilakukan test kepada anggota berupa baca Al-Quran, rukun Islam, rukun Iman, syahadat dan beberapa materi tentang kepeahaman tentang agama Islam.<sup>47</sup> Lain halnya dengan jalur informal, pada jalur informal ini FPI mengirimkan da'i-da'inya ke daerah-daerah yang sasarannya adalah remaja masjid dan majelis ta'lim melalui proses pengenalan figur yang sangat berpengaruh dan karismatik pada ormas FPI yaitu Habib Rizieq sebagai Imam Besar FPI.<sup>48</sup> Menurut Weber pemimpin kharismatik merupakan pemimpin yang diperlakukan seolah memiliki kekuatan yang tidak lazim yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hlm 146

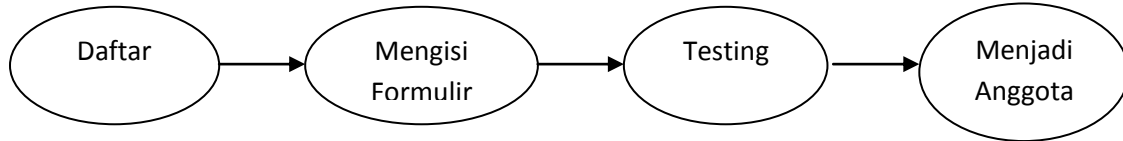
<sup>47</sup> Agung Setiawan, *Pola Rekrutmen Kaderisasi Anggota FPI*, Skripsi Sosiologi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta 2013. Hlm 60

<sup>48</sup> *Ibid*, Hlm 62

<sup>49</sup> George Ritzet dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Edisi Terbaru*, Terjemahan Nurhadi, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008. Hlm 144-145

## Skema II.1

### Alur Rekrutmen Anggota FPI Secara Formal



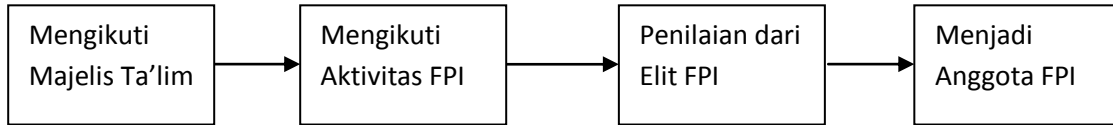
Sumber : Arsip data FPI, 2016

Bapak Syahrozi sebagai informan penulis pernah menceritakan dirinya sebelum bergabung sebagai anggota FPI, beliau adalah seorang adalah anggota aktivis dari Partai Amanat Nasional. Beliau bergabung sebagai anggota FPI juga melalui jalur informal yang berawal dari pengajian disebuah majelis ta'lim. Ketika beliau ikut pengajian, tak disangka pada saat yang sama pendak'wah pada pengajian tersebut adalah Imam Besar FPI yaitu Habib Muhammad Rizieq Syihab. Setelah mengikuti pengajian tersebut, Bapak Syahrozi terkesan dengan ceramah Imam Besar FPI dan sedikit penasaran dengan gerakan FPI dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* mencegah terjadinya kemaksiatan. Rasa penasaran Bapak Syahrozi terhadap FPI berlanjut dengan diwujudkan mencari tahu apa saja yang dikerjakan FPI secara keagamaan dan sosial diaktualisasikan dalam bentuk mengikuti pengajian-pengajian FPI yang diadakan mingguan maupun bulanan serta gerakan-gerakan memberantas kemaksiatan. Setelah para elit FPI salah satunya Habib Rizieq melihat loyalitas yang dilakukan Bapak Syahrozi dibuktikan cukup seringnya mengikuti aktivitas FPI dan dinilai mempunyai pengalaman dalam bidang administrasi organisasi, Bapak Syahrozi diberikan kartu anggota FPI dan diamanatkan sebagai wakil sekretaris di DPP FPI.



## Skema II.2

### Alur Rekrutmen Anggota FPI Secara Informal



Sumber : Arsip data FPI, 2016

### E. Struktur Organisasi FPI

FPI sebagai sebuah institusi religi ialah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetapi atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum untuk mencapai kebutuhan. Sebuah organisasi tentunya memiliki sebuah peraturan yang disusun dan divisualisasikan dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Begitu pula dengan FPI sebagai organisasi masyarakat juga mempunyai AD/ART sendiri yang telah berlaku dan disempurnakan pada tanggal 10 Desember 2008. Struktur utama organisasi ini terpisah menjadi dua bagian antara lain yaitu Majelis Syura sebagai dewan tertinggi FPI dan Majelis Tanfidzi sebagai Badan pengurus Harian

Pada struktur Majelis Syura dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekertaris dan lima orang Dewan Tertinggi Front, antara lain Dewan Syariat, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas. Secara otomatis kelima Dewan Tertinggi Front ini adalah wakil dari Ketua Majelis

Syura. Majelis Syura mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tugas-tugas struktural pada Majelis Syura sebagai berikut

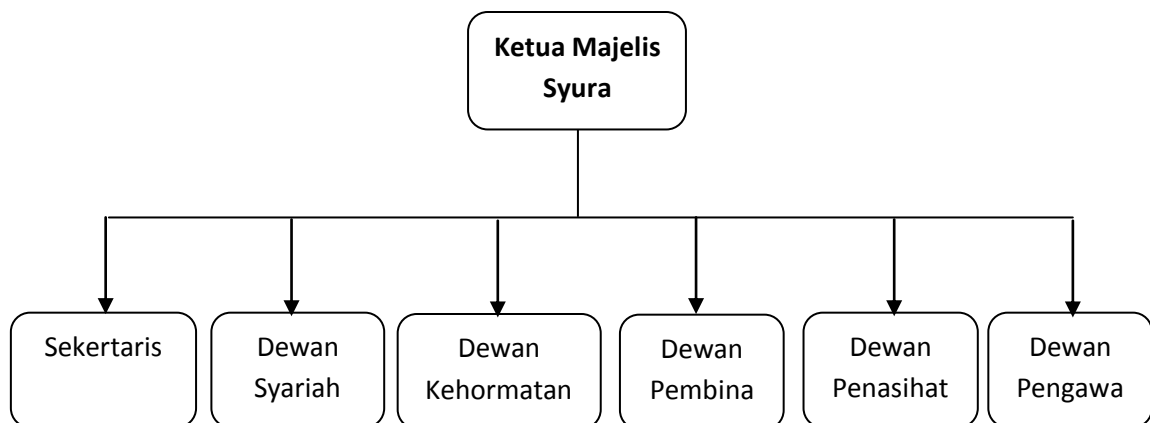
- Majelis Syura memiliki tugas antara lain sebagai berikut: *Pertama*, memilih dan menetapkan Ketua Umum Majelis Tanfidzi melalui Musyawarah Nasional. *Kedua*, memeriksa dan memberhentikan Ketua Umum Majelis Tanfidzi yang terbukti dengan sengaja melakukan dosa besar atau Pelanggaran Berat terhadap AD/ART FPI. *Ketiga*, mengangkat Pejabat Sementara Ketua Umum Majelis Tanfidzi, jika Ketua Umum berhalangan Tetap, meninggal dunia, atau mengundurkan diri. *Keempat*, menjaga, membimbing dan mengarahkan setiap aktivitas FPI. *Kelima*, membantu Ketua Umum FPI melalui masukan-masukan informasi, saran, kritik, dan nasihat
- Dewan Syariat menjalankan tugas antara lain menjaga nilai-nilai syariat dalam aktivitas dan program FPI, membantu Ketua Umum FPI dalam menegakan syariat di tubuh organisasi, memberi masukan dan laporan pengawas syariat kepada Ketua Umum FPI
- Dewan Kehormatan menjalankan tugas antara lain menjaga dan memulihkan citra FPI, meneruskan dan meneliti setiap pelanggaran para aktivis FPI, merekomendasi seluruh sanksi dan pelanggaran kepada Ketua Umum FPI
- Dewan Pembina menjalankan tugas antara lain membina dan membimbing FPI dalam merealisasikan tujuan, membantu melancarkan pembentukan FPI

di daerah dan wilayah, merekomendasi pembentukan FPI di daerah dan wilayah kepada Ketua Umum FPI

- Dewan Penasihat menjalankan tugas antara lain memberikan nasihat yang bermanfaat kepada FPI, menyerap usul, saran dan kritik terhadap FPI, merekomendasi setiap informasi, saran, kritik keputusan dan pertimbangan Ketua Umum FPI.
- Dewan Pengawas menjalankan tugas antara lain mengawasi dan mengevaluasi seluruh aktivitas program FPI, mengawasi dan mengontrol perilaku para aktivis FPI, merekomendasi semua catatan pengawasan kepada Ketua Umum FPI.
- Sekertaris Jendral FPI menjalankan tugas antara lain membantu Ketua Umum dalam mengelola menejemen dan administrasi organisasi, mengambil peran ketua saat seluruh ketua berhalangan menjalankan tugasnya.

### Skema II.3

#### Struktur Majelis Syura



Sumber : Arsip data FPI, 2016

Menurut Herbert G. Hicks mengatakan bahwa sebuah organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritas, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya.<sup>50</sup> Organisasi formal memiliki beberapa bidang yang mempunyai tugasnya masing-masing dan diikat oleh sebuah struktur. Pada struktur organisasi Badan Pengurus Harian terdiri dari pengurus inti dan pengurus non-inti. Pengurus inti terdiri dari Ketua Umum yang dibantu oleh banyak orang antara lain, Sekretaris Jendral dengan beberapa Wakil Sekretaris Jendral, seorang Bendahara Ahli yang dibantu oleh beberapa Wakil Bendahara Ahli, dua belas Departemen, Empat Badan Khusus, Empat Lembaga Otonom dan Empat anak Organisasi. Pengurus non inti FPI terdiri dari Kepala Seksi, Kepala Bagian, Kepala Divisi dan lainnnya yang tidak termasuk pengurus inti. Badan Pengurus Harian ini sebagai pelaksana program kerja organisasi yang memiliki hak untuk menyusun, dan mengatur program kerja di bidangnya masing-masing sesuai dengan AD/ART FPI dan ketentuan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum Front dibantu oleh Kepala departemen yang berjumlah 12 Departemen yang meliputi antara lain sebagai berikut:

- 1) Departemen Agama, mempunyai program kerja untu menaungi ibadah, da'wah dan fatwa. Dalam departemen ini, FPI mengatur tema apa yang akan disampaikan dalam dakwah maupun fatwa.

---

<sup>50</sup> J. Winardi, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm 9

- 2) Departemen Dalam Negeri, membawahi masalah dalam negeri, contohnya adalah merespon gejala-gejala sosial yang ada di Indonesia dalam bentuk pencegahan-pencegahan maksiat.
- 3) Departemen Luar Negeri, menaungi masalah luar negeri, salah satunya merespon bencana kemanusiaan umat Islam di Palestina dengan cara memberikan bantuan logistik dan mengirim Tim Kemanusiaan untuk mengurangi beban korban jiwa.
- 4) Departemen Bela Negara dan Jihad, menaungi masalah pertahanan, keamanan dan Jihad diwujudkan dengan pemberantasan penyimpangan sosial yang dibatasi kewajaran contohnya melakukan *sweeping* ditempat-tempat yang dianggap maksiat
- 5) Departemen Sosial, Politik, Hukum dan HAM, menaungi masalah sosial dibidang sosial, politik dan HAM. Contohnya merespon gejolak politik saat ini.
- 6) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menaungi masalah pendidikan dan kebudayaan diwujudkan melakukan memberikan bantuan fasilitas dan tenaga pengajar dibeberapa sekolah nonformal.
- 7) Departemen Ekonomi, Keuangan dan Industri, menaungi masalah ekonomi, keuangan dan industri. Departemen ini berfungsi sebagai tempat simpan pinjam dan sebagai wadah menaungi anggota FPI yang memerlukan bantuan finansial
- 8) Departemen Riset dan Teknologi, menaungi riset dan teknologi

- 9) Departemen Pangan, Pertanian dan Pertenakan, menaungi bidang pangan pertanian dan perternakan
- 10) Departemen Kesejahteraan Rakyat, menaungi masalah pembangunan dan lingkungan hidup
- 11) Departemen Penerangan, menaungi urusan penerangan dan informasi.
- 12) Departemen Kewanitaan, membawahi urusan kewanitaan dan anak-anak.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, 12 departemen ini mempunyai tiga Ketua Koordinasi untuk membantu Ketua Umum dalam mengawasi dan pengembangan kedua belas departemen tersebut dengan pembagian tugas antara lain

- Ketua I menangani Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan Departemen Bela Negara dan Jihad
- Ketua II menangani Departemen Sosial, Politik, Hukum dan HAM, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Ekonomi Keuangan dan Industri dan Departemen Riser dan Teknologi.
- Ketua III menangani Departemen Pangan, Departemen Kesejahteraan Rakyat, Departemen Penerangan dan Departemen Kewanitaan.

Selain Kepala Departemen, Front memiliki empat Badan Khusus dibawah Sekertaris Jendral (SekJend) FPI antara lain yaitu Badan Investasi Front (BIF), Badan anti-Terror Front (BTF), Badan Pengkaderan Front (BPF) dan Badan Ahli Front (BAF). FPI sudah mempunyai banyak anggota di berbagai provinsi dan kota, tentunya FPI pun juga memiliki struktur baku yang kompleks selayaknya partai

politik karena memiliki tingkatan dari pusat disebut (DPP), tingkat wilayah (DPW) dan sampai tingkat cabang (DPC). FPI juga memiliki empat lembaga otonom yang independen antara lain Lembaga Pemantau Maksiat (PMF), Lembaga Da'wah Front (LDF), Lembaga Ekonomi Front (LEF) dan yang terakhir Lembaga Bantuan Front (BHF). Adapun anak organisasi sebagai sayap perjuangan FPI terdiri dari Laskar Pembela Islam (LPI), Mujahidin Pembela Islam (MPI), Front Mahasiswa Islam (FMI), Serikat Pekerja Front (SPF).

Untuk merealisasikan tujuan organisasi dan dalam upaya memaksimalkan efektifitas kerja organisasi, FPI membentuk struktur organisasi yang terdiri dari<sup>51</sup>

- *Pertama*, jamaah-jamaah FPI melakukan kegiatan dibidang sosial keagamaan seperti pengajian, bakti sosial, pendidikan, advokasi, relawan bencana alam dan sebagainya
- *Kedua*, kelaskaran FPI dimana merekalah yang bertugas melakukan *pressure* fisik, melaksanakan eksekutor dilapangan dalam pemberantasan kemaksiatan secara langsung seperti penyerbuan, razia, *sweeping*, pembongkaran paksa, pawai/konvoi, demonstrasi dan lainnya.

Dalam mekanisme pemberantasan maksiat, FPI melaksanakan keputusannya dengan menempuh prosedur hukum formal negara terlebih dahulu. Hal ini dalam rangka menghindari jebakan melawan hukum untuk memelihara kesinambungan

---

<sup>51</sup> Yal Robiansyah, *Kekerasan Massa Terhadap Tempat Hiburan (Studi Tentang Kekerasan Massa FPI Terhadap Tempat Hiburan di Jakarta)*, Tesis Kriminologi FISIP UI, 2006, Hlm 40

perjuangan organisasi, khususnya menyangkut gerakan fisik dalam melawan kemungkaran. Prosedur hukum formal ini meliputi:<sup>52</sup>

- a. Menghimpun fakta dan data sebagai bukti hukum adanya kemungkaran yang melanggar hukum agama dan hukum negara
- b. Menghimpun dukungan konkrit masyarakat sekitar yang telah diganggu dan dirugikan oleh kemungkaran tersebut
- c. Membuat laporan tuntutan keseluruhan instansi negara yang berwenang baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sesuai dengan tingkat wilayah permasalahan.

#### Skema II.4

##### Struktur Badan Pengurus Harian



Sumber: Arsip data FPI, 2016

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm 41



## F. Landasan Dasar Gerakan dan Tujuan FPI

FPI didirikan dengan maksud untuk menegakan *amar ma'ruf nahyi munkar* disegala aspek kehidupan Rujukan ini didasarkan pada dalil Al-Quran yang menyatakan adanya perintah tersebut (Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104). *Amal ma'ruf* berarti mengajak melakukan perbuatan baik dengan metode yang lemah lembut, hikmah (ilmu dan amal), dan berdiskusi yang baik. Sedangkan *nahyi munkar* berarti mencegah terjadinya perbuatan yang munkar dengan cara-cara yang tegas, menggunakan langkah-langkah antara lain menggunakan kekuatan/kekuasaan jika bisa dilakukan. Jika langkah pertama tidak bisa dilakukan maka langkah berikutnya menggunakan hati yang dituangkan dalam ketegasan.<sup>53</sup>

FPI merupakan organisasi lintas organisasi keagamaan lainnya dan lintas partai. Sepanjang masih menganut paham *ahlus sunnah wal jama'ah* (paham keagamaan dengan kelompok pengertiannya yang luas meliputi sebagai paham pun dan kelompok mana pun selama berpedoman pada Al-Quran, Al-Hadist, Ijma dan Qiyas sebagai sumber hukum. Sementara pedoman organisasi FPI sebagaimana termaktub dalam AD/ART pasal 3 disebutkan bahwa beriman kepada Allah adalah tujuan tertinggi, Nabi Muhammad adalah teladan, Al-Quran adalah pedoman yang tertinggi, Jihad adalah jalan hidup yang harus ditempuh dan Syahid adalah cita-cita yang senantiasa didambakan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Hlm 48

<sup>54</sup> Jamhari J. Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2004. Hlm 147-148

Apa yang diyakini FPI merupakan konsekuensi dari pemahaman mereka tentang *khairu ummah* (umat yang baik). Bagi mereka untuk menjadi umat yang terbaik, kaum muslim harus menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. Doktrin tersebut mengarah totalisme Islam. Bagi mereka totalisme Islam hanya tercapai melalui penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar. Piagam Jakarta adalah pintu gerbang untuk menegakan syariat Islam di Indonesia yang memiliki asas legalitas “konstitusi” dan “historis” yang sangat kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>55</sup> Sehubungan dengan sikap kerasnya, istilah-istilah seperti radikal, fundamentalis dan ekstrim sering dialamatkan kepada FPI. Namun hal itu justru melahirkan sikap tegar dan sabar dikalangan anggota FPI. Selain sikap keras FPI juga didorong oleh pandangan mereka bahwa Indonesia sudah lama dilanda wabah penyakit maksiat, bahkan hal ini semakin parah sejalan dengan datangnya reformasi. Untuk itu orientasi kegiatan yang dikembangkan FPI lebih pada tindakan konkret berupa *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sejak awal dideklarasikan, FPI sudah terkenal dengan aksi dan karakter organisasinya yang militan dan keras terhadap setiap persoalan yang dianggap merugikan Islam dan umat Islam. Hal ini tidak terlepas dari sejarah awal pembentukan organisasi ini, figur-figur yang berperan dan doktrin-doktrin yang menjadi panutan pada anggota FPI. Motto perjuangan *Hidup Mulia atau Mati Syahid* yang tertanam dalam dada para aktivis FPI adalah dua hal yang menyatu dan saling menyempurnakan, hal tersebut karena seorang muslim tak akan hidup mulia jika tak

---

<sup>55</sup> *Op. Cit* Jamhari. Hlm 142

berharap syahid dan ia mustahil mendapatkan syahid jika ia tak hidup mulia.<sup>56</sup> Ada lima sikap dasar yang harus dimiliki oleh para anggota FPI antara lain, ikhlas dalam niat, mulai dari diri sendiri, istiqamah dalam tindakan dan ucapan, tidak takut berkorban nyawa dan harta, dan yang terakhir yakin sebagai pejuang Allah. Selain sikap yang harus dimiliki oleh anggota FPI, ada enam karakter yang dimiliki gerakan FPI antara lain berani dan tegas, militan, sabar dan tabah, independen, kompromis dan tradisionalis-moderat.<sup>57</sup> Dalam pandangan psikologi agama, ajaran agama memuat norma yang dijadikan pedoman oleh pemeluknya dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma tersebut mengacu kepada pencapaian nilai-nilai luhur yang mengacu kepada pembentukan kepribadian dan keserasian hubungan sosial dengan kelompok keagamaan lainnya dalam upaya memenuhi ketaatan kepada Zat Yang Supernatural.

## **G. Program Kerja FPI**

Program kerja FPI disusun dengan berpedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI yang telah disempurnakan dan diperlakukan terhitung periode 2013-2020 sebagai berikut

### **a. Kesekretariatan**

- 1) Membangun sistem informasi administratif dan kesekretariatan yang Islami dan profesional

---

<sup>56</sup> *Op. Cit*, Rizieq, Hlm 162

<sup>57</sup> Syahrul Efendi, *Rahasia Sukses Habib-FPI Gempur Playboy?!*, Jakarta : Yudi Pramuko, Rajanya Penerbit Islam. Hlm 70

- 2) Memaksimalkan fungsi kesekretariatan sebagai kantor pusat organisasi FPI
- 3) Memperkejakan tenaga profesional untuk mengelola kesekretariatan FPI
- 4) Mengupayakan Sekretariat masing-masing sayap organisasi

b. Pendidikan dan Pengkaderan

- 1) Membangun madrasah Tarbiyah di tingkat Pusat dan Daerah, sebagai Sentral peningkatan Pengkaderan Aktivistis FPI
- 2) Menyusun dan menyeragamkan Kurikulum Pendidikan dan Pengkaderan FPI yang bisa digunakan secara Nasional
- 3) Melaksanakan Diklat Tata kelola dan Manajemen Organisasi
- 4) Menyelenggarakan Diklat Penyadaran Hukum bagi Aktivistis FPI
- 5) Membangun sistem rekrutmen yang sistematis
- 6) Melaksanakan Dauroh Islamiyyah untuk seluruh pengurus dan anggota
- 7) Mengupayakan beasiswa dan mengirim kader-kader FPI di semua jenjang pendidikan baik dalam maupun luar negeri
- 8) Memasukan Visi Misi FPI ke lembaga pendidikan/pesantren yang dikelola aktivis FPI

c. Pengembangan Organisasi

- 1) Membenahi kepengurusan Luar Negeri, Daerah dan Cabang hingga Ranting FPI

- 2) Membuka kepengurusan Luar Negeri, Daerah, Wilayah dan Cabang hingga Ranting FPI di seluruh Indonesia
- 3) Membenahi Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Plang Nama Organisasi FPI di Seluruh Indonesia

d. Bidang Dakwah

- 1) Mengirim Da'I FPI ke berbagai daerah khususnya ke kantong-kantong Kristenisasi dan Aliran sesat
- 2) Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Lembaga Informasi Front (LIF)
- 3) Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Lembaga Da'wah Front (LDF)
- 4) Mengoptimalkan Sistem Informasi dan Komunikasi serta membuat Media Cetak / Elektronik FPI
- 5) Mengoptimalkan seluruh aktivis FPI agar lebih proaktif melakukan pembentukan opini positif untuk FPI di berbagai Media Cetak / Elektronik di tingkat lokal, nasional maupun internasional melalui website, media sosial, sms, e-mail, telepon, spanduk, pamflet, selebaran, surat makalah, artikel, buku, dan lain sebagainya
- 6) Mengadakan seminar, simposium, diskusi dan Bahtsul Masail secara Nasional

e. Bidang Misbah

- 1) Memperjuangkan Pembubaran Komunis Baru, Ahmadiyah, dan semua aliran sesat
- 2) Memberantas tuntas SEPILIS (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme)

- 3) Memperjuangkan Undang-Undang dan Perda-Perda bernuansa Syariat Islam
- 4) Melakukan perlawanan yang cerdas dan sistematis terhadap LSM-LSM Komprador
- 5) Melakukan gerakan elegan, terhormat, dan berwibawa dalam pemberantasan maksiat
- 6) Mengoptimalkan peran dan fungsi Hilal Merah Indonesia (HILMI) dalam bidang kemanusiaan
- 7) Memberdayakan masyarakat secara nasional dalam gerakan *Amar ma'ruf nahi munkar*

f. Pengembangan Sosial dan Ekonomi

- 1) Mempraktekan dan mensosialisasikan Sistem Sosial Ekonomi Islam
- 2) Mengupayakan Pendirian Lembaga Amil Zakat FPI
- 3) Mengupayakan Pendirian Lembaga Keuangan Syariat FPI
- 4) Mengupayakan Pembangunan Jaringan Kerja Umat FPI
- 5) Memaksimalkan Fungsi dan Peran Serikat Kerja Front (SPF)

g. Bidang Jihad

- 1) Memantapkan dan menyeragamkan pemahaman jihad kepada seluruh aktivis Islam
- 2) Memberikan perlindungan kepada Mustadh'afin dan Mazlumin
- 3) Menggalangkan dan menyalurkan bantuan kepada Mujahidin di seluruh dunia.

## **H. Penutup**

Pada bab ini dijelaskan FPI merupakan sebuah kelompok sosial yang berlandaskan agama khususnya agama. Kelompok sosial ini tercipta melalui respon perubahan sosial saat pasca reformasi. Seperti halnya kelompok sosial lainnya, kelompok sosial yang berlandaskan agama ini juga mempunyai struktur organisasi dimana setiap bagian-bagian dari struktur tersebut mempunyai perannya masing-masing dalam bentuk program kerja yang harus dilaksanakan oleh setiap departemen yang ada ditubuh organisasi FPI. Seiring perkembangan zaman kelompok sosial ini juga berkembang, hal tersebut dibuktikan semakin banyaknya sayap organisasi FPI yang mempunyai peran berbeda-beda dan dibutuhkan keahlian khusus.

### **BAB III**

## **PROSES KONSTRUKSI PRASANGKA FPI TERHADAP GUBERNUR DKI JAKARTA**

#### **A. Pengantar**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, kemajemukan dalam masyarakat Indonesia telah terbentuk sejak masa sebelum zaman kolonial. Seperti yang kita tahu masyarakat adalah terdiri dari individu-individu yang masing-masing membentuk pengelompokan. Pengelompokan masyarakat di Indonesia bukan hanya didasari oleh pengelompokan atas etnik, agama dan ras tetapi juga berdasarkan kelas sosial (atas dasar pendidikan dan pekerjaan) dan gender. Masing-masing kelompok masyarakat tersebut berhubungan satu sama lain dalam sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Kemajemukan pada hakikatnya merujuk kepada pengelolaan perbedaan yang dapat menimbulkan konflik dan ketegangan apabila itu terkait dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Tentunya kelompok-kelompok ini mempunyai relasi dan pandangannya terhadap kelompok lain. Begitu juga FPI sebagai LSM mempunyai pendapat kepada kelompok lain yaitu birokrasi pemerintahan DKI Jakarta yang dipimpin langsung oleh Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pendapat-pendapat FPI ini berisikan prasangka (*prejudice*) yang dapat mereka nilai dari latar belakang, sikap dan kepemimpinan yang menurut mereka bertentangan dengan aturan dan kultur



masyarakat DKI Jakarta. Pada bab ini, peneliti ingin mendeskripsikan penilaian-penilaian FPI terhadap Ahok mulai dari latar belakang, sikap dan kepemimpinan Ahok secara rinci agar lebih jelas untuk dipahami.

### **B. Ideologi Politik Sebagai Prasangka Utama FPI Terhadap Ahok**

Identitas adalah sebuah dimensi kepercayaan yang melekat pada diri manusia mulai dari ciri fisik, kelompok etnik, agama, tradisi bahasa dan ideologi dalam sebuah klasifikasi kebudayaan tertentu. Identitas membuat seorang individu dikenal dan diklasifikasikan dengan kategori tertentu oleh individu yang lain tetapi disisi lain setiap individu mampu dan dapat menegksistensikan identitas sosialnya melalui produktivitasnya sehari-hari. Identitas juga pendukung munculnya prasangka, dimana saat seorang individu yang memiliki perbedaan persepsi melakukan penilaian terhadap individu yang lainnya dengan kategorisasi yang dimiliki oleh seorang individu tersebut.

Begitu pun dengan pendapat FPI, sebagai kelompok keagamaan Islam yang memiliki ideologi politik tersendiri berdasarkan sudut pandang agama dan mereka merupakan bagian dari masyarakat DKI Jakarta yang komposisi penduduknya mayoritas Islam menginginkan segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hukum pemerintahan DKI Jakarta ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut disampaikan oleh Habib Ali sebagai berikut:

“Jadi DKI Jakarta itu penduduknya mayoritas Islam, sejarahnya erat dengan Islam karena pendiri Jakarta yaitu Fatahillah yaitu Ulama Islam yang berusaha merebut Sunda Kelapa dari tangan orang penjajah kafir, ikatan Islam di Jakarta sangat prinsipil, di Jakarta umat Islam 80% berarti ada hak-hak yang harus dimiliki oleh umat Islam contohnya beribadah dll”<sup>58</sup>

Habib Ali menambahkan bahwa masalah Jakarta ini adalah kota metropolitan, walaupun Jakarta ini tempat bermacam berkumpulnya suku agama ras, ini daerah mayoritas Umat Islam haruslah dan alangkah baiknya segala hukum, aturan, segala tindak tanduk pemerintahan ini minimal tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>59</sup> Dalam pernyataannya tersebut FPI berpendapat bahwa wilayah atau daerah yang penduduknya mayoritas umat Islam seperti Jakarta seharusnya memiliki pemerintahan yang minimal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain alasan jumlah umat Islam di Jakarta yang cenderung mayoritas, hal tersebut juga disebabkan oleh alasan historis dimana kontribusi kaum muslim yang dipimpin oleh Ulama Islam Fatahillah merebut Jakarta dari tangan penjajah.

Disamping itu tidak sedikit pula pandangan positif yang timbul pada tubuh FPI mengenai kelompok keagamaan non-muslim. Rasa toleransi sebagai masyarakat Indonesia yang multikultural menyadari betapa pentingnya kerukunan dan rasa saling menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan. Berikut yang dijelaskan oleh Bapak Syahroji dan Habib Ali :

“Alhamdulillah secara muamalah hubungan dengan mereka orang kafir (non-muslim) baik-baik aja, coba kamu perhatikan kalau kamu naik motor kesini, kan banyak gereja tuh dan ga pernah kami usik jika mereka beribadah dengan tuhan mereka tuh, kalau ga percaya coba aja tanya sama pengurus gereja. Habib rizieq juga pernah sekolah yang dikelola sama gereja, sekolah Bethel namanya, tempatnya ga jauh dari sini koq.”<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Habib Ali Alatas (Ketua DPP Front Mahasiswa Islam), tanggal 17 Maret 2016

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahroji (Wakil Sekertaris DPP FPI ) 15 Maret 2016

“kalau hubungan ekonomi ga masalah, tapi hubungan hukum politik tunggu dulu, kalau hubungan politik menjaga kesetabilan pemerintahan kita bisa kerjasama, kalau dalam bidang hukum dalam menegakan hukum kita bisa kerja sama, tapi jadi masalah pemimpin mayoritas dari umat kafir minoritas itu haram ga bisa kita terima”<sup>61</sup>

Dari pernyataan narasumber di atas mengindikasikan bahwa FPI merupakan kelompok yang terbuka kepada kelompok keagamaan lain, mampu bertoleransi terhadap perbedaan agama dan mampu bekerja sama dengan kelompok keagamaan lain dibidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Tetapi disisi lain sebagai kelompok keagamaan memegang teguh prinsip keagamaan yang berkeinginan menciptakan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum sesuai dengan Syariat Islam. Berhubungan dengan politik, FPI mengambil sikap untuk menolak pemimpin atau kepala daerah yang mempunyai latar belakang dengan agama non-Islam. Begitu juga dengan Ahok yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini, FPI secara terang-terangan menolak dan tidak menganggap Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dikarenakan beliau tidak menganut agama Islam. Berikut pernyataan beberapa narasumber berkaitan dengan identitas Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta:

“Dia itu kafir (non-muslim), tau gak arti kafir itu apa? Kafir itu khianat, tidak jujur, tidak adil, apakah bisa orang kafir seperti itu pantas menjadi pemimpiin muslim? Ya ga mungkin pantaslah”<sup>62</sup>

“Untuk sampai saat ini kami masih menolak kepemimpinan pemerintah saat ini, karena apa? Karena jelas pemimpin Jakarta saat ini adalah non muslim. Kan dalam agama Islam sudah jelas untuk memilih pemimpin yang muslim sudah banyak ko dalilnya.”<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Habib Ali Alatas (Ketua DPP Front Mahasiswa Islam), tanggal 17 Maret 2016

<sup>62</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahroji (Wakil Sekertaris DPP FPI ) 15 Maret 2016

<sup>63</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Maman Suryadi (Panglima Nasional Laskar Pembela Islam), tanggal 3 Mei 2016

Selain itu melakukan penolakan Ahok sebagai pemimpin non-muslim yang bersumber dari identitas ini bagi mereka adalah sebuah kewajiban seorang muslim (jihad), berikut pernyataan yang disampaikan oleh narasumber:

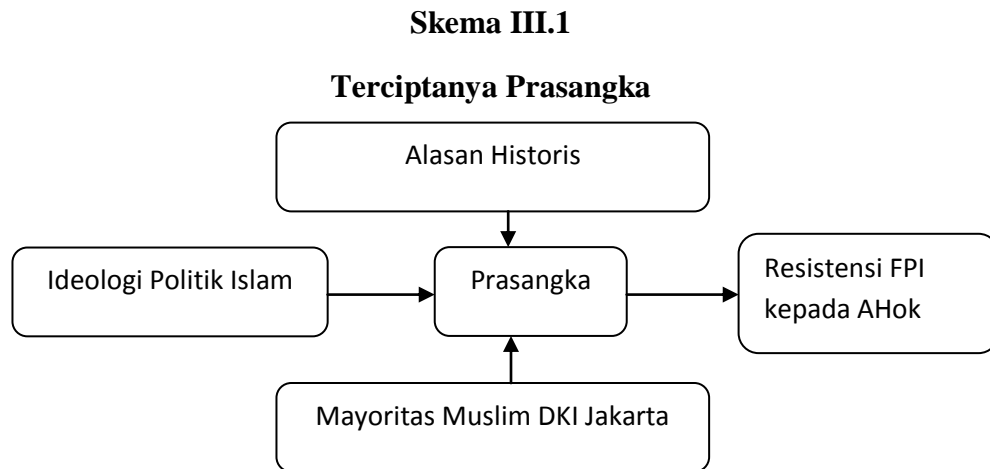
“Banyak orang bilang disosmed itu FPI jangan bawa-bawa agama, jangan fasis, jangan rasis. Umat Islam itu wajib eksklusif, penolakan umat Islam terhadap Ahok itu yang utama karena dia kafir, jangan ditutup-tutupin, itu akidah, terserah orang mau bilang apa dan itu syariat Islam dan itu dilindungi. Itu kan amar maruf”<sup>64</sup>

Bapak Syahrozi juga menambahkan bahwa, nahi munkarnya adalah cara FPI mencegah Ahok menjadi gubernur seperti yang dilakukan Habib Ali dan KH. Munarman untuk terlibat dalam urusan konfensi gubernur muslim. Menurut Bapak Syahrozi adalah sebuah kekeliruan jika mayoritas Islam di pimpin oleh minoritas.<sup>65</sup> Dalam pernyataan tersebut adanya tujuan dari ideologi politik Islam yang berkeinginan bahwa umat Islam wajib eksklusif dari kelompok agama mana pun. Maka dapat disimpulkan bahwa ideologi politik keagamaan mampu menjadi sebuah alat relasi antar kelompok keagamaan agar dapat hidup berdampingan tetapi disisi lain ideologi politik keagamaan menjadi sebuah sumber prasangka yang berujung kepada resistensi atau penolakan dalam mendapatkan jabatan strategis salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahroji (Wakil Sekertaris DPP FPI ) 15 Maret 2016

<sup>65</sup> *Ibid*



Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2016

### C. Penilaian Negatif FPI Terhadap Ahok

Setiap organisasi, kelompok, komunitas dan perorangan mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapat kepada sebuah pemerintahan sebagai upaya kontrol sosial. Pendapat-pendapat ini diperoleh dari apa yang mereka lihat dan mereka rasakan dari birokrasi pelaksanaan pemerintahan sebuah negara. Begitu juga dengan FPI yang selalu mengemukakan pendapat mereka terhadap birokrasi pemerintahan DKI Jakarta yang dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Basuki Tjahaja Purnama. Dalam isi pendapatnya, FPI mengemukakan pendapatnya kepada Gubernur DKI Jakarta saat ini yaitu Basuki Tjahaja Purnama dari segi aspek antara, sikap dan kepemimpinan sebagai kepala daerah. Penilaian FPI dari segi aspek sikap dan kepemimpinan menguatkan prasangka atas ideologi politik keagamaan FPI dan mendukung terjadinya resistensi FPI terhadap Ahok.

### C.1 Sikap Ahok Menjadi Fokus Oleh FPI

Sikap FPI terhadap Ahok secara umum dapat dikategorikan sebagai bentuk negatif. FPI memandang Ahok adalah figur pemimpin yang tidak adil dan memiliki perilaku buruk. FPI menekankan bahwa sikap negatif mereka terhadap Ahok bukan semata-mata didasari oleh perbedaan agama atau ras, melainkan lebih kepada perilaku Ahok yang dianggap buruk dan tidak pantas bagi seorang pemimpin. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Habib Ali, Ustadz Maman dan Habib Idrus, berikut pandangan mereka terhadap sikap Ahok:

“Itu orang mulutnya comberan apalagi koruptor sumber waras, itu fakta dan dia itu tidak berpihak kepada yang lemah rekaman ada di youtube, tapi kalau sama pengusaha nurut2 aja dia bukan lagi liberal tapi zalim”<sup>66</sup>

“Kalau mengenai sikap dan perilaku die mah kacau, mulutnya aja comberan dan mengeluarkan kata-kata yang tak berisi dan juga belagu, dia itu ga ngerti hukum tapi sok ngerti hukum.”<sup>67</sup>

“Perlu diinget Ahok ini bukan hanya masalah sara atau di kafir atau nggak, Ahok ini kita sama-sama tahu bahwa dia ini ga ada etika dan ga ada ahlak, pernyataan-pernyataannya ga pantas, dan juga kita liat sama-sama lah di Garut ada Bupati Aceng Fikri, dia bisa diturun sama DPRD gara-gara kawin lagi dan ngatain istri pertama itu dianggap melanggar undang-undang etika pejabat.”<sup>68</sup>

Habib Idrus menambahkan pandangannya tentang bagaimana perkataan-perkataan Ahok bahwa Ahok telah mencemooh kalau DPRD itu rampok, dan mengatakan kepada ormas Muhammadiyah “jangan sok munafik dapet upeti”, serta bagaimana Ahok mengatakan “Nabi sekalipun kalau ada tidak bisa mengatasi prostitusi”, dan menurut Habib Idrus bahwa perkataan Ahok sendiri yang meresahkan

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Habib Ali Alatas (Ketua DPP Front Mahasiswa Islam), tanggal 17 Maret 2016

<sup>67</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Maman Suryadi (Panglima Nasional Laskar Pembela Islam), tanggal 3 Mei 2016

<sup>68</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Habib Idrus (Ketua Lembaga Dakwah FPI) pada tanggal 11 Mei 2016

umat Islam.”<sup>69</sup> Dari beberapa penilaian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian atas sikap dan perilaku dilihat dari tutur kata yang pernah dilontarkan oleh Ahok. Tutur kata yang dilontarkan Ahok ini menurut FPI sudah melanggar etika pejabat karena telah menghina lembaga pemerintahan dan menghina tokoh *Founding Father* dalam penyebaran agama Islam yang sangat di Agungkan oleh umat-Nya. Selain itu Ahok dinilai menyebarkan isu negatif tentang DPRD dan Muhammadiyah. Disamping itu tidak sedikit pandangan negatif FPI terhadap sikap dan perilaku Ahok dalam hal ini FPI menyoroti sikap Ahok kepada kepada guru antara lain

“Ya *statement* dia sering kasar, dia waktu itu kumpulin guru di Monas, itu guru-guru dibentak di depan muridnya, dia bilang “lu lu semua harus ngikutin gw yee, sekarang gw Gubernurnya kalau nggak gw pecat-pecatin lu” apa pantas ngomong seperti itu. Lalu bagaimana Ahok itu ngomelin orang-orang miskin, walaupun orang miskin itu salah tapi dibentak-bentak apa pantas, mulutnya kasar apa pantas pejabat publik seperti itu”<sup>70</sup>

Disini Habib Idrus berpandangan bahwa ketika Ahok menjadi Gubernur, Ahok bersikap arogan sebagai pejabat dengan melakukan penegasan kekuasaan kepada para guru dan memberikan contoh yang tidak baik di depan murid-murid yang ikut serta pada upacara di Monas. Selain itu, Ahok sebagai kepala daerah dianggap melakukan tindakan yang berlebihan kepada masyarakat tidak mampu dengan cara membentakinya. Maka dapat disimpulkan bahwa FPI berpandangan bahwa Ahok sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum khususnya pelanggaran etika pejabat sebagai kepala daerah DKI Jakarta yang meresahkan masyarakat khususnya umat Islam.

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*

## C.2 Pandangan FPI Terhadap Kepemimpinan Ahok

Kepemimpinan adalah komoditas yang sangat dicari dan bernilai tinggi. Menurut Joseph C. Rost, kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya.<sup>71</sup> Pemimpin dan pengikut terhubung dengan erat, pemimpinlah yang sering kali memulai hubungan, menciptakan jalinan komunikasi dan memikul beban untuk mempertahankan hubungan. Pemimpin memiliki tanggung jawab etis untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah pengikut. Pemimpin dan pengikut harus dipahami dalam hubungannya satu sama lain dan secara kolektif. Kepemimpinan mencakup pengaruh dan pemimpin peduli dengan caranya mempengaruhi pengikutnya. Pemimpin menjadi pusat perhatian, dan segala sumber yang menentukan segala sesuatu dari kelompok tersebut. Oleh karena itu sering kali pusat perhatian kelompok akan tertuju kepada seorang pemimpin.

Begitu pula dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ini yang merupakan subjek atau tokoh yang memimpin berjalannya birokrasi di DKI Jakarta. Ahok pun menjadi pusat perhatian berjalannya birokrasi DKI Jakarta melalui sikap-sikapnya dan kebijakan-kebijakannya yang sedikit berbeda dengan gubernur sebelumnya dalam memimpin penduduk DKI Jakarta. Disisi lain FPI menjadi kelompok audiens yang melihat, mencermati dan merasakan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. FPI yang merupakan kontrol sosial bagi

---

<sup>71</sup> Ambar Teguh Sulistiani, *Kepemimpinan Profesional Pendekatan Leadership Games*, Yogyakarta: Gava Media, 2008. Hlm 13



pemerintahan daerah merasa tidak puas atas beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok lantaran mempengaruhi aktivitas FPI sebagai umat Islam antara lain seperti yang disampaikan oleh Habib Ali sebagai berikut:

“Kalau mempengaruhi ibadah umat Islam secara keseluruhan ya, kan FPI bagian dari umat Islam. Contohnya pelarangan pemotongan hewan kurban terus pelarangan tablig akbar di Monas sebagai lapangan tablig akbar. Kita ga pernah bergantung kepada pemerintah, tapi FPI sebagai bagian dari umat Islam ya ikut rugi juga dong.”<sup>72</sup>

“Kelebihannya ga ada, kekurangannya banyak karena dia itu tidak pantas memimpin umat Islam dalam Al-Quran disebutkan jangan memilih dari umat muslim, penduduk DKI Jakarta ada 10Jt masa dari sebanyak itu ga ada pemimpin muslim yang menghuni, kenapa mesti Ahok? apa hebatnya Ahok? sama aja kaya dulu dan korupsi bahkan dia itu dibandingkannya dulu Ahok ini biasanya aja, ga ada lebihnya.”<sup>73</sup>

Bagi FPI, Ahok pun tidak mempunyai kelebihan dalam memimpin DKI Jakarta yang ada hanyalah kekurangan dan dianggap gagal dalam mengeluarkan kebijakan selama memimpin karena dinilai menghambat praktik kegamaan ibadah umat Islam seperti pemotongan hewan kurban di halaman masjid dan menggunakan Monas (Monumen Nasional) sebagai arena dakwah Tablig Akbar. Selain itu Habib Ali meragukan kemampuan Ahok memimpin DKI Jakarta dengan mempertanyakan apakah memang benar tidak ada umat muslim di DKI Jakarta yang menghuni sebagai gubernur dan mempertanyakan kemampuan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu beberapa narasumber melengkapi kebijakan Ahok yang dianggap merugikan FPI sebagai umat Islam antara lain:

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Habib Ali Alatas (Ketua DPP Front Mahasiswa Islam), tanggal 17 Maret 2016

<sup>73</sup> *Ibid*

“Jadi perlu diketahui seperti ahok itu melarang menjual hewan kurban ditempat-tempat umum, bahkan sempet melarang menyembelih hewan kurban ditempat-tempat umum, jadi dia maunya menyembelih di RPH di cakung, ini apa ini kan udah adat dan syariat juga ibadah suatu umat muslimin walaupun dia berkedok menyangkal tapi kita ada buktinya dia mengeluarkan peraturan tersebut”,<sup>74</sup>

“Itu pemotongan Hewan kurban masa ga boleh dimasjid, secara kharfiah dalam Islam pasti potong henwan kurban di halaman masjid dong, masa pemotonngan hewan kurban mau di pusatkan di cakung semuanya ya ga mungkin menurut saya. Selain itu kami tidak diizinkan untuk menggunakan Monas sebagai tempat diadakan majelis ta’lim, oh dan ada satu lagi, umat Islam dilarang konvoi saat bulan ramadhan tepatnya menjelang malam idul fitri, itu ga boleh kata ahok.”<sup>75</sup>

Beberapa hal yang dijelaskan oleh beberapa narasumber tersebut adalah ekspresi kekecewaan mereka sebagai anggota FPI terhadap kebijakan Ahok yang dirasa merugikan umat Islam termasuk juga FPI. Ketidakpuasan FPI terhadap kepemimpinan Ahok dikarenakan kepala daerah sudah tidak lagi mengindahkan kultur yang sudah menjadi tradisi umat Islam seperti menggunakan Monas sebagai arena praktik keagamaan dan konvoi dalam rangka menjelang hari raya umat Islam (Idul Fitri). Bentrohnya kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dengan tradisi umat di Jakarta menjadi penyebab menyulutnya konflik dan inilah yang pada akhirnya menimbulkan penilaian negatif FPI terhadap Ahok bahwa Ahok adalah pemimpin yang buruk dan tidak pro terhadap rakyat khususnya umat Islam. Selain itu FPI sebagai kontrol sosial bagi birokrasi pemerintahan daerah juga menyoroti kinerja Ahok yang menyimpang dari konstitusi. Dugaan terlibat kasus korupsi pun tak luput dari sorotan FPI, salah satunya adalah kasus korupsi dana pembelian tanah RS Sumber Waras.

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan Habib Idrus (Ketua Lembaga Dakwah FPI) pada tanggal 11 Mei 2016

<sup>75</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Maman Suryadi (Panglima Nasional Laskar Pembela Islam), tanggal 3 Mei 2016

“Kalau sebagai Gubernur kan dia terjerat kasus RS Sumber Waras, ada ko buktinya dan buktinya ga main-main dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan juga ga hanya kasus sumber waras saja, di belitung kan dia juga kena kasus korupsi juga ada ko buktinya”<sup>76</sup>

Prasangka atas dugaan kasus korupsi yang melibatkan Ahok juga diperkuat oleh ceramah Habib Rizieq pada tanggal 3 April 2016

“sodara, kami juga diundang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPK telah memaparkan dihadapan Kiyai para ulama dan berani menjamin, bahwa data mereka ini bukan data fiktif, bukan data fitnah, bukan upaya mereka untuk memojokan Ahok, tapi apa adanya yaitu ada tiga kasus yang melibatkan Ahok yang nilainya merugikan negara sebesar Rp 1,8 Triliun sodara”<sup>77</sup>

Habib Rizieq juga menjelaskan lebih detail bahwa kasus yang paling mencolok dan kasus yang data-datanya sudah sangat kuat adalah kasus RS Sumber Waras serta mereka sudah buat laporan ke KPK untuk menanyakan bagaimana proses dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ahok kenapa berhenti. Habib Rizieq juga mengatakan bahwa empat dari lima komisioner KPK sudah setuju kalau Ahok untuk dijadikan tersangka, tapi ada satu pimpinan yang masih belum setuju sampai saat ini, karena itu mereka berencana akan datang ke KPK akan menemui seluruh komisioner KPK untuk minta konfirmasi untuk bertanya dan minta penjelasan kenapa kasus tersebut sampai hari ini tidak dilaksanakan sebagaimana harapan mereka semua.<sup>78</sup> Pada tanggal 4 April 2016 FPI bersama ormas Islam lainnya yang tergabung dalam konvensi Gubernur Muslim untuk Jakarta selanjutnya disingkat GMJ mendesak KPK

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Para Calon Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Pilihan Rakyat  
<https://www.youtube.com/watch?v=uU6DVgM5AuE> Hasil transkrip ceramah Habib Rizieq pada tanggal 3 April 2016 jam 10.30 WIB

<sup>78</sup> *Ibid*

untuk menangkap Ahok karena Gubernur DKI Jakarta tersebut melakukan tindak pidana kasus korupsi RS. Sumber Waras.<sup>79</sup>

Prasangka FPI bahwa Ahok melakukan tindak pidana korupsi juga diperkuat oleh data yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Walaupun sampai saat ini kasus korupsi dana pembelian tanah RS Sumber Waras masih ditangani oleh pihak berwajib yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, FPI tetap yakin bahwa Ahok pun terlibat dalam kasus korupsi RS Sumber Waras dan kasus-kasus lainnya yang dapat merugikan negara. Lalu kebijakan lainnya yang cukup disoroti adalah kebijakan Ahok yang menggusur Kalijodo yang awalnya adalah tempat hiburan malam dan berkembang menjadi sarang prostitusi lokal di atas tanah negara. Menurut FPI, penggusuran Kalijodo tidak sepenuhnya Ahok menyelesaikan masalah sosial yang ada ditempat tersebut, berikut pernyataan dari Habib Ali

“Dia gusur kalijodo bukan karena lokalisasi tapi dia menggusur karena jalur hijau, kalau seandainya tidak di jalur hijau apa bakal digusur? Padahal Ahok bilang sendiri dia yang paling mendukung lokalisasi di Jakarta. Padahal tidak kejahatan banyak di tempat lokalisasi contohnya mabuk-mabukan yang ujung-ujungnya kejadian kecelakaan, terus tauran, dan masih banyak lagi dah pokoknya”<sup>80</sup>

Dari pernyataan tersebut, FPI berpendapat bahwa Ahok adalah salah satu orang yang mendukung adanya lokalisasi prostitusi di DKI Jakarta, padahal kasus prostitusi adalah masalah sosial yang tidak kunjung selesai dan sangat berbahaya dalam aspek keagamaan, sosial, budaya dan kesehatan. Disisi lain FPI sebagai

---

<sup>79</sup>Dewi Fitri, *Alasan FPI Laporkan Ahok Ke KPK*, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/04/063759655/ini-alasan-fpi-laporkan-ahok-ke-kpk> di akses tanggal 3 April 2016

<sup>80</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan Habib Ali Alatas (Ketua DPP Front Mahasiswa Islam), tanggal 17 Maret 2016

kelompok keagamaan menentang adanya lokalisasi, karena bagi mereka lokalisasi merupakan tempatnya sarang tindak kejahatan. Ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara FPI sebagai ormas dengan birokrasi pemprov dalam masalah lokalisasi prostitusi. Selain mendukung prostitusi, FPI berpandangan bahwa Ahok ini lebih pro kepada konglomerat dari pada kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah berikut beberapa pernyataan dari Habib Ali dan Habib Idrus:

“Kebijakan ahok ini meresahkan umat Islam, contohnya reklamasi, dia gusur itu orang miskin walaupun dia dengan dalih dia sudah buat rumah susun, tapi perlu diingat itu rumah susunnya jauh, jauh dari apa? Karena masyarakat luar batang itu nelayan otomatis dia akan kehilangan ekonominya dong, yang kedua rumah susun itu nyewa ga bisa menjadi hak milik”<sup>81</sup>

“Masyarakat luar batang ini sudah ratusan tahun tinggal luar batang dan mengingatkan janji Jokowi bahwa dia akan mentatakotakan, maksudnya adalah bangunan liar akan digusur lalu dibangun lagi tempat tersebut, bukan diberikan ke konglomerat-konglomerat, reklamasi belum jadi dan izinnya belum jelas, tapi sudah diberitakan di cina, dengan alasan pengusuran itu karena penghijauan.”<sup>82</sup>

Lebih lanjut dengan tegas Habib Ali mengatakan FPI belum melihat program-program pada masa kepemimpinan Ahok yang berpihak kepada rakyat (pro rakyat), melainkan sebaliknya bahwa Ahok lebih berpihak kepada pengusaha-pengusaha. Hal tersebut dibuktikan oleh FPI melihat bahwa Ahok tidak pernah membuka pintu dialog kepada rakyat, melainkan hanya membuka pintu dialog kepada pengusaha-pengusaha.<sup>83</sup> Menurut FPI, reklamasi dianggap salah sasaran yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu para pengusaha atau pengembang dengan mengorbankan masyarakat menengah ke bawah yang tempat tinggalnya harus digusur

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan Habib Idrus (Ketua Lembaga Dakwah FPI) pada tanggal 11 Mei 2016

<sup>82</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan Habib Ali Alatas (Ketua DPP Front Mahasiswa Islam), tanggal 17 Maret 2016

<sup>83</sup> *Ibid*

untuk dijadikan bangunan untuk bagi masyarakat menengah ke atas. Selain kehilangan tempat tinggal akibat dari reklamasi, masyarakat yang tempat tinggalnya digusur ini juga kehilangan mata pencaharian karena tempat tinggal pengganti yang disediakan oleh pemprov DKI Jakarta, jaraknya cukup jauh dari tempat matapencaharian masyarakat setempat. Terlebih lagi perbedaan sikap Ahok yang menurut FPI ketika diajak berdialog dengan masyarakat kecil sangat tertutup sedangkan dengan pengusaha sangat terbuka. Hal-hal tersebutlah yang memperkuat argumen FPI bahwa Ahok adalah kepala daerah yang memihak para pengusaha daripada rakyat kecil. Disamping kebijakan-kebijakan yang Ahok keluarkan, FPI juga memperhatikan dukungan-dukungan yang mengalir kepada Ahok untuk melanjutkan kiprahnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada ceramah Habib Rizieq hari Minggu tanggal 3 April 2016 di pengajian bulanan FPI, beliau mengatakan:

“Kemudian Saudara, satu hal saja saya ingatkan untuk memompa kebersamaan kita, hati-hati yang mau kita lawan ini (Ahok) mempunyai dukungan finansial yang luar biasa, saya bisa katakan sepanjang lahir Mall-Mall di Indonesia sejak zaman Orde Baru dulu sodara, tidak ada satu Mall pun saudara yang mengizinkan lokasinya digunakan Kampanye Politik, calon dari partai politik manapun tidak pernah diizinkan. Tapi sekarang anda liat saudara, bagaimana Mall-mall tersebut dijadikan sebagai alat politik, dijadikan tempat kampanye politik Teman Ahok, artinya yang punya Mall tersebut dimana-mana mendukung daripada si calon yang mereka dukung saudara dan kita bisa bayangkan kalau yang punya Mall-Mall tersebut mendukung berarti uang mereka, kekayaan mereka, aset mereka itu mengalir untuk mendukung calon mereka tersebut (Ahok).”<sup>84</sup>

Menurut kacamata FPI, Ahok memiliki dukungan finansial yang cukup besar untuk melanjutkan kiprahnya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode yang akan datang dari para pengusaha-pengusaha (pemilik Mall). Dukungan-dukungan tersebut

---

<sup>84</sup> Para Calon Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Pilihan Rakyat  
<https://www.youtube.com/watch?v=uU6DVgM5AuE> Hasil transkrip ceramah Habib Rizieq pada tanggal 3 April 2016 jam 10.30 WIB

salah satunya adalah menyediakan tempat untuk mengumpulkan KTP dukungan kepada Ahok sebagai calon Gubernur Independen. Jika dikaitkan hal ini dengan kasus reklamasi, terlihat jelas bahwa ada relasi yang menguntungkan satu sama lain antara Ahok dengan pengusaha. Penilaian FPI terhadap profesi Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta bahwa kebijakan yang Ahok keluarkan sangat merugikan masyarakat khususnya umat Islam dan masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan Ahok mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kultur agama Islam dan bertentangan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.

#### **D. Konsensus Penolakan FPI Terhadap Ahok (Gerakan Memilih Gubernur Muslim)**

Untuk mencapai tujuan yang FPI harapkan diperlukan perumusan sebuah strategi yang strategis agar semua yang mereka lakukan tidak berlawanan dengan segala macam hukum dan aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghindari kontroversi yang berujung pada sebuah konflik, meski konflik tidak bisa dihilangkan dalam dinamika kehidupan masyarakat yang selalu dinamis. Dalam kasus ini, tujuan FPI adalah menjatuhkan Ahok dari jabatannya sebagai kepala daerah dan menghambat Ahok untuk terpilih lagi menjadi kepala daerah pada periode mendatang dikarenakan menurut sudut pandang FPI bahwa Ahok sebagai kepala daerah yang mengecewakan masyarakat DKI Jakarta.

Maka strategi yang terencana dengan baik sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang FPI inginkan. Strategi tersebut diaktualisasikan dalam bentuk program

kerja yang nantinya akan dilaksanakan oleh aktor-aktor yang terlibat. Di dalam strategi ada rencana dan ada tindakan, begitu juga dengan FPI dalam penolakan Ahok untuk menjadi pemimpin selanjutnya, FPI menggunakan lembaga-lembaga pemerintahan dalam rencana perlawanan kepada Ahok, berikut Habib Ali memberikan pernyataan :

“Cara kami yang penting konstitusional, kita ga mau melanggar hukum dan main hakim sendiri. Kalau masyarakat bilang kita main hakim sendiri itu salah kaprah. Kalau kita main hakim sendiri kita udah transit di balai kota. Kita pake jalur konstitusional, kita demo, kita aksi turun kejalan menyampaikan bahwa memilih gubernur muslim itu hak beragama kitalah selama intinya tidak melanggar hukum itu aja, apapun metodenya kita tempuh. Kita demo kita aksi yang terakhir kali kita ke KPK untuk supaya menangkap Ahok, lalu kita ke DPRD. Intinya apa yang kita lakukan tidak melanggar hukum”,<sup>85</sup>

Penjelasan tentang upaya-upaya konstitusional sebagai wujud aktualisasi prasangka juga diperkuat oleh ceramah Habib Rizieq pada tanggal 3 April 2016:

“Bahwa sejak Ahok menjadi gubernur, kami dari GMJ selalu melakukan upaya-upaya konstitusional untuk memperkarakan Ahok sesuai dengan prosedur, baik undang-undang etika pejabat, undang-undang pengolahan daripada dana yang ada dalam APBD dan sebagainya sodara, ini semua sudah diperjuangkan sejak awal dan Alhamdulillah perjuangan kita membuahkan hasil sampai DPRD menggelar hak angket dan putusan hak angket adalah dinyatakan bahwa Ahok terbukti bersalah melanggar sejumlah perundang-undangan dan dalam putusan angket diputuskan bahwa DPRD memrekomendasikan untuk menggelar sidang paripurna hak menyampaikan pendapat dimana setiap anggota DPRD untuk menyampaikan pendapatnya apakah Ahok lengser atau tidak lengser, tapi sayang sejuta sayang sampai hari ini saudara sidang Hak menyatakan pendapat belum digelar oleh DPRD, nah maka itu sodara kami dari GMJ sepakat akan datang ke DPRD untuk mendorong mereka melanjutkan langkah konstitusional dari putusan hak angket yang menyatakan bahwa Ahok telah terbukti bersalah supaya digelar sidang paripurna untuk hak menyampaikan pendapat”,<sup>86</sup>

Beberapa hal yang telah disampaikan di atas bahwa sebagai tindak lanjut atas ketiadahpuasannya kepemimpinan Ahok mereka menjalankan upaya-upaya

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Habib Ali Alatas (Ketua DPP Front Mahasiswa Islam), tanggal 17 Maret 2016

<sup>86</sup> Para Calon Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Pilihan Rakyat  
<https://www.youtube.com/watch?v=uU6DVgM5AuE> Hasil transkrip ceramah Habib Rizieq pada tanggal 3 April 2016 jam 10.30 WIB



konstitusional agar tidak melanggar hukum mulai dari melaporkan pelanggaran etika pejabat ke DPRD DKI Jakarta yang dimotori oleh terbentuknya konvensi Gubernur Muslim untuk Jakarta selanjutnya disingkat GMJ. Tetapi kekecewaan mereka bertambah dikarenakan tidak ada tindak lanjut dari KPK dan DPRD untuk menggelar hak menyatakan pendapat. Maka dalam menanggapi sikap KPK dan DPRD yang tidak menggelar hak menyatakan pendapat, FPI dan kelompok keagamaan lainnya datang kembali ke KPK dan DPRD untuk bertanya kepada para pimpinan intitusi Negara tersebut mengapa Ahok belum ditangkap karena dianggap melanggar sejumlah undang-undang pada tanggal 4 April 2016. Selain menggunakan lembaga pemerintahan untuk menjatuhkan Ahok, FPI bersama kelompok keagamaan Islam lainnya membentuk sebuah konvensi untuk berkompetisi dalam Pemilukada tahun 2017, berikut penjelasannya Habib Ali :

“Nah kita duduk disini daripada memilih Ahok lagi, kita sering bilang Ahok itu haram tapi kita ngasih solusi kita bikin muzakarah ulama, ini umat Islam berembuk termasuk FPI, FBR dan juga ada dari NU, muhammadiyah dan tokoh ulama besar di DKI Jakarta berembuk supaya bagaimana caranya jangan bilang haram-haram tapi ga ngasih solusi, dan solusi ini kita upaya untuk menjaring Gubernur Muslim yang berpihak kepada masyarakat DKI Jakarta tapi tetap berpegangan dengan syariat Islam dan nilai-nilai Islam. Kita pilih muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah supaya Allah turunkan keberkahan ke bumi dan umatnya. Jadi jangan takut miskin kalau gubernurnya muslim, karena kalau gubernurnya muslim pasti diajak masyarakatnya beriman dan bertaqwa. Pasti ekonominya membaik. Punya pemimpin kafir itu rugi ga bakal dapat pahala, memilih Gubernur muslim ada pahalanya.”<sup>87</sup>

“Ya kita bergabung berembuk dengan ulama. Nanti mereka yang menentukan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung umat Islam. FPI wajib manut dengan keputusan ini. Lalu apa yang kita angkat, “haram memilih gubernur kafir wajib memilih gubernur muslim dengan cara mengikuti fatwa ulama.”<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Habib Ali Alatas (Ketua DPP Front Mahasiswa Islam), tanggal 17 Maret 2016

<sup>88</sup> *Ibid*

Melengkapi Habib Ali, Habib Idrus mengatakan bahwa GMJ pada awalnya merupakan sebuah gerakan dilandasi oleh kesadaran para Ulama, Habaib dan Kiyai bahwa Jakarta ini harus dipimpin oleh gubernur muslim. Hal tersebut dikarenakan pemilihan kepala daerah itu harus proposional dan disesuaikan dengan latar belakang identitas agama mayoritas masyarakat setempat.<sup>89</sup> Selain itu ada alasan lain terbentuknya konvensi GMJ, Habib Idrus menjelaskan dengan tegas bahwa Jakarta ini harus dipimpin oleh pilihan Ulama dengan kriteria yang jujur, amanah dan syariah.<sup>90</sup> Selain itu GMJ ini juga dijadikan contoh bagi provinsi lain yang memiliki umat Islam mayoritas. Upaya-upaya yang dilakukan ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti ulama yang sangat dihormati oleh masyarakat DKI Jakarta khususnya umat muslim. Habib Idrus menjelaskan alasan melibatkan Ulama dalam konvensi Gubernur Muslim untuk Jakarta (GMJ):

“Karna ulama ini kan panutan umat, dan ulama ini dalam politik Islam ada Ahlul hal Wal Aged, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu untuk berjihad, jadi ulama inikan patutan umat, tentunya suaranya ini akan didengarkan umat begitu, dan antum harus tau juga di GMJ itu ga cuma ada GMJ doang, tapi ada politisinya, ada ekonomnya, ada seorang ahli hukumnya yang tentunya sejalan dengan visi misi ulama.”<sup>91</sup>

Dari cerita yang disampaikan oleh Habib Idrus, melibatkan Ulama dalam konvensi GMJ ini mengadopsi tradisi umat Islam pasca zaman kenabian dalam mencari atau menjaring seorang pemimpin, karena Ulama adalah seorang tokoh panutan setelah zaman kenabian. Selain Ulama, terdapat pula para politisi, ekonom dan praktisi hukum yang ahli dibidangnya masing-masing. Konvensi GMJ ini

---

<sup>89</sup> Transkrip Hasil wawancara peneliti dengan Habib Idrus (Ketua Lembaga Dakwah FPI) pada tanggal 11 Mei 2016

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid*

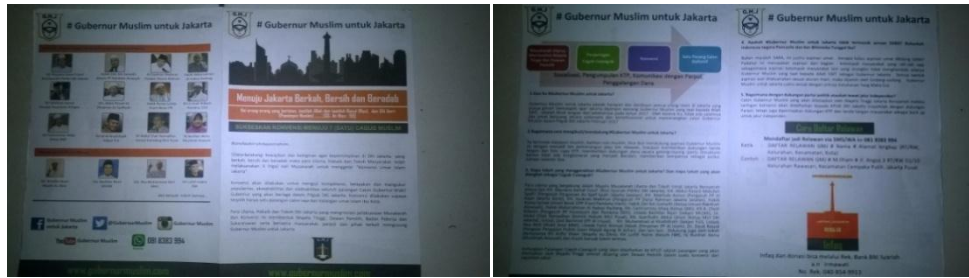
menjadi salah satu arena partisipasi politik kelompok keagamaan Islam termasuk FPI ada di dalamnya dan secara tidak langsung menjadi kompetitor dalam Pemilu pada yang akan datang di DKI Jakarta sebagai penantang Ahok dan secara tidak langsung, FPI dan kelompok keagamaan Islam lainnya yang tergabung ke dalam GMJ berkeinginan untuk mengembalikan politik Islam pada kejayaannya, seperti halnya tujuan kelompok keagamaan fundamentalis dimana sebuah kelompok keagamaan Islam menggunakan Ideologi Islam (Syariat Islam) sebagai dasar negara.

#### **E. Bentuk-Bentuk Sosialisasi Penolakan FPI Terhadap Ahok**

Sosialisasi merupakan sebuah memberikan sebuah proses penanaman gagasan atau transfer pengetahuan yang dimiliki oleh individu kepada individu lainnya dalam mencapai tujuan dan dalam mencapai tujuan tersebut juga membutuhkan dukungan massa. Sosialisasi sebuah tujuan juga memerlukan alat untuk mensosialisasikan tujuannya tersebut dan alat digunakan untuk mengkampanyekan tujuannya agar mendapatkan dukungan massa yang cukup banyak, begitu juga FPI yang tergabung dalam konvensi GMJ mensosialisasikan tujuannya kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat DKI Jakarta yang beragama Islam melalui berbagai macam alat media massa brosur, poster, koran dan media online lainnya sebagai berikut.

**Gambar III.1**

**Alat-alat FPI mensosialisasikan Gubernur Muslim untuk Jakarta**



**Sumber: Arsip GMJ, 2016**

Selain melalui brosur, poster dan koran, cara mensosialisasikan penolakan Ahok adalah melalui posko-posko GMJ dengan cara mempromosikan calon gubernur muslim, dan nantinya posko-posko ini akan menjadi arena sosialisasi kepada masyarakat seperti apa gubernur muslim yang dipilih oleh para Habaib, Kiyai maupun Ulama. Berikut pernyataan dari nara sumber mengenai cara mensosialisasikan GMJ tersebut

“Strategi banyak kita sudah lakukan, kita bentuk posko-posko untuk pemenangan GMJ dan memeberikan pemahaman, jangan kita tertipu dengan pemimpin yang diwacanakan media seolah-olah lebih baik, padahal banyak yang baik (seorang Muslim), jangan tertipu dengan opini publik, rencana kita kedepan kita FPI akan rebut Jakarta denagn pemimpin Muslim”<sup>92</sup>

Pada brosur seperti pada gambar 6 dijelaskan siapa saja tokoh Habaib, Ulama, Kiyai dan beberapa imam besar kelompok keagamaan Islam yang tergabung di dalam GMJ. Selain itu, di dalam brosur tersebut juga dijelaskan bagaimana proses para tokoh agama mencari dan menjaring kadidat yang berkualitas serta sesuai dengan kriteria para tokoh agama. Selain membuat posko, FPI melakukan sosialisasi

<sup>92</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Maman Suryadi (Panglima Nasional Laskar Pembela Islam), tanggal 3 Mei 2016

untuk menambah dukungan dan partisipasi ke dalam GMJ dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut:

“Disini umat Islam marak nih majelis talim, pesantren di pinggir-pinggir kota Jakarta. Kita memaksimal mereka kita masuk ke majelis taklim, tablig akbar, pesanteren-pesantren, dan deketin tokohnya. Itu modal umat Islam yang selama ini digunakan partai politik untuk mendulang suaranya.”<sup>93</sup>

Dalam mensosialisasikan Gubernur Muslim, FPI dengan memaksimalkan jumlah arena pendidikan praktek keagamaan seperti tablig akbar dan pesantren untuk berpartisipasi di dalam konvensi GMJ dengan cara menyamakan pendapat dengan tokoh-tokoh keagamaan lainnya. Selain tokoh-tokoh keagamaan Islam, FPI juga mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi ke dalam GMJ seperti yang disampaikan oleh Habib Idrus antara lain:

“Pertama GMJ ini tidak ada unsur dukung sana dukung sini walaupun banyak ibarat kata banyak calon Gubernur yang merapat GMJ nanti kita saring tetapi bukan untuk menciptakan kompetitor tapi bagaimana kita menjaring yang terbaik diantara mereka (bakal calon Gubernur Muslim), itu memberikan pelajaran bahwasannya kita itu kaga ada main duit, kite ikhlas dukung. Buktinya kita bikin posko-posko rakyat Gubernur Muslim disetiap kelurahan kita mintain KTP-KTP, untuk kita serahkan kepada para habaib para ulama yang harus diserahkan kepada calon terbaik yang ulama dukung, pendidikan buat masyarakatnya apa? Kita ga main duit. Bahwasannya kita mencari sosok pemimpin yang diyaknin sesuai dengan para Habaib, para Kiyai, para Alim Ulama yang mereka tentunya mengangkat pemimpin itu yang jujur yang baik, yang deket dengan agama, karena tujuan GMJ itu adalah mengawal Jakarta Bersyariah, kriteria pemimpin kami adalah Muslim, jujur, adil, kebijakannya tidak bertentang dengan syariat Islam.”<sup>94</sup>

Sosialisasi yang dilakukan oleh FPI dalam memperoleh dukungan agar GMJ ini dapat diterima kepada masyarakat luas, mereka menjaring tokoh-tokoh terkenal dan berkompeten untuk memimpin Jakarta di Pilgub yang akan datang dengan syarat utama adalah beragama Islam. Hal tersebut dikarenakan bahwa jumlah penduduk

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Habib Ali Alatas (Ketua DPP Front Mahasiswa Islam)

<sup>94</sup> Transkrip Hasil wawancara peneliti dengan Habib Idrus (Ketua Lembaga Dakwah FPI) pada tanggal 11 Mei 2016

DKI Jakarta beragama Islam adalah mayoritas atau dominan. Tetapi disisi lain, sosialisasi ini secara tidak langsung melakukan pembatasan atau perilaku diskriminatif kepada individu yang mengakibatkan seseorang yang beragama selain Islam dan jumlahnya minoritas di Jakarta tidak bisa mendapatkan jabatan strategis seperti kepada daerah.

### Gambar III.2

#### Spanduk Posko dan Daftar Nama Calon Gubernur Yang diusung oleh GMJ



Sumber: Arsip GMJ, 2016

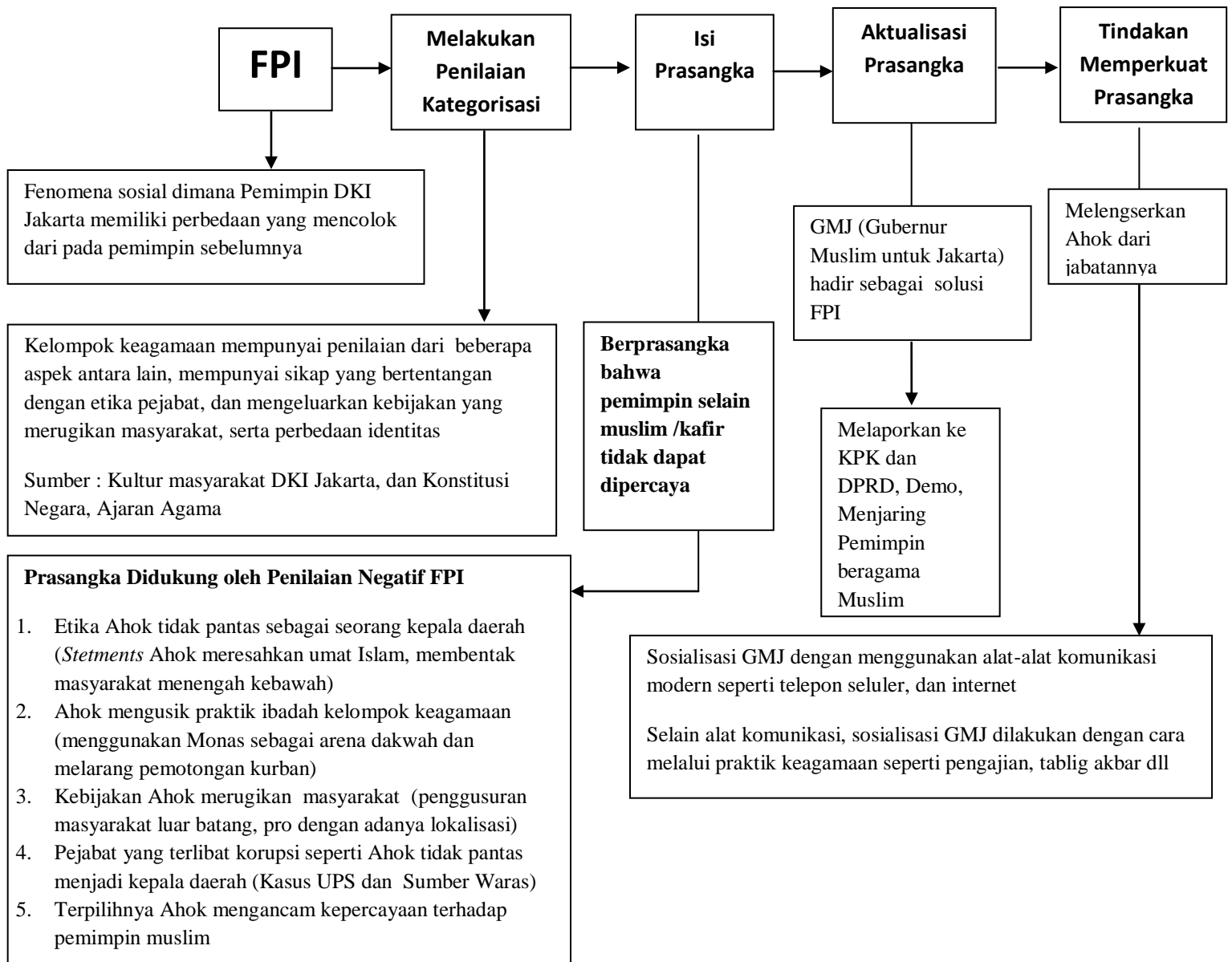
## F. Penutup

Pada bab ini dijelaskan adanya relasi yang tidak harmonis antara FPI dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Relasi yang tidak harmoni ini dikarenakan adanya fenomena terpilihnya pemimpin yang menganut agama Kristiani. Bagi FPI hal ini secara tidak langsung identitas pemimpin DKI Jakarta berbeda dengan masyarakat DKI Jakarta yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Tentunya FPI sebagai kelompok keagamaan yang menggunakan Syariat Islam sebagai dasar kelompok menginginkan pemimpin

beragama Islam sesuai dengan mayoritas masyarakat DKI Jakarta. Ketidaksesuaian agama yang dianut pemimpin DKI Jakarta dengan mayoritas penduduk DKI Jakarta menyulut konflik yang berujung kepada resistensi FPI terhadap Ahok. Selain dari paham agama, sumber prasangka muncul dikarenakan perilaku Ahok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma kultur masyarakat DKI Jakarta, serta prasangka muncul dari profesi Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menurut penilaian FPI kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok tidak tepat sasaran dan hanya sebagian pihak yang diuntungkan.

Dari semua sumber prasangka dan prasangka mereka kepada Ahok, mereka aktualisasikan prasangka ke dalam sebuah forum yang berisikan tokoh-tokoh keagamaan dan kelompok-kelompok keagamaan yang mempunyai tujuan yang sama untuk menengserkan Ahok dari posisinya sebagai Gubernur dengan cara konstitusional, antara lain melaporkan ke KPK, dan DPRD DKI Jakarta. Selain itu untuk menghambat Ahok maju menjadi Gubernur selanjutnya, forum agama yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan FPI ini ikut berpartisipasi dalam GMJ dengan cara mencari calon yang sesuai dengan keinginan para tokoh-tokoh keagamaan dan kelompok keagamaan agar kebijakan yang diambil oleh pemimpin DKI Jakarta selanjutnya tidak bertentangan dengan syariat keagamaan Islam.

**Skema III.2**  
**Kerangka Kerja Penelitian**



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2016



## **BAB IV**

### **DINAMIKA PRASANGKA FPI TERHADAP GUBERNUR**

#### **DKI JAKARTA**

##### **A. Pengantar**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan proses terciptanya prasangka FPI terhadap Gubernur DKI Jakarta. Bab tersebut menjelaskan bentuk-bentuk prasangka dari, sikap kepemimpinan, kebijakan kepemimpinan serta di dukung oleh perbedaan identitas. Munculnya konsensus atau kesepakatan kelompok keagamaan Islam yang mempunyai tujuan yang sama yaitu menjatuhkan Ahok dari posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menghambat Ahok agar gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode yang akan datang ditandai dengan munculnya konvensi Gubernur Muslim untuk Jakarta. Untuk mengaktualisasi prasangka-prasangka tersebut konvensi Gubernur Muslim untuk Jakarta berupaya melakukan upaya-upaya konstitusional agar tidak melanggar hukum antara lain turun aksi, melaporkan Ahok ke DPRD dan KPK serta melakukan penjaring bakal calon gubernur (BACAGUB) yang sesuai dengan keinginan cendekiawan muslim.

Maka di bab selanjutnya ini akan mendeskripsikan dinamika dari prasangka FPI kepada kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan menjelaskan tanggapan Ahok menghadapi prasangka tersebut. Selain itu pada bab ini juga

menjelaskan problematika prasangka FPI yang di tujukan kepada Ahok melalau konsep Prasangka Gordon Alport, Jones, Zastrow dan Robert K. Merton. Bab ini akan mengupas mengenai prasangka sertai kaitan diantara keduanya antara FPI dan Ahok.

## **B. Problematika FPI dengan Ahok**

Jakarta memiliki banyak kelompok sosial mulai dari kelompok yang dikelola oleh pemerintahan formal maupun yang dikelola secara swadaya. Kelompok-kelompok sosial tersebut memiki sudut pandang masing-masing dalam menghadapi masalah sosial yang dikonstruksi secara sosial maupun tindakan-tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Sangat lumrah apabila suatu hubungan antar kelompok memiliki steriotipe dalam bentuk prasangka terhadap kelompok lainnya.

Prasangka (*prejudice*) adalah praduga berupa penilaian negatif mengenai suatu kelompok dan setiap individu dari anggotanya. Gordon Allport menulis konsep prasangka dalam bukunya, *The Nature of Prejudice* bahwa prasangka adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah atau generalisasi yang luwes.<sup>95</sup> Johnson mengatakan, prasangka adalah sikap positif atau negatif berdasarkan keyakinan stereotip kita tentang anggota dari kelompok tertentu. Seperti halnya sikap, prasangka meliputi keyakinan untuk menggambarkan jenis perbedaan terhadap orang lain sesuai dengan peringkat nilai yang kita berikan. Menurut Jones, prasangka adalah sikap antipati yang berlandaskan pada cara menggeneralisir yang salah dan tidak fleksibel. Hal tersebut dikarenakan prasangka merupakan sikap negatif yang diarahkan kepada

---

<sup>95</sup> Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik Komunitas Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara , 2005. Hlm 199

seseorang atas dasar perbandingan dengan kelompok sendiri. Effendi, sebagaimana dikutip Liliweri mengemukakan bahwa prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan berat bagi komunikasi, karena orang-orang berprasangka belum apa-apa sudah curiga dan menentang komunikator yang melancarkan komunikasi. Dalam prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar kecurigaan, tanpa menggunakan pikiran dan pandangan kita terhadap fakta yang nyata<sup>96</sup>

Zastrow mengemukakan bahwa prasangka bersumber antara lain dari (1) proyeksi maksudnya adalah upaya mempertahankan ciri kelompok secara berlebihan; (2) frustrasi, agresi, kekecewaan yang mengarah kepada sikap pertentangan; (3) ketidaksamaan dan kerendahan hati; (4) kesewenang-wenangan; (5) alasan historis; (6) persaingan yang tidak sehat dan menjurus ke eksploitasi; (7) cara-cara sosialisasi yang berlebihan; (8) cara memandang kelompok lain dengan pandangan sinis.<sup>97</sup>

Begitu pun dengan keberadaan FPI di Jakarta, sebagai representatif masyarakat DKI Jakarta yang mayoritas beragama Islam memberikan pernyataan pendapatnya terhadap Gubernur DKI Jakarta saat ini yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok berdasarkan tiga hal antara lain identitas, sikap kepemimpinan, dan kebijakan kepemimpinannya. Pertama adalah prasangka berdasarkan identitas, dengan bernada tinggi Bapak Syahroji menyatakan pendapatnya bahwa

“Dia itu kafir (non-muslim), tau gak arti kafir itu apa? Kafir itu khianat, tidak jujur, tidak adil, apakah bisa orang kafir seperti itu pantas menjadi pemimpiin muslim? Ya ga mungkin pantaslah”<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.* Hlm 200

<sup>97</sup> *Ibid.* Hlm 204

<sup>98</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahroji (Wakil Sekertaris DPP FPI ) 15 Maret 2016

Lebih lanjut Habib Ali mengemukakan pendapatnya tentang hubungan FPI dengan kelompok keagamaan non muslim bahwa FPI mempunyai hubungan baik dengan kelompok agama apapun dalam bidang ekonomi, hukum dan menjaga kestabilan pemerintahan, tetapi ada pengecualian dalam bidang politik jika pemimpin penduduk mayoritas adalah dari kaum minoritas (non-muslim) bagi FPI itu haram dan tidak bisa diterima.<sup>99</sup> Habib Ali melanjutkan pendapatnya dengan tegas tentang Ahok bahwasannya Ahok ini belum memiliki program prorakyat dicontohkan dengan kebijakan Ahok yang sering menggusur-gusur rumah rakyat sehingga rakyat menjadi gelandangan, dan melainkan sebaliknya Ahok dianggap sebagai pemimpin yang pro dengan konglomerat dibuktikan oleh Ahok yang lebih sering membuka pintu dialog bersama konglomerat dibandingkan rakyat-rakyat kecil.<sup>100</sup> Pendapat lain disampaikan oleh Habib Idrus, Habib Idrus lebih memfokuskan kepada sikap kepemimpinan Ahok yang dinilai tidak pantas sebagai gubernur. Berikut pernyataan beliau

“Perlu diingat Ahok ini bukan hanya masalah sara atau di kafir atau nggak, Ahok ini kita sama-sama tahu bahwa dia ini ga ada etika dan ga ada ahlak, pernyataan-pernyataannya ga pantas, dan juga kita liat sama-sama lah di Garut ada Bupati Aceng Fikri, dia bisa diturun sama DPRD gara-gara kawin lagi dan ngatain istri pertama itu dianggap melanggar undang-undang etika pejabat.”<sup>101</sup>

Pada ranah eksternalisasi Berger dapat dilihat dari kutipan diatas, dapat terlihat bagaimana prasangka muncul dari dalam diri FPI sebagai reaksi dari perubahan sosial yang belum dapat diterima oleh kelompok keagamaan Islam bahwa

---

<sup>99</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Habib Ali Alatas (Ketua DPP Front Mahasiswa Islam), tanggal 17 Maret 2016

<sup>100</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Habib Ali Alatas (Ketua DPP Front Mahasiswa Islam), tanggal 17 Maret 2016

<sup>101</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Habib Idrus (Ketua Lembaga Dakwah FPI) pada tanggal 11 Mei 2016

pemimpin atau kepala daerah setempat beridentitas minoritas. Dengan memandang rendah penganut agama lain selain Islam, sikap antipati yang dinyatakan oleh Jones muncul oleh FPI, bahwa FPI memandang rendah agama lain dan menganggap bahwa agama Islam harus eksklusif serta harus dihormati eksistensinya karena apapun yang mereka lakukan (penolakan kepada Ahok) semata-mata menjalani Ibadah *Amar ma'ruf nahi munkar* dengan gerakan Jihad.

Setelah dianggap rendah, sikap kecurigaan yang dinyatakan oleh Effendi muncul. Kecurigaan dan ketidakpercayaan akan pemimpin dari kaum minoritas didukung oleh kebijakan-kebijakan yang menurut mereka bertentangan dengan harapan masyarakat antara lain terjadinya penggusuran-penggusuran masyarakat yang menggunakan ruang terbuka hijau sebagai tempat tinggal. Selain itu kebijakan Ahok dinilai menghambat praktek-praktek kelompok keagamaan Islam antara lain pelarangan menggunakan Monas sebagai tempat dakwah massal serta pelarangan pemotongan hewan kurban di halaman masjid. Ketidakpercayaan tersebut juga didukung dengan sikap-sikap yang dilakukan Ahok dianggap tidak beretika dan berakhlak contohnya seperti berbicara kasar dan tidak sopan selayaknya pejabat pemerintahan, mencemooh insititusi lain yaitu DPRD dan Muhammadiyah. Selain itu, ketidakpercayaan atas kepemimpinan Ahok saat ini juga disebabkan oleh dugaan keterlibatan Ahok dalam beberapa kasus-kasus korupsi mulai dari kasus pembelian UPS hingga kasus keterlibatan dalam pembelian tanah RS Sumber Waras. Hal-hal tersebut memaksa emosi menarik kesimpulan FPI bahwa Ahok juga tidak pantas menjadi kepala daerah dikarenakan sikap, kepemimpinan dan kasus-kasus yang membelitnya.

Zastrow menyatakan bahwa prasangka bersumber dari upaya mempertahankan ciri kelompok secara berlebihan dan rasa frustrasi, agresi, kekecewaan yang mengarah kepada sikap pertentangan. Begitu juga FPI, mereka menempatkan dirinya sebagai ormas Islam yang mempunyai visi dan misi mengembalikan kejayaan Islam dari keterancaman ketidakpercayaan masyarakat penduduk DKI Jakarta terhadap kualitas pemimpin bergama Islam. Selain rasa kekecewaan, alasan historis yang dikemukakan oleh Zastrow juga sebagai sumber prasangka FPI. Hal tersebut dideskripsikan oleh Habib Ali dengan tegas sebagai berikut

“Jadi DKI Jakarta itu penduduknya mayoritas Islam, sejarahnya erat dengan Islam karena pendiri Jakarta yaitu Fatahillah yaitu Ulama Islam yang berusaha merebut Sunda Kelapa dari tangan orang penjajah kafir, ikatan Islam di Jakarta sangat prinsipil, di Jakarta umat Islam 80% berarti ada hak-hak yang harus dimiliki oleh umat Islam contohnya beribadah. Walaupun Jakarta ini tempat bermacam berkumpulnya suku agama ras, ini daerah mayoritas Umat Islam haruslah dan alangkah baiknya segala hukum, aturan, segala tindak tanduk pemerintahan ini minimal tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>102</sup>

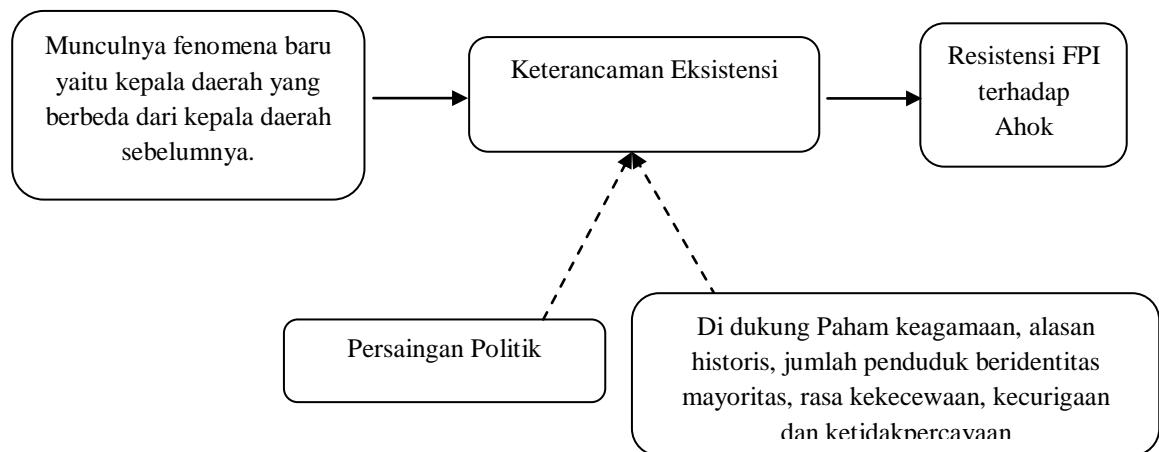
Menurut Habib Ali, kontribusi Ulama pada masa kolonial dalam mengusir penjajahan di Jakarta, seharusnya menjadi bahan pertimbangannya untuk mengesklusifkan hak-hak masyarakat muslim dalam sistem pemerintahan DKI Jakarta. Selain kontribusi Ulama pada masa kolonial mengusir penjajah, menurut Habib Ali jumlah penduduk mayoritas juga harus dihormati karena 80% masyarakat DKI Jakarta adalah muslim dan keinginan memiliki pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam seharusnya bisa dipenuhi oleh pemerintahan pusat. Beliau merasa pada masa kepemimpinan Ahok, hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat muslim ini dikurangi sehingga muncul resistensi. Hal yang sama

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Habib Ali Alatas (Ketua DPP Front Mahasiswa Islam), tanggal 17 Maret 2016

juga disampaikan oleh pakar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia yaitu Prof. Hamdi Muluk. Beliau menyampaikan bahwa prasangka lahir ketika seseorang atau kelompok merasa mendapatkan ancaman terhadap eksistensi pribadi maupun kelompok yang dimilikinya, karena persaingan politik<sup>103</sup>.

#### Skema IV.1 Tahapan Munculnya Terjadinya Resistensi



Sumber : Analisis peneliti, 2016

Selain itu prasangka muncul atas rasa kegelisahan dan kekecewaan FPI terhadap sikap kepemimpinan Ahok yang dianggap sangat meresahkan serta kebijakan-kebijakan Ahok yang dianggap merugikan masyarakat DKI Jakarta khususnya Umat Islam. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pakar Sosiologi Politik yaitu Bapak Ubaidillah Badrun, beliau mengatakan bahwa :

“FPI adalah kelompok rasional subjektif, kemarin mereka betindak besar-besaran itu akibat akumulasi kasus-kasus yang belum selesai dihadapi pak Ahok seperti kasus RS. Sumber Waras, UPS, dan Reklamasi.Puncaknya adalah ketika Ahok menyinggung surat Almaidah itu kemarin”<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Prof Hamdi Muluk tanggal 10 April 2016 (melalui Email)

<sup>104</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Pakar Sosiologi Politik Ubaidillah Badrun pada tanggal 12 Oktober 2016

Pada akhirnya terjadilah resistensi dari FPI dalam bentuk sikap dan pernyataan yang menunjukkan tidak suka terhadap Ahok, terlebih lagi seperti yang dikatakan oleh Bapak Ubaidillah Badrun bahwa masih cukup banyak beberapa kasus melibatkan Gubernur DKI Jakarta saat ini Basuki Tjahaja Purnama yang belum terselesaikan. Pada ranah eksternalisasi ini, penilaian-penilaian negatif yang mengakibatkan munculnya prasangka kepada Ahok tersebut berupa ketidakpercayaan dan rasa curiga merupakan sebuah pencurahan atau ekspresi diri ormas FPI sebagai kelompok sosial berupa sikap penolakan terhadap fenomena sosial baru. FPI sebagai representatif masyarakat yang mengerti bahwa dunia sosial yang mereka rasakan dan perhatikan mengalami masalah sosial dan oleh sebab itu FPI merasa bahwa kelompoknya bisa menawarkan solusi mengatasi masalah sosial tersebut melalui peranan-peranannya telah dilakukan saat ini.

Prasangka FPI pada kasus ini merupakan sebuah pengetahuan yang dikonstruksi melalui penilaian, pengamatan dan pemaknaan para elit FPI terhadap kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama sebagai kepala daerah. Hasil penilaian dan pengamatan tersebut yang diproduksi oleh elit FPI mampu mengendalikan dan mengontrol pengetahuan pengikutnya melalui prasangka dalam bentuk menyebarkan prasangka-prasangka ketidakpercayaan dan kecurigaan. Analisis tersebut didukung oleh karakteristik prasangka menurut Samovar bahwa prasangka adalah sebuah sikap mengkatagorisasi didasarkan oleh gagasan-gagasan yang terlalu sederhana, digeneralisasikan atau dilebih-lebihkan. Hal tersebut dikarenakan prasangka biasanya cenderung menjadi sebuah kesalahan dalam menilai atau penilaian yang tidak akurat



terhadap suatu kelompok didasarkan oleh sikap irasional dan sikap emosional yang bersifat kaku.

### **C. Makna *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Dalam Penolakan Ahok**

Objektifikasi merupakan isyarat-isyarat yang tahan lama dari proses-proses subjektif para produsennya. Objektifikasi yang umum dikehidupan sehari-hari dipertahankan oleh signifikasi bahasa, bahasa merupakan hal yang pokok bagi setiap pemahaman mengenai kenyataan hidup sehari-hari. Bahasa secara mendasar mempunyai kemampuan untuk menyampaikan makna-makna yang tidak merupakan ekspresi-ekspresi yang langsung dari subyektifitas serta bahasa mampu menjadi tempat penyimpanan yang objektif dari akumulasi makna dan pengalaman yang besar dan kemudian dapat dilestarikan dalam waktu dan diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya.<sup>105</sup>

Begitu juga dalam kasus ini, elit FPI serta tokoh-tokoh Kiyai, Ulama, Habaib sebagai pemimpin GMJ yang kharismatik selain menggunakan prasangka, mereka juga melakukan perlawanan terhadap Ahok menggunakan jalur hukum. Prasangka sebagai sebuah hasil eksternalisasi subjektif dalam bentuk ungkapan dan penilaian negatif dilegitimasi melalui bahasa keagamaan Islam, dan bahasa keagamaan Islam tersebut digunakan untuk melegitimasi kebenaran dimaknai sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* kepada umatnya. Ketika FPI berpandangan bahwa penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezhaliman dan kemunkaran, merupakan pengetahuan-pengetahuan kolektif massa FPI yang diperoleh melalui bahasa-bahasa keagamaan.

---

<sup>105</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckman, *Op.Cit.* Hlm 47-51

Pada ranah objektifikasi merupakan sebuah hasil dari manifestasi dari eksternalisasi ditandai dengan munculnya sebuah persekutuan kelompok keagamaan Islam yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta lalu bertransformasi menjadi Gubernur Muslim untuk Jakarta (GMJ) dengan tujuan membuat perencanaan untuk menurunkan dan menghambat Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode yang akan datang. Pada ranah objektifikasi ini berbicara tentang perencanaan upaya-upaya perlawanan dalam bentuk melengserkan dan menghambat Ahok menjadi gubernur dengan cara tidak melanggar hukum seperti turun aksi, melalui konstitusi dan mengajukan pemimpin yang tepat menurut kriteria kelompok keagamaan Islam, seperti yang penulis kutip dari pernyataan Habib Idrus bahwa Jakarta harus dipimpin oleh pilihan Ulama yang jujur, amanah dan syariah. GMJ dijadikan standar ukuran untuk daerah-daerah yang lain, misalnya nanti di Jawa Barat itu dibuat Gerakan Masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut untuk menjaga Jawa Barat juga dipimpin sama Gubernur Muslim yang jujur, yang adil yang tidak bertentangan dengan syariat dalam mengeluarkan kebijakan.<sup>106</sup>

“Karna ulama ini kan panutan Umat, dan ulama ini dalam politik Islam ada Ahlul hal Wal Aged, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu untuk berjihad, jadi ulama inikan patutan umat, tentunya suaranya ini akan didengarkan umat begitu, dan antum harus tau juga di GMJ itu ga Cuma ada GMJ doang, tapi ada politisinya, ada ekonominya, ada seorang ahli hukumnya yang tentunya sejalan dengan visi misi ulama.”<sup>107</sup>

Seorang sosiolog Robert K. Merton mengemukakan tentang prasangka dan diskriminasi dalam sikap dan perilaku masyarakat dan beliau menemukan empat

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan Habib Idrus (Ketua Lembaga Dakwah FPI) pada tanggal 11 Mei 2016

<sup>107</sup> *Ibid*

kategori tipe manusia antara lain (1) orang yang tidak berprasangka dan tidak diskriminatif; (2) orang yang tidak berprasangka namun diskriminatif; (3) orang yang berprasangka namun tidak diskriminatif; (4) orang yang berprasangka dan diskriminatif.<sup>108</sup> Dalam kasus ini FPI termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang berprasangka dan diskriminatif ditandai dengan munculnya konsensus gerakan untuk memilih Gubernur Muslim tentunya secara langsung gerakan ini sudah jelas menolak gubernur atau kepala daerah yang beragama non-muslim. Mereka juga melibatkan para tokoh-tokoh agama seperti Ulama sebagai tokoh yang dipercaya untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan kriteria syariat Islam.

Ulama sebagai tokoh penggerak menggunakan posisinya di FPI melalui GMJ untuk meninternalisasikan tujuannya dengan cara berdakwah ke beberapa pesantren di DKI Jakarta bahwa memiliki pemimpin muslim sangat penting dan dalam usahanya harus dimaknai sebagai usaha melakukan penegakan ajaran agama sehingga usahanya dimaknai sebagai pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sama halnya seperti yang dikatakan secara tegas oleh Bapak Syahrozi bahwa mengusahakan memiliki pemimpin muslim dimaknai sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai berikut ini :

“Banyak orang bilang disosmed itu FPI jangan bawa-bawa agama, jangan fasis, jangan rasis. Umat Islam itu wajib eksklusif, penolakan umat Islam terhadap Ahok itu yang utama karena dia kafir, jangan ditutup-tutupin, itu akidah, terserah orang mau bilang apa dan itu syariat Islam dan itu dilindungi. Itu kan amar maruf, nahi munkarnya kita cegah antara lain Habib Ali dan KH. Munarman untuk terlibat dalam urusan konfensi gubernur muslim, masalah hasil urusan Allah. FPI ga pernah dalam melaksanakan Amar maruf nahi munkar, kalau bicara hasil nanti malah putus asa, kewajiban FPI hanya berjuang, itu hak dan kewajiban.”<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Alo Liliweri, *Op.Cit.* Hlm 204

<sup>109</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahroji (Wakil Sekertaris DPP FPI ) 15 Maret 2016

Ketika FPI melalui GMJ menggunakan jalur hukum dalam memperkarakan Ahok pada kasus RS. Sumber Waras dan melaporkan Ahok pada masalah etika pejabat kepada DPRD DKI Jakarta juga merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang diidentifikasi secara keagamaan sebagai perbuatan ‘maksiat’ dan ‘kemungkaran’ yang dilarang oleh Allah SWT serta secara sosial mencari sebuah keadilan sebagai masyarakat DKI Jakarta dan secara langsung proses internalisasi sudah tereksternalisasi kembali melalui upaya-upaya yang dimaknai sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*. Upaya-upaya yang dilakukan massa FPI dimaknai sebagai penegakan agama yang melambang supremasi kebenaran ajaran Tuhan dengan jalan jihad dan sendirinya akan mendapatkan tempat yang terhormat yaitu surga. Hal tersebut juga disimbolkan pada semboyan FPI yaitu Hidup Muliya atau Mati Syahid.

Sama seperti yang disampaikan oleh pakar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia yaitu Prof. Hamdi Muluk, Bobo dalam Baron & Byrne menyatakan bahwa kompetisi merupakan sumber prasangka yang paling mendasar. Menurut pandangan ini, prasangka terjadi karena adanya kompetisi diantara kelompok sosial dalam mendapatkan komoditas maupun kesempatan yang berharga. Dapat dikatakan prasangka berkembang karena perjuangan dalam mencapai kesejahteraan (*struggle for the welfare*). Jika kompetisi itu berlangsung terus maka akan muncul pandangan yang negatif terhadap orang lain, hingga orang lain dianggap sebagai musuh.<sup>110</sup>

Bentuk perubahan sosial yang belum bisa diterima dan dianggap masalah sosial oleh FPI adalah munculnya kepala daerah beragama minoritas pada menduduki beragama mayoritas serta kepala daerah yang dianggap mempunyai karakter

---

<sup>110</sup> *Loc. Cit* Joko Kuncoro, Hlm 6

kepemimpinan yang buruk serta pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat tersebut mencalonkan diri lagi pada periode yang akan datang. Tentunya persaingan ini menjadi penyebab yang paling mendasar terciptanya prasangka diantara kedua belah pihak tersebut, disisi FPI menginginkan pemimpin yang beretika, berakhlak, kebijakan-kebijakannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam ataupun minimal kebijakan-kebijakannya tidak mengganggu praktek-praktek kelompok keagamaan Islam dan dapat dipercaya sedangkan disisi lain Ahok memiliki hak secara konstitusional untuk melanjutkan masa kepemimpinannya sebagai gubernur pada periode yang akan datang.

Dari tahap internalisasi, massa FPI memahami langkah-langkah panjang tersebut sebagai tindakan atau kebiasaan dari proses eksternalisasi ditandai dari memaknai aktivitas atau praktek keagamaan yang mereka sebut dengan jihad. Pada tahap ini FPI tetap menjaga eksistensi mereka dengan cara merespon perubahan sosial tersebut melalui GMJ yang ingin mewujudkan pemerintahan DKI Jakarta yang bersyariah dan minimal tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ini juga termasuk indikasi pemerintahan yang diinginkan kelompok Islam radikal bahwa penegakan hukum dan pemerintahan berbasis Islam kerap diupayakan karena sudah menjadi sebuah keharusan maupun kewajiban umat Islam. Dengan kata lain tidak ada lagi jalan yang sah selain menjadikan Islam sebagai landasan utama bagi segalanya termasuk dalam kehidupan agama, sosial dan politik.

#### **D. Diskriminasi Sebagai Dampak Prasangka**

Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki sikap prasangka sangat kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat istiadat,

kebiasaan atau hukum. Jika prasangka peduli pada sikap atau keyakinan tertentu, maka diskriminasi mengacu pada perilaku tertentu. Menurut Leonard W. Doob, diskriminasi merupakan perilaku yang ditujukan untuk mencegah suatu kelompok, atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sumber daya, prasangka dipandang sebagai ideologi atau keyakinan sedangkan diskriminasi dipandang sebagai terapan ideologi tersebut.<sup>111</sup> Setiap tindakan manusia yang berhubungan dengan orang lain biasanya didorong oleh kebutuhan dan keinginan tertentu yang disebut motif. Motif itulah yang mendorong tindakan diskriminatif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berbasis pada sentimen-sentimen agama, ras atau etnik. Dari beberapa pengertian diatas kita dapat mengatakan bahwa prasangka mengandung sikap, pikiran, keyakinan, kepercayaan yang terkadang diaktualisasikan melalui tindakan diskriminatif. Kelompok-kelompok yang terlibat hubungan antar kelompok berusaha membuat keseimbangan kekuatan dengan cara menafsirkan tindakan-tindakan yang dilakukan *outgroup* (mereka/kelompok lain) dari pengalaman-pengalaman selama berinteraksi.

Seseorang/kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mendapatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Sejarah telah menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif justru membuat tiap individu tidak lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiaannya, baik pelaku maupun korban diskriminasi.<sup>112</sup> Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan kepada Pak Ahok sebagai Gubernur

---

<sup>111</sup> Alo Liliweri *Op. Cit.*, Hlm 218

<sup>112</sup> Fulthoni, Renata Arianingtyas dkk, *Memahami Diskriminasi (Buku Saku Kebebasan Beragama)*, Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009. Hlm 6.

Petahana yang ingin maju Pilgub periode yang akan datang di tahun 2017-2022. Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Sosiologi Politik yaitu Bapak Ubaidillah Badrun, beliau mengatakan:

“Isu sara masih cukup berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan cagub dan cawagub dalam konterstasi poltiik pilkada yang akan datang tetapi tidak terlalu dominan, karena sekitar lebih dari 50% masyarakat DKI Jakarta adalah pemilih rasional.”<sup>113</sup>

Pernyataan Bapak Ubaidillah Badrun tersebut dibuktikan dengan berbagai macam dukungan dari berbagai pemilih rasional salah satunya munculnya partisipan komunitas “Teman Ahok” yang digerakan oleh kalangan anak muda dan dukungan dari partai politik. Komunitas Teman Ahok ini mengumpulkan KTP untuk persiapan Pak Ahok untuk maju Pilgub melalui Jalur Independen. Richard Saerang salah satu Pendiri Teman Ahok menuturkan alasan mendukung dan berdirinya Teman Ahok :

“Kalau menurut kami dia baik, makanya kita harus dukung dia, dia terbaik dari yang belum maju, mungkin kalau ada yang lebih bagus mungkin gw akan milih dia (calon yang lebih bagus), misalnya risma atau kang emil, ternyata yang mau maju di Jakarta Pak Ahok lagi, dan menurut gw yang lain-lain sekarang belum bagus.”<sup>114</sup>

Komunitas Teman Ahok memandang bahwa Jakarta masih membutuhkan kepemimpinan Ahok dikarenakan kepemimpinan yang baik daripada para pesaingnya. Jika memang ada pilihan figur yang lebih baik daripada Pak Ahok menurut mereka, pasti mereka dukung. Adanya prasangka dari FPI kepada Pak Ahok yang diperhatikan oleh komunitas Teman Ahok, juga meimbulkan prasangka baru yaitu prasangka Teman Ahok sebagai pendukung Pak Ahok kepada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan. Richard Saerang mengatakan bahwa:

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Pakar Sosiologi Politik Ubaidillah Badrun pada tanggal 12 Oktober 2016

<sup>114</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Richard Saerang Pendiri Teman Ahok 12 Juli 2016

“Kita mah kerja ya kerja aja ngapain kita mikirin orang lain, emang mereka bisa apa sih? Relawan mereka relawan FPI terus mereka mau mengusung Gubernur Muslim untuk Jakarta lewat mana? Lewat partai? Lu gabungin partai muslim juga ga bakal masuk kok itu juga kalau satu partai punya satu pemikiran, PKB aja udah beda-beda. Kita (teman Ahok)independen, emang mereka pikir independen itu gampang 3 bulan ngumpulin KTP”<sup>115</sup>

Prasangka yang dimunculkan oleh Teman Ahok adalah kemampuan FPI untuk mewujudkan tujuan dari gerakan GMJ (Gubernur Muslim untuk Jakarta) yaitu pemimpin muslim. Richard Saerang membandingkan waktu yang dibutuhkan dan efektivitas cara yang ditempuh ormas FPI dengan komunitas Teman Ahok dalam mengumpulkan KTP untuk memenangkan Pemilu. Hal tersebut dikarenakan GMJ terbentuk beberapa bulan setelah komunitas Teman Ahok terbentuk, artinya GMJ mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk mengumpulkan sejumlah KTP kepada calon yang diusungnya dibandingkan komunitas Teman Ahok. Richard Saerang sebagai pendiri Teman Ahok pun juga menambahkan bahwa dia dan kawan-kawan anggota Teman Ahok akan mendukung Pak Ahok dengan jalur independen maupun jalur partai politik:

“Intinya teman ahok ga ninggalin pak Ahok, dia mau lewat jalur apapun mau independen atau parpol, kita tetap dukung dia”<sup>116</sup>

Selain komunitas swadaya Teman Ahok, Pak Ahok pun juga didukung oleh berbagai partai politik yaitu Nasdem, Hanura, Golkar dan PDIP. Hal tersebut dibuktikan ketika semua pimpinan empat partai pengusung tersebut bersama-sama

---

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> *Ibid*



mengantar Ahok-Djarot ke KPUD DKI Jakarta untuk mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.<sup>117</sup>

FPI sebagai organisasi masyarakat juga memiliki kekuatan politik yang cukup kuat dan mampu mempengaruhi orang lain atau masyarakat umum dibuktikan dengan koalisi kelompok keagamaan yang mereka ciptakan dalam bentuk konvensi Gubernur Muslim untuk Jakarta (GMJ). Kekuatan politik tersebut menjadi sebuah sarana mobilitas sosial dan mengubah pendapat masyarakat melalui prasangka yang disosialisasikan melalui bahasa. Sosialisasi yang digunakan adalah sosialisasi sekunder yang merupakan internalisasi sejumlah “subdunia” kelembagaan atau yang berlandaskan lembaga.<sup>118</sup> Oleh karena itu jangkauan dan sifatnya ditentukan oleh kompleksitas pembagian kerja dan distribusi pengetahuan secara sosial melalui media massa maupun alat peraga lainnya.

Disinilah momentum internalisasi yang tereksternalisasikan kembali dilaksanakan, sosialisasi prasangka sebagai tindakan memperkuat prasangka kepada individu yang lain diaktualisasikan dalam keikutsertaanya massa FPI di dalam kontribusi pemenangan posko-posko GMJ. Melalui internalisasi yang telah tereksternalisasikan, individu yang baru ikut ke dalam struktur kepanitiaan GMJ adalah hasil konstruksi dari para elit-elit FPI maupun GMJ. Dibuktikan walaupun dengan mendapatkan banyak dukungan dari komunitas swadaya dan partai politik, dampak diskriminasi yang dilakukan FPI melalui GMJ cukup dirasakan oleh Ahok

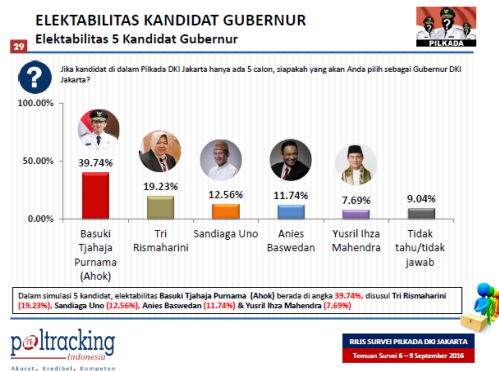
---

<sup>117</sup> Elza Astari Retaduari, *4 Partai Pengusung Siap Antar Ahok-Djarot ke KPU DKI*, <https://news.detik.com/berita/d-3302879/4-partai-pengusung-siap-antar-ahok-djarot-ke-kpu-dki> diakses tanggal 5 Oktober 2016

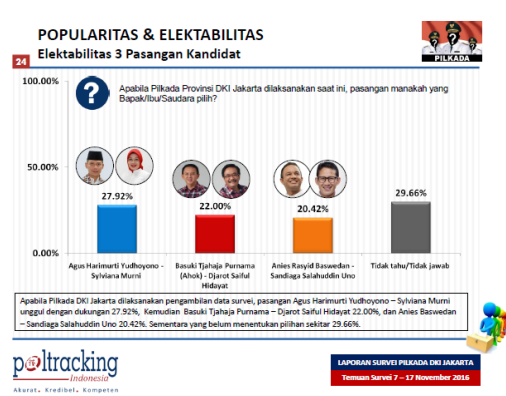
<sup>118</sup> Peter L. Berger, *Op.Cit.*Hlm 188

berkaitan dengan tingkat peluang menjadi Gubernur DKI Jakarta di periode yang akan datang dikarenakan tingkat elektabilitas dan popularitas Ahok yang cenderung menurun. Menurut lembaga survei Poltracking, data menunjukkan bahwa pada awal September tingkat popularitas dan elektabilitas Ahok cenderung selalu diatas para pesaingnya yakni hampir mendekati angka 40% seperti yang dibuktikan pada gambar IV.1. Tetapi kini berubah ketika Ahok memiliki pesaing yang ditetapkan oleh KPU, menurut hasil survey elektabilitas Ahok cenderung menurun dan cenderung merata dengan pesaing-pesaingnya dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta dibuktikan pada gambar IV.2.

Gambar IV.1



Gambar IV.2

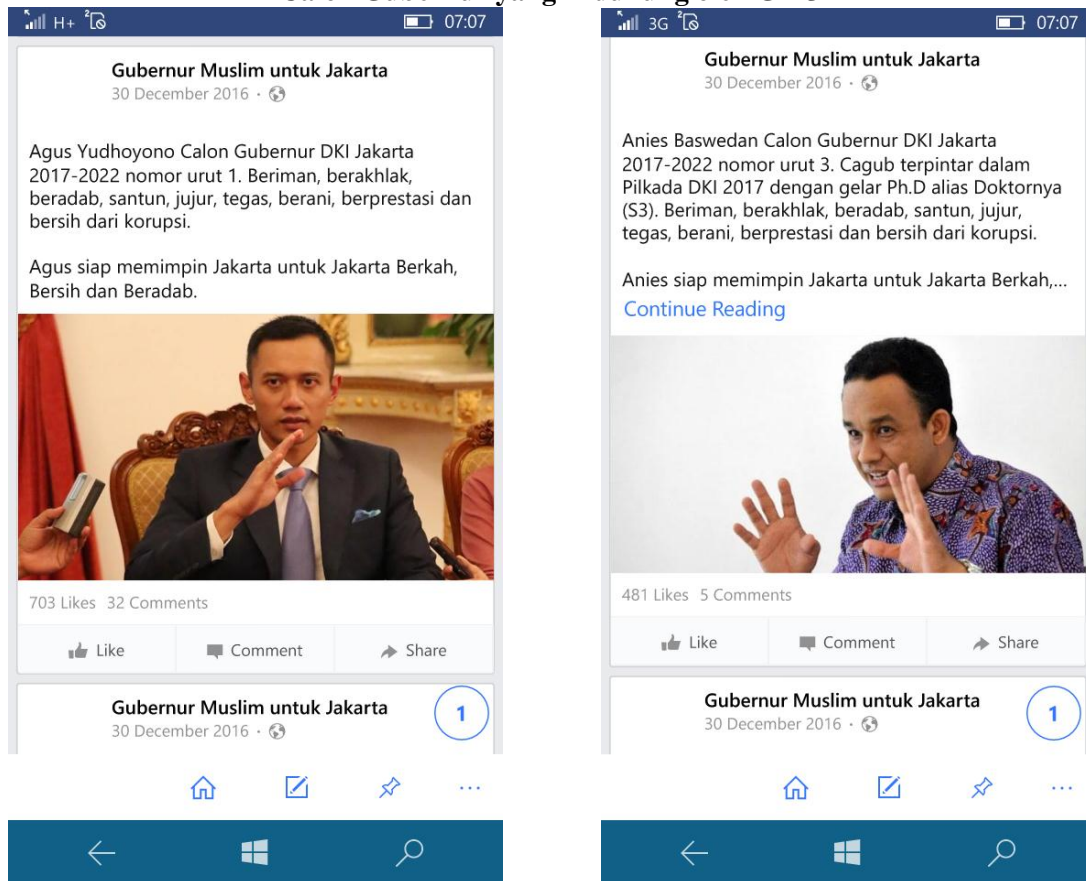


Sumber : Arsip Lembaga Survei Poltracking, 2016

Dilihat dari perbandingan survei diatas, upaya yang dilakukan FPI melalui GMJ mencegah Ahok menjadi gubernur pada periode mendatang dengan cara menurunkan elektabilitasnya berhasil dilakukan, sehingga popularitas dan elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta terbagi menjadi merata. Dampak prasangka dalam bentuk diskriminatif ini diwujudkan dengan GMJ yang berhasil memecah dukungan publik Ahok dan membaginya kepada pesaing-pesaing Ahok pada Pilkada

DKI Jakarta yaitu Agus-Sylvi dan Anies-Sandi, hal tersebut dikarenakan GMJ hanya mendukung calon gubernur yang memiliki identitas Islam. Dukungan GMJ kepada dua pasangan tersebut dibuktikan pada gambar IV.3

**Gambar IV.3**  
**Calon Gubernur yang Didukung oleh GMJ**



**Sumber : Arsip GMJ, 2016**

Pada gambar diatas peneliti menginterpretasikan kedua gambar tersebut bahwa FPI menggunakan media massa sebagai alat sosialisasi gubernur muslim yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Rasyid Baswedan dengan cara mengekspos latarbelakang akademik maupun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kedua pasangan kandidat tersebut dan membandingkan dengan kemampuan yang dimiliki

oleh pasangan Ahok-Djarot. Hal tersebut juga didukung oleh keakraban calon gubernur dengan elit FPI maupun ulama, dibuktikan pada gambar selanjutnya. Selain alasan beridentitas muslim, FPI melalui GMJ mendukung calon-calon gubernur tersebut dikarenakan mereka mempunyai program kerja yang dinilai oleh elit FPI maupun tokoh keagamaan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak bertentangan dengan asas keadilan dibuktikan dengan pernyataan sikap kedua calon gubernur tersebut menolak reklamasi dan penggusran yang telah dilakukan gubernur sebelumnya.

**Gambar IV.4**  
**Keakraban GMJ Dengan Calon Yang Didukung**



Sumber : Arsip GMJ, 2016

FPI melakukan tindakan diskriminatif menggunakan media massa sebagai alat mencari dukungan masyarakat agar dapat mewujudkan tindakan revivalisme (membangkitkan kembali kejayaan Islam) di DKI Jakarta. Cita-cita yang ingin diwujudkan oleh FPI adalah Jakarta dipimpin oleh umat muslim dan menginginkan segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemprov DKI Jakarta tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

### **E. Gubernur DKI Jakarta Menghadapi Prasangka FPI**

Dalam hubungan antar kelompok sering kali kita jumpai terjadinya perselisihan yang bersumber kepada perbedaan kepentingan dan perselisihan tersebut bertujuan untuk saling menjatuhkan dengan berbagai cara salah satunya dengan prasangka. Prasangka melibatkan dua kelompok atau lebih, dalam kasus ini FPI adalah kelompok yang mengkonstruksi prasangka, sedangkan Ahok yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai objek prasangka. Ketika prasangka sudah ditujukan kepada kelompok lain, maka tentunya kelompok tersebut akan menanggapi secara serius terlebih lagi dalam kasus ini membahas prasangka identitas, sikap dan kepemimpinan.

#### **1. Menanggapi Prasangka Agama**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa FPI menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dikarenakan identitasnya dalam hal ini adalah agama beliau yaitu Kristen berbeda dengan penganut mayoritas penduduk DKI Jakarta yaitu Islam. Dalam merespons hal tersebut, Ahok pun dalam pidatonya saat memberi pengarahan

kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 di Balai Kota mengatakan bahwa pendiri negara ini sudah menetapkan Pancasila dan UUD 1945. Ahok pun mempertanyakan mengapa Konvensi gubernur yang Habib Rizieq pimpin tersebut dibedakan berdasarkan agama, karena kemerdekaan Indonesia diraih dengan semangat Pancasila yang sarat dengan nilai toleransi beragama. Fondasi Indonesia dengan Pancasila itu sudah terbentuk."<sup>119</sup> Pernyataan ini adalah respon Ahok terhadap konfensi tokoh agama Islam menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun depan yang dapat menandingi Ahok. Respon ini adalah kritik untuk para tokoh agama yang menganggap bahwa ideologi agama mayoritas harus menjadi dasar negara. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan fondasi Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang mengedepankan asas-asas toleransi dan demokrasi.

## **2. Menanggapi Prasangka Sikap dan Kepemimpinan**

Selain agama, FPI menolak Ahok lantaran dikarenakan sikap dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang arogan dan keras. Lalu FPI juga menolak menjadi Gubernur di periode yang akan datang lantaran dinilai bahwa Ahok melakukan korupsi RS Sumber Waras serta kepemimpinannya yang lebih pro dengan pengusaha ketimbang rakyat miskin. Maka dari itu FPI dan kelompok keagamaan muslim yang tergabung dalam GMJ (Gubernur Muslim untuk

---

<sup>119</sup> Jessi Carina, *Ahok: Saya Kasihan dengan Habib Rizieq*  
<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/26/11431361/Ahok.Saya.Kasihan.dengan.Habib.Rizieq>, diakses tanggal 1 Juni 2016 pukul 15.00 WIB

Jakarta) datang ke DPRD DKI Jakarta untuk meminta DPRD DKI Jakarta melakukan

Hak Menyatakan Pendapat. Dalam merespon hal tersebut, Ahok mengatakan bahwa:

“Tunggu aku selesai kerja dulu sampai oktober 2017. Jadi kalau enggak mau saya lagi sampai oktober 2017 ya calonin lagi calon yang pintar jual program bukan cuma asal bukan Ahok, kasian lu kalau asal bukan Ahok”<sup>120</sup>

“selama ini pihak yang berencana menjadi calon gubernur DKI Jakarta tak berbicara soal program yang akan dilakukan bila terpilih menjadi gubernur, mereka hanya menolak dirinya untuk tidak duduk kembali di kursi DKI 1.”<sup>121</sup>

Ahok balik menantang, dia menekankan apabila sebagian anggota dewan yang tidak ingin dia memimpin Jakarta lagi, maka mereka yang menolak keberadaan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka mereka harus mengukung calon gubernur yang lebih baik daripada ketimbang dirinya. Hal tersebut lebih baik daripada mencari-cari kesalahan atas kebijakannya yang dia ambil. Walaupun demikian Ahok menyerahkan semua keputusan kepada masyarakat yang bakal memilih pada tanggal 15 Februari 2017.

## **F. Penutup**

Pada bab ini telah dijelaskan bahwa probelmatika yang utama terjadi antara FPI dan Ahok adalah kompetisi atau persaingan. Tetapi persaingan tersebut menimbulkan resistensi/penolakan dengan cara upaya-upaya konstitusional yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dalam hal ini adalah visi-misi FPI yaitu *Amar*

---

<sup>120</sup> Febiyana, *Digoyang DPRD Lewat HMP, Ini Komentar Ahok*, <http://www.nusanews.com/2016/06/digoyang-dprd-lewat-hmp-ini-komentar.html> diakses tanggal 3 Juni 2016 jam 15.00 WIB

<sup>121</sup> Puput T. Juniman, *Ahok Cium Gelagat 'Asal Bukan Ahok' di Pilkada 2017*, <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160803193419-32-149053/ahok-cium-gelagat-gerakan-asal-bukan-ahok-di-pilkada-2017/> diakses tanggal 5 Agustus 2016 jam 15.00 WIB

*ma'ruf nahi munkar*. Upaya-upaya tersebut dimaknai sebagai jalan jihad (sungguh-sungguh membela agama dengan tujuan mempertahankan kebenaran Islam).

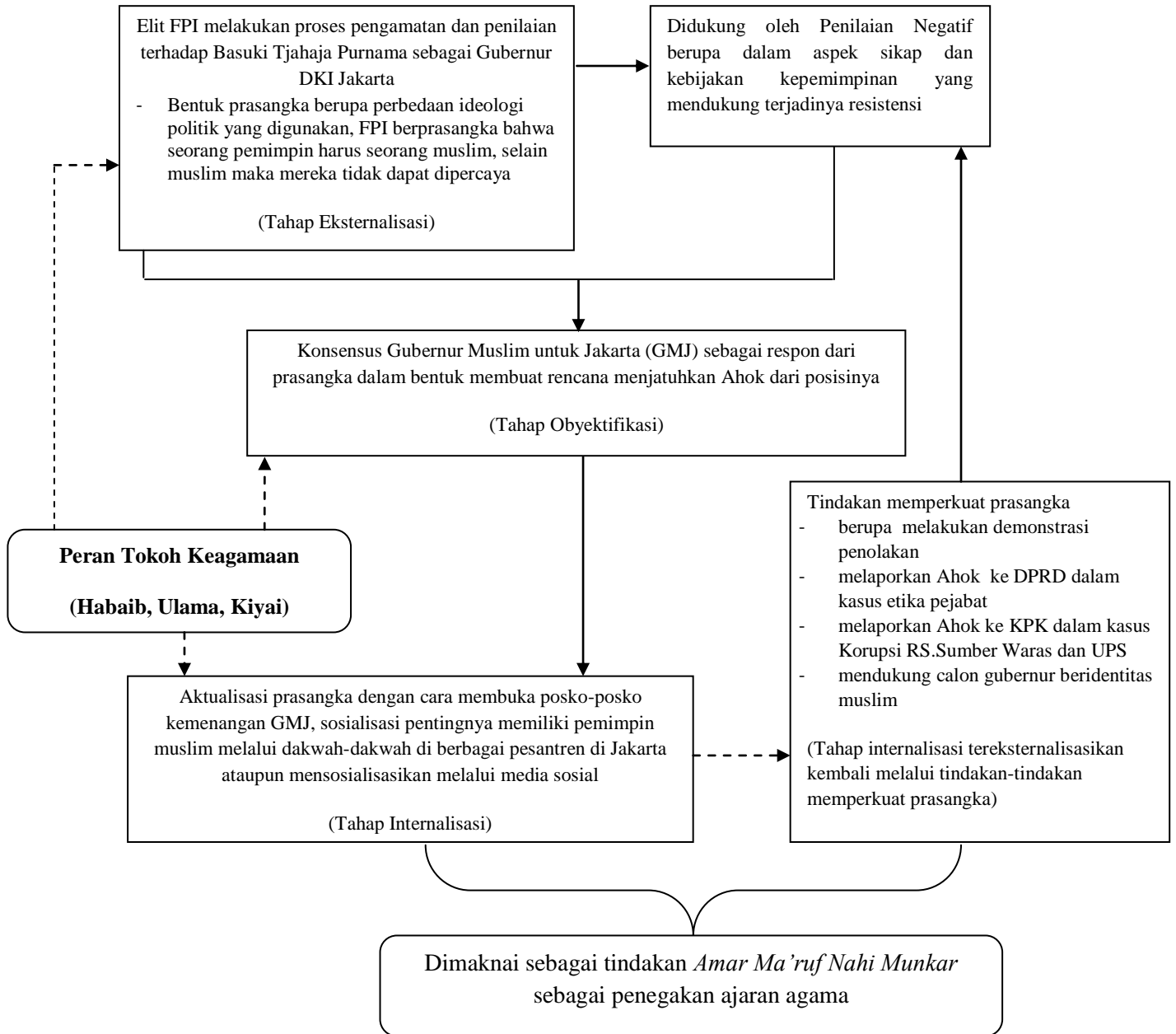
Upaya-upaya tersebut secara tidak langsung sudah mendiskriminasi Ahok. Diskriminasi ini memiliki dua sisi antara lain yaitu manfaat diskriminasi bagi FPI dan dampak diskriminasi bagi Ahok. Manfaat diskriminasi bagi FPI adalah mengembalikan kejayaan politik Islam melalui kontestasi politik Pilgub DKI Jakarta dengan cara menjaring beberapa tokoh masyarakat yang berminat menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan syarat utama adalah seorang Muslim. Disisi lain dampak diskriminasi bagi Ahok tidak terlalu signifikan karena sampai saat ini malah muncul dukungan dari swadaya masyarakat seperti teman Ahok dan beberapa partai politik.

Dalam upaya-upaya penolakan Ahok, peran tokoh keagamaan sangat signifikan dilihat pada tahap eksternalisasi tokoh keagamaan ini melakukan pengamatan kepada Ahok lalu pada tahap objektifikasi tokoh keagamaan ini membuat konsensus gerakan sosial serta yang terakhir pada tahap internalisasi para tokoh keagamaan ini melakukan sosialisasi melalui praktek keagamaan yaitu berdakwah.



## Skema IV.2

### Kerangka Analisis Probematika FPI Dengan Gubernur DKI Jakarta



Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2016

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya FPI diposisikan sebagai kelompok nasional yang kontribusinya kritis terhadap perubahan sosial yang terjadi di DKI Jakarta. Upaya-upaya yang dilakukan oleh FPI untuk menghambat dan menjatuhkan Basuki Tjahaja Purnama merupakan bukti konkrit praktik keagamaannya sebagai kelompok keagamaan kritis terhadap perubahan sosial yang mereka anggap menyimpang. Bagi FPI upaya-upaya tersebut adalah bagian dari jalan jihad berlandaskan *Amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemaksiatan).

Dalam biografinya FPI dibentuk di pesantren Al-Umm di Kelurahan Kampung Utan Kecamatan Ciputat, Jakarta Selatan yang tidak jauh dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tanggal 17 Agustus 1998 oleh beberapa tokoh keagamaan dan saat ini dipimpin oleh KH. Ahmad Sobari dan Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Syihab. Dalam menegakan visi misi *Amar ma'ruf nahi munkar*, FPI memiliki semboyan Hidup Mulia atau Mati Syahid.

Bentuk-bentuk prasangka yang muncul adalah prasangka berdasarkan ideologi politik identitas, dan didukung oleh penilaian-penilaian negatif dari aspek sikap serta kepemimpinan Ahok. Prasangka FPI terhadap Ahok dalam bentuk berdasarkan ideology politik identitas maksudnya adalah FPI menganggap bahwa tidak baik Jakarta dipimpin oleh orang yang non-muslim karena masyarakat DKI Jakarta

mayoritas menganut agama muslim, jadi bagi FPI tidak cocok penganut agama non-muslim memimpin penduduk yang mayoritas muslim, tetapi dalam berhubungan secara sosial kepada kaum non-muslim diperbolehkan.

Lalu penilaian negatif terhadap sikap kepemimpinan maksudnya adalah FPI menilai Ahok tidak pantas menjadi pemimpin DKI Jakarta karena sikap-sikap yang dicontohkan kepada publik dianggap tidak baik contohnya arogan, berwatak keras, dan sering berbicara kasar, sedangkan penilaian negatif terhadap kepemimpinannya Ahok bahwa FPI melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Ahok tidak pro dengan rakyat tetapi malah pro dengan pengembang. Hal tersebut mereka lihat pada kebijakan yang diberikan pada pengembang reklamasi pulau buatan. Selain itu FPI berpandangan bahwa Ahok terlibat berbagai macam korupsi, salah satu yang menjadi sorotan adalah terlibat korupsi RS.Sumber Waras yang diindikasikan merugikan negara sampai 1,8 triliun rupiah.

Sumber prasangka yang menyebabkan penolakan dan penghambatan Ahok menjadi gubernur pada periode yang akan datang disebabkan oleh persaingan politik. Kepentingan politik FPI adalah menginginkan Pemimpin Muslim yang diaktualisasikan oleh GMJ (Gubernur Muslim untuk Jakarta) dan diharapkan pemimpin muslim yang jujur, amanah dan mampu membangkitkan kejayaan Islam. Disisi lain Ahok pun juga mempunyai hak menjadi kepala daerah yang diatur pada UUD 1945 bahwa semua golongan berhak menjadi kepala daerah. Kepentingan politik Ahok adalah melanjutkan program kerja nawacita yang telah disusun secara rapih pada periode sebelumnya.

Prasangka menyebabkan tindakan diskriminasi tetapi pada kasus ini diskriminasi terbagi menjadi dua yaitu manfaat diskriminasi bagi FPI dan dampak diskriminasi bagi Ahok. Di satu sisi manfaat diskriminasi bagi FPI adalah sebagai aktualisasi/mewujudkan prasangka dan juga sebagai ranah untuk mengembalikan kejayaan politik islam yang mereka cita-citakan dalam bentuk upaya-upaya konstittusional dan dimaknai sebagai jalan jihad. Secara langsung upaya-upaya FPI merupakan praktik keagamaan yang mereka jalankan dengan niat karena Allah SWT. Disisi yang lain dampak diskriminasi kepada Ahok tidak teralalu signifikan, karena cukup banyak bermunculan dukungan-dukungan untuk maju menjadi Gubernur DKI Jakarta yang akan datang seperti Teman Ahok, dan dukungan dari berbagai partai politik.

## **B. Saran**

Setelah mengambil beberapa kesimpulan dalam skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran sehingga dapat diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Dalam kompetisi tentu kita selalu menggunakan segala cara untuk menang, tetapi dalam kompetisi tentu hal yang paling kita inginkan adalah kompetisi yang adil tanpa merugikan lawan maupun orang lain. Maka sangat diperlukan peran serta pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada untuk menengahi secara adil kompetisi politik yang terjadi saat ini maupun yang ada pada kasus skripsi ini. Mengingat berbagai macam dampak, salah satunya ancaman ketidakteraturan sosial maupun konflik-konflik horizontal.

Akhir kata semoga skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi terutama peneliti, pembaca dan juga pengoreksinya. Semoga penelitian ini juga mampu memberikan referensi bagi jenis penelitian yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku yang Digunakan

- Anwar, Y., & Adang. (2013). *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Berger, P. L. (1991). *Langit Suci, Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta : LP3ES.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Efendi, S., & Pramuko, Y. *Rahasia Sukses Habib-FPI Gempur Playboy?! Jakarta: Rajanya Penerbit Islam*.
- Jahroni, Jamhari J. (2003). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: PT "Paradigma".
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka & Konflik Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Ludwig, P. B., & Luckman, T. (2013). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Mayer, D. G. (2012). *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Salemba Humanika.
- Nashir, H. (2007). *Gerakan Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Rizieq, M. (tanpa tahun). *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Maksiat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah.
- Santoso, S. (2010). *Penerapan Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sarwono, S. W. (2014). *Psikologi Lintas Budaya*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

- Sudaryono. (2014). *Budaya & Perilaku Organisasi*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia Perkantoran Sentra.
- Sulistiani, Ambar Teguh. (2008). *Kepemimpinan Profesional Pendekatan Leadership Games*. Yogyakarta: Gava Media
- Suparno, P. (1997). *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Winardi, J. (2003). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zick, A. (2011). *Intolerance, Prejudice and Discrimination A European Report*. Berlin: University Buchdruckerei.

### **Karya Ilmiah yang Digunakan**

- Ahmad Haerurohim. (2003). *Kontrol Sosial Organisasi Sosial Keagamaan (Kasus FPI di Prov DKI Jakarta)*, Tesis Magister Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia.
- Bakti Andriyono. (2003). *Organisasi Keagamaan FPI*, Tesis Magister Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.
- M. Zaki Mubarak. (2003). *Islam Fundamentalis Radikal dan Kepolitikan di Indonesia (Gerakan dan Pemikiran FPI, Majelis Mujahidin, Laskar Jihad dan HTI Tahun 1998-2003)*, Tesis Magister Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia.

Reza Febriansyah. (2013). *Radikalisme Berlatar Belakang Agama Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Ormas FPI Di Kota Palembang)*, Skripsi, Program Studi Sosiologi, Universitas Sriwijaya.

Rocky Sistarwanto. (2010). *Potensi Ideologisasi Jihad Yang Mengarah Pada Aksi Terorisme Oleh Kelompok-Kelompok Islam Radikal di Indonesia*. Tesis Magister Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia.

Tumono Raharjo. (2004). *Mindfulness Dalam Komunikasi Antar Etnis (Studi Tentang antar Etnis Cina dengan Etnis Jawa ; Kasus Sudiroprajan, Solo)*. Disertasi, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.

Yal Robiansyah. (2006). *Kekerasan Massa FPI (FPI) Terhadap Tempat Hiburan di Jakarta*, Tesis Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

### **Data yang Didapat**

Wawancara Habib Ali Alatas (Ketua DPP Front Mahasiswa Islam)

Wawancara Habib Idrus (Ketua Lembaga Dakwah FPI)

Wawancara Ustadz Maman Suryadi (Panglima Nasional Laskar Pembela Islam)

Wawancara Bapak Syaroji (Wakil Sekertaris Umum DPP FPI)

Wawancara Richard Saerang (Salah satu pendiri Teman Ahok)

Wawancara Prof Hamdi Muluk (Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia)



Wawancara Ubeidillah Badrun, M. Si (Pakar Sosiologi Politik)

Transkrip Ceramah Habib Rizieq pada pengajian bulanan FPI pada tanggal 3 April

2016 <https://www.youtube.com/watch?v=uU6DVgM5AuE>

### Akses Internet Yang Digunakan

Lenny Tristia Tambun, *Penolakan Lurah Susan*,  
<http://sp.beritasatu.com/home/penolakan-lurah-susan-bentuk-nyata-diskriminasi/42614> diakses pada tanggal 9 Maret 2016 Pukul 18.40 WIB

M. Andi Pradana, *Di Incar FPI, Lurah Grace No Coment*,  
<https://metro.tempo.co/read/news/2013/10/29/064525447/diincar-fpi-lurah-grace-no-comment> diakses pada tanggal 9 Maret 2016 Pukul 18.45 WIB

[kesbangpol.kemendagri.go.id/filespdf](http://kesbangpol.kemendagri.go.id/filespdf) diakses pada tanggal 9 Maret 2016 Pukul 19.10 WIB

Febiyana, *Digoyang DPRD Lewat HMP, Ini Komentar Ahok*,  
<http://www.nusanews.com/2016/06/digoyang-dprd-lewat-hmp-ini-komentar.html>  
diakses tanggal 3 Juni 2016 jam 15.00 WIB

Ihsanuddin, *Ini Empat Alasan PDI-P Dukung Ahok-Djarot*,  
<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/20/21592971/ini.empat.alasan.pdi-p.dukung.ahok-djarot> diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB

Jessi Carina, *Ahok: Saya Kasihan dengan Habib Rizieq*,  
<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/26/11431361/Ahok.Saya.Kasihandengan.Habib.Rizieq>, diakses tanggal 1 Juni 2016 pukul 15.00 WIB

Kurnia Sari Aziza, *Ini Alasan Golkar Dukung Ahok pada Pilkada DKI 2017*,  
<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/24/15180521/ini.alasan.golkar.dukung.ahok.pada.pilkada.dki.2017> diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB

Nibras Nada Nailufar, *Ini Alasan Partai Nasdem yang Cepat Deklarasikan Dukungan ke Ahok*,  
<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/10/13373561/Ini.Alasan.Partai.Nasdem>

[.yang.Cepat.Deklarasikan.Dukungan.ke.Ahok](#) diakses tanggal 5 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB

Pebriansyah Ariefana, *Ini Alasan Hanura Dukung Ahok*,  
<http://www.suara.com/news/2016/06/23/171151/ini-alasan-sikap-hanura-dukung-ahok> diakses tanggal 5 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB

Puput T. Juniman, *Ahok Cium Gelagat 'Asal Bukan Ahok' di Pilkada 2017*,  
<http://www.cnnindonesia.com/politik/20160803193419-32-149053/ahok-cium-gelagat-gerakan-asal-bukan-ahok-di-pilkada-2017/> diakses tanggal 5 Agustus 2016 jam 15.00 WIB

## LAMPIRAN

### Hasil wawancara peneliti dengan Habib Idrus

**P:** Gini pak kan FPI tergabung ke dalam GMJ dengan kelompok keagamaan lainnya lalu tujuan awalnya apa sih pak

**NS:** GMJ awalnya suatu kesadaran dari pergerakan yang disponsori oleh para alim ulama, para kiyai, para habaib untuk supaya Jakarta ini dipimpin ama Gubernur muslim, Gubernur Muslim yang jujur, yang adil yang kebijakannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebab kenapa,? ini wajib loh masyarakat Jakarta mayoritas Muslim yang dipimpin oleh seorang muslim, di Bali Aja Mayoritas Hindu di pimpin oleh orang Hindu dan umat Muslim ga protes, di Papua, Menado dipimpin oleh seorang Nasrani dan Umat Islam tak pernah protes, koq sekarang koq mayoritas muslim kenapa dikasih pemimpin yang kafir dan perlu diinget Ahok ini bukan hanya masalah sara atau di kafir atau nggak, Ahok ini kita sama-sama tahu bahwa dia ini ga ada etika dan ga ada ahlak, pernyataan-pernyataannya ga pantes, dan juga kita liat sama-samalah di Garut ada Bupati Aceng Fikri, dia bisa diturun sama DPRD gara-gara kawin lagi dan ngatain istri pertama itu dianggap melanggar undang-undang etika pejabat. Nah sekarang ini Ahok kita liat dari usut dia ngatai DPRD rampok, waktu itu dia ngatain ormas Muhammadiyah “jangan sok munafik dapet upeti”, terus bagaimana dia mengatakan “Nabi sekalipun kalau ada tidak bisa mengatasi prostitusi” kan itu terjadi karena stement dia sendiri yang bisa meresahkan umat Islam (sikap Ahok yang dipandang FPI)

**P:** Selain statement?

**NS:** Jadi perlu diketahui seperti ahok itu melarang menjual hewan kurban ditempat-tempat umum, bahkan sempet melarang menyembelih hewan kurban ditempat-tempat umum, jadi dia maunya menyembelih di RPH di cakung, ini apa ini kan udah adat dan syariat juga ibadah suatu umat muslimin walaupun dia berkedok menyangkal tapi kita ada buktinye dia mengeluarkan peraturan tersebut. Kita sudah menempuh jalur-jalur konstitusi udah datang ke DPRD, kalau Ahok ini sudah melanggar pasal-pasal etika dan banyak statement statemet meresahkan. Kita pake jalur konstitusi ke DPRD mendesak DPRD ini supaya membuat Hak Angket, hak menyatakan pendapat, tapi sampe sekarang DPRD melempem. Padahal udah jelas ko Aceng Fikri bisa dijatuhkan sama DPRD Garut jadi sampai saat ini kita masih pakai jalur konstitusi

**P:** GMJ ini kan adalah Gubernur Muslim untuk Jakarta tapi disisi lain melakukan resistensi kepada Ahok, nah sebenarnya GMJ itu lebih kepada mencari persaingan pilgub DKI Jakarta atau hanya ingin menurunkan Ahok saja?

**NS:** Pertama GMJ ini ingin kita ini ga mau dipimpin oleh kafir, yang kedua GMJ ini nanti kedepatnnye Jakarta ini harus dipimpin oleh pilihan Ulama, Ulama yang mana? yang jujur,

yang amanah yang syariah. Kita Jadikan Jakarta itu bersyariah. Yang Ketiga Jakarta ini bisa menjadi patokan daerah-daerah yang lain, misalnya nanti di Jawa Barat itu dibuat Gerakan Masyarakat Jawa Barat terdiri dari Ulama, Kiyai, Habaib untuk apa? Untuk menjaga Jawa Barat agar dipimpin sama Gubernur Muslim yang jujur, yang adil yang tidak bertentangan dengan syariat dalam mengeluarkan kebijakan. Jadi tidak Cuma ingin mencekal Ahok, ga Cuma ingin menyaingi Ahok dalam Pilgub Jakarta , tapi mengawal Jakarta Bersyariah yang didalamnya dipimpin sama Alim Ulama, Para Habaib, dan para Kiyai

**P:** Kalau boleh tau alasan melibatkan alim ulama, kiyai dan Habaib sebagai tokoh-tokoh yang mempertimbangan terpilihnya Gubernur?

**NS:** Karna ulama ini kan panutan Umat, dan ulama ini dalam politik Islam ada Ahlul hal Wal Aged, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu untuk berjihad, jadi ulama inikan patutan umat, tentunya suaranya ini akan didengarkan umat begitu, dan antum harus tau juga di GMJ itu ga Cuma ada GMJ doang, tapi ada politisinya, ada ekonominya, ada seorang ahli hukumnya yang tentunya sejalan dengan visi misi ulama. Jadi Islam itu ga bisa dipisahkan dari politik karna islam itu agama yang sempurna, kalau ada orang-orang yang bilang jangan bawa-bawa politik dalam Islam itu salah berarti itu orang sekuler yang memisahkan agama dengan negara.

**P:** Bagaimana pendapat bapak dengan kebijakan Ahok?

**NS:** Kebijakan ahok ini meresahkan umat Islam, contohnya reklamasi, dia gusur itu orang miskin walaupun dia dengan dalih dia sudah buat rumah susun, tapi perlu diinget itu rumah susunnya jauh, jauh kenapa? Karna masyarakat luar batang itu nelayan otomatis dia akan kehilangan ekonominya dong, yang kedua rumah susun itu nyewa ga bisa menjadi hak milik, sedangkan masyarakat luar batang ini sudah ratusan taun tinggal luar batang dan perlu diinget janji Jokowi bahwa dia akan mentatakotakan, tatakota artinya ape? Digusur lalu dibangun lagi tempat itu, bukan dikasih ke konglomerat-konglomerat ini ada permainan kita liat, orang reklamasi belum jadi, izinnya belum jelas tau-tau udah diberitain di cina, dengan alasan pengusuran itu karena penghijauan, kalau penghijauan banyak ko apartemen-apartemen yang tinggi-tinggi bisa membuat banjir karena daerah resapan yang dibangun. (Kebijakan Ahok disoroti oleh FPI)

**P:** Jadi masyarakat luar batang itu bukannya ga mau digusur, silahkan gusur tapi bikin rusun yang di situ juga karena kehidupan mereka nelayan, sampe sekarang ini banyak yang terlantarkan yang kita sebut dengan masyarakat perahu tuh yang tinggal di perahu, siapa yang bantu mereka, ya FPI dan ormas-ormas lain yang ngasih makanan

**P:** Terus menurut bapak bagaimana kebijakan ahok menggusur kalijodo?

**NS:** Ya walaupun ahok itu banyak orang mengatakan bahwa ahok itu bagus dong menggusur kalijodo karna itu tempat pelacuran, nah sekarang gini aja, Ahok itu dengan dalih die ingin menggusur pelacuran, tapi banyak daerah pelacuran di diemin aja seperti daerah alexis dimane-mane,

**P:** Apakah perilaku ahok itu tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat DKI Jakarta?

**NS:** Ya statement dia sering kasar, dia waktu itu kumpulin guru dimonas, itu guru-guru dibentak di depan muridnya, dia bilang “lu lu semua harus ngikutin gw yee, sekarang gw Gubernurnye kalau nggak gw pecat-pecatin lu” apa pantes ngomong seperti itu. Lalu bagaiman Ahok itu ngomelin orang-orang miskin, walaupun orang miskin itu salah tapi dibentak-bentak apa pantes, mulutnya kasar apa pantes pejabat publik seperti itu, dan perlu anda tau dia pernah menyuruh istrinya untuk memimpin rapat pemprov DKI, nah sekarang saya kasih contoh Pak Harto yang dulu disegenin ga pernah menyuruh istrinya Ibu Din untuk rapat kenegaraan, lalu bagaimana Ahok itu membongkar masjid dengan alasan masalah perizinan yang kurang lengkap, ini tempat ibadah harus diperhitungkan. Ini masjid Jatinegara dan di Lebak bulus

**P:** Menurut bapak ada ga sih program pro rakyat?

**NS:** Ga ada masih banjir ko, kita menolak Ahok itu karena kafir. Zaman Pak Harto dulu kalau millih pemimpin itu disesuaikan dengan agama mayoritas setempat. Yang kedua bagaimana Statement Ahok meresahkan, kurang ajar, kasar. Apalagi yang ketiga tersandung kasus korupsi, secara hukum Ahok ini sudah kena karena BPK badan resmi mempunyai laporan tentang RS Sumber Waras ada penyalahgunaan, tapi ini kan secara politik, secara politik Ahok ini seperti dilindungi. (FPI berpandangan bahwa Ahok dilindungi secara politik)

**P:** Bagaimana memakanai amar maruf nahi munkar

**NS:** Ya kita sudah melakukan Aksi-aksi yang tadi saya katakan kita melakukan aksi konstitusional kita ke DPRD kita temuin, kita bawain bukti-buktinya kesalahan Ahok yang bertentang dengan undang-undang secara etika, kita sudah demo, kita bikin opini, sudah bermacam-macam

**P:** FPI yang tergabung dengan GMJ dan berpartisipasi dalam politik, lalu pesan pendidikan politik seperti apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat DKI Jakarta?

**NS:** Pertama GMJ ini tidak ada unsur dukung sana dukung sini walaupun banyak ibarat kata banyak calon Gubernur yang merapat GMJ nanti kita saring tetapi bukan untuk menciptakan kompetitor tapi bagaiman kita menjaring yang terbaik diantara mereka mereka, itu memberikan pelajaran bahwasannya kita itu kaga ada main duit, kite ikhlas dukung. Buktinya kita bikin posko-posko rakyat Gubernur Muslim disetiap kelurahan kita mintain KTP-KTP, untuk kita serahkan kepada para habaib para ulama yang harus diserahkan kepada calon terbaik yang ulama dukung, pendidikan buat masyarkatnya apa? Kita ga main duit. Bahwasannya kita mencari sosok pemimpin yang diyaknin sesuai dengan para Habaib, para habaib, para Alim Ulama yang mereka tentunya mengangkat pemimpin itu yang jujur yang baik, yang dekat dengan agama, karena tujuan GMJ itu adalah mengawal Jakarta Bersyariah.

Kriteria pemimpin kami adalah Muslim, Jujur, Adil, kebijakannya tidak bertentang dengan syariat Islam

**P:** Rencana kedepan?

**NS:** Ya GMJ ini mengawal Jakarta yang bersyariah siapa pun pemimpinnya, walaupun muslim ga bagus kita mengadakan aksi

**P:** Lalu bagaimana mensosialisasi penolakan Ahok

**NS:** Ibarat kata yang kita serang itu bukan semata-mata dia kafir tapi juga kebijakan die, ya yang utama bertentang dengan ayat-ayat Al-Quran dong yang ga boleh memilih pemimpin kafir, yang kedua kita mayoritas wajar kita dipimpin sama muslim, sebagaimana bali aja bali silahkan bali mencari pemimpinnya, papua dipimpin sama nasrani dan umat islam tau diri. Kita buat opini-opini kita buat selebaran bagaimana nih kebijakan Ahok menyengsarakan banyak bertentang dengan syariat, etika ngomongnya menyakitkan kita pak fakta dan data. Oh banyak orang-orang cina sendiri bergabung ke kita dia resah dengan omongan Ahok seperti Jaya Supratna lalu Louis Ketua Tionghoa Indonesia

### **Hasil Wawancara Habib Ali**

**P:** Bagaimana pandangan ttg masyarakat DKI Jakarta?

**NS:** Jadi DKI Jakarta itu penduduknya mayoritas Islam, sejarahnya erat dengan Islam karena pendiri Jakarta yaitu Fatahila yaitu ulama Islam yang berusaha merebut Sunda Kelapa dari tangan orang penjajah kafir, ikatan Islam di Jakarta sangat prinsipil, di Jakarta umat Islam 80% berarti ada hak-hak yang harus dimiliki oleh umat Islam contohnya beribadah dll, Cuma jadi masalah Jakarta ini adalah kota metropolitan, artinya berkumpul bermacam berkumpul suku agama ras, itu gamasalah, yang masalah adalah ini daerah mayoritas umat Islam haruslah dan alangkah baiknya segala hukum, aturan, segala tindak tanduk pemerintahan ini minimal tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi kenyataan kemaksiatan justru terjadi di ibukota, pelacuran karaoke, tempat hiburan malam dll itu sudah menjadi identitas ibukota dan itu sangat disayangkan ditengah2 penduduk umat Islam, makanya itu sebenarnya mengganggu hak beribadah umat Islam. Karena dari dulu dipercaya bahwa yang namanya rumah dekat dengan tempat maksiat ga berkah bakal kena azab, sebelum maksiat itu melanda umat Islam alangkah baiknya memberantas penyakit-penyakit masyarakat, karena kita Jakarta makanya jangan sampai Allah menurunkan azab di Jakarta kita ini. Maka dari itu mayoritas beribadah umat Islam itu harus dihormati

**P:** Bagaimana fpi sebagai penduduk mayoritas pribumi menerima masyarakat etnis lain?

**NS:** Ga masalah, ahlan wa sahan, selama mereka ga buat masalah kita ga masalah, jadi kita berhubungan secara muamalah, dan kita wajib melindungi mereka bahkan beribadah

**P:** Dalam bentuk apa hubungan muamalah dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum?

**NS:** Kalau hubungan ekonomi ga masalah, tp hubungan hulkum politik tunggu dulu, kalau hubungan politik menjaga kesetabilan pemerintahan kita bisa kerjasama, kalau dalam bidang hukum dalam menegakan hukum kita bisa kerja sama, tapi jadi masalah pemimpin mayoritas dari umat kafir minoritas itu haram ga bisa kita terima

**P:** Pandangan bapak kpd Gubernur DKI jakarta tentang kelebihan dan keburukannya?

**NS:** Kelebihannya ga ada, kekurangannya banyak karena dia itu tidak pantas memimpin umat islam dalam alquran disebutkan jangan memilih dari umat muslim, penduduk DKI Jakarta ada 10Jt masa dari sebanyak itu tidak ada pemimpin muslim yang menghuni, kenapa musti ahok apa hebatnya ahok sama aja kaya dulu dan korupsi bahkan dia itu dibandingkannya dulu ahok ini biasanya aja. Nah kita duduk disini drpd memilih ahok lagi, kita sering bilang ahok itu haram tapi kita ngasih solusi kita bikin muzakarah ulama, ini umat islam berembuk termasuk FPI, FBR dan juga ada dari NU, muhammadiyah dan tokoh ulama besar di DKI Jakarta berembuk supaya bagaimana caranya jangan bilang haram-haram tapi ga ngasih solusi, dan solusi ini kita upaya untuk menjaring Gubernur muslim yang berpihak kepada masyarakat DKI Jakarta tapi tetap berpegangan dengan syariat islam dan nilai-nilai islam. Jangan sampai gubernur muslim bikin lokalisasi seperti alisadikin. Kita pilih muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah supaya allah turunkan keberkahan dari bumi dan umatnya jadi jgn takut miskin kalau gubernurnya muslim, karena kalau gubernurnya muslim pasti diajak masyarakatnya beriman dan bertaqwa. Pasti ekonominya membaik.

**P:** Apakah setelah Ahok maju sebagai Gubernur DKI jakarta akan mempengaruhi aktivitas FPI?

**NS:** Kalau mempengaruhi ibadah umat islam secara keseluruhan ya, kan FPI bagian dari umat islam. Contohnya pelarangan pemotongan hewan kurban trus pelarangan tablig akbar dimonas sebagai lapangan tablig akbar. Kita ga pernah bergantung kepada pemerintah, tp FPI sebagai bagian dari umat islam ikut rugi. Di persulit banyak lagi yang bisa dibongkar. FPI ikut rugi dong punya pemimpin kafir. Punya pemimpin kafir itu rugi ga bakal dapat pahala, memilih Gubernur muslim ada pahalanya.

**P:** Trus bagaiman FPI mensosialisasi penolakan ahok menjadi Gubernur selanjutnya?

**NS:** Ya kita bergabung berembuk dengan ulama. Nanti mereka yang menentukan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung umat islam. FPI wajib manut dengan keputusan ini. Lalu apa yang kita angkat, “haram memilih gubernur kafir wajib memilih gubernur muslim dengan cara mengikuti fatwa ulama.

**P:** Fasilitas apa saja yang mendukung sosialisasi ?

**NS:** Tiap pemilihan umat islam Cuma jadi konsumen aja, skr kita aja untuk terlibat dalam memilih pemimpinnya sendiri. Disini umat islam marak nih majelis talim, pesantren di pinggir-pinggir kota jakarta. Kita memaksimal mreka kita msuk ke majelis taklim, tabilg

akbar, pesanteren-pesantren, dan deketin tokohnya. Itu modal umat islam yang selama ini digunakan partai politik untuk mendulang suaranya

**P:** Kan tadi bapak melihat ahok dari latar belakang, lalu bagaimana dengan identitas dan sikap?

**NS:** Etnis sih ga masalah yang penting muslim mau oribumi asli yang penting muslim, kriteria pemimpin kita ini laki-laki, ahlak, kapabilitas, integritas.

Itu orang mulutnya comberan apalagi koruptor sumber waras, itu fakta dan dia itu tidak berpihak kepada yang lemah rekaman ada diyutub, tapi kalau sama pengusaha nurut2 aja dia bukan liberal tapi zalim

**P:** bagaimana memaknai Amar maruf nahi munkar dalam penolakan ahok

**NS:** begini amar maruf nahi munkar adalah mekanisme yang Allah berikan kepada manusia dengan berlandaskan alquran dalam surat Al imran 104. Masalah pemimpin muslim itu ada di AlQuran, tinggal masalahnya kita taat atau nggak. Kata taat (Amarmaruf Nahi munkar) ini konsep islam, hanya saja FPI yang gerakin.

**P;** Lalu bagaimana kriteria pemimpin menurut FPI sendiri?

**NS:** intinya muslim, selebihnya kita bisa ceritain panjang lebar kalau dibahas, itu prinsip. Selain itu kafabel, punya keahlian dan minimat tidak melanggar syariat islam. Muslim tapi zina, mabuk-mabukan, koruptor ya kita lawan

**P:** lalu bagaimana strategi FPI untuk melawan Ahok untuk gagal dalam pemilu periode yang akan datang?

**NS:** cara kami yang penting konstitusional, kita ga mau melanggar hukum dan main hakim sendiri. Kalau masyarakat bilang kita main hakim sendiri itu salah kaprah. Kalau kita main hakim sendiri kita udah transit di balai kota. Kta pake jalur konstitusional, kita demo, kita aksi turun kejalan menyampaikan bahwa memilih gubernur muslim itu hak beragama kitalah selama intinya tidak melanggar hukum itu aja, apapun metodenya kita tempuh. Kita demo kita aksi yang terakhir kali kita ke KPK untuk supaya menangkap Ahok, lalu kita ke DPRD. Intinya apa yang kita lakukan tidak melanggar hukum

**P:** berdirinya FPI dahulu kan sebagai wadah pendidikan agama ya bib, dan saat ini FPI ikut berpartisipasi dalam politik, lalu pendidikan politik seperti apa yang ingin disampaikan oleh FPI kepada masyarakat luas?

**NS:** kita intinya ormas berbasis agama yang juga ormas Islam yang ingin menyampaikan apa yang benar menurut islam dasarnya Alquran dan sunah, islam bahasanya politik dan ini maslaah kepemimpinan. Intinya kita hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan, itulah amar maruh nahi munkar mengajak orang muslim taat kepada Allah dan rasulnya



menjauhkan yang dilarang. Urusan untuk tidak memilih pemimpin kafir kita sampaikan dengan jelas bahwa agama bagini loh

**P:** emang Ahok dalam 3 tahun menjabat belum ada kebijakan yang prorakyat?

**NS;** selama ini kita ga liat program yang prorakyat, yang kita liat prokolongmerat. Kalau disebut program prorakyat mana, digusur-gurus rakyat, sekarang ini masih ada rakyat yang jadi gelandangan masa dibidang prorakyat. Gusur-gusur ini nanti dibuat apartemen, nanti di buat jalan ke reklamasi dengan segala macam hal. Intinya sudah terbukti kalau Ahok tidak punya sama sekali niat mencintai rakyat. Selama ini kita dibohongi oleh media kalau ahok itu pro rakyat, kenyataannya rakyat diinjek-injek, buktinya apa ahok tidak prorakyat, dia ga pernah buka pintu dialog ke rakyat, yang ada hanyalah buka pintu ke konglomerat. Selalu kalau konglomerat datang ke balai kota disambut, diajaj ngobrol. Itu kita belum bicara agama itu bicara pemimpin

### **Transkrip Video Ceramah Habib Rizieq Di Youtube**

<https://www.youtube.com/watch?v=uU6DVgM5AuE> **Menit 2:00:48 – 2:09:50**

Assalamualaikum wr. Wb

Solawat

Hari ini insya Allah kita yang ada disini sama bahagianya sama senangnya karna kita liat dengan mata kepala kita sendiri, kita dengar dengan telinga kita sendiri bagaimana para Calon Gubernur DKI Jakarta ini dengan secara terbuka yaitu menyatakan keinginan mereka yang kita dapatkan,

Satu mereka semua sama punya semangat menyelamatkan Jakarta

Dua mereka semua sama punya semangat persatuan, kesatuan dan kebersamaan

Tiga mereka semua punya semangat untuk maju dan sekaligus siap sedia untuk mundur, atrinya yang mana saja calon gubernur yang didukung oleh Habaib, Ulama, umat, rakyat, mereka semua siap mundur untuk mendukung calon gubernur muslim tersebut sodara

Insya Allah ini menjadi titik kemenangan kita semua Amin ya robbalalamin, dan calon gubernur yang ada disini bukan orang sembarangan semua sodara, luar biasa kita tau pak Yusril bagaimana beliau punya pengalaman begitu luas punya pengalaman dalam bidang pemerintahan, pak Adyaksa kita tau sodara bagaimana keberaniannya selama beliau memimpin yaitu menjadi pejabat di Kementriannya, bahkan bukan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang lain juga punya keyakinan dan percaya diri untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa mereka siap untuk berjuang bersama untuk mengambil alih kepemimpinan di Jakarta

Dan betul tadi yang disampaikan oleh Pak Yusril dan Pak Adyaksa dan lainnya saudara termasuk Pak Lious dimana kita disini tidak mengangkat persoalan Rasis, kita tidak mengangkat persoalan Fasis, kita disini ingin mengangkat keadilan, kita ingin menyelamatkan kebangsaan, kita ingin menyelamatkan agama, bangsa, negara dan Republik Indonesia, semoga Allah memberikan kemenangan kita semua.

Kemudian Saudara satu hal saja saya ingatkan untuk memompa kebersamaan kita, hati-hati yang mau kita lawan ini mempunyai dukungan financial yang luar biasa, saya bisa katakan sepanjang lahir Mall-Mall di Indonesia sejak zaman Orde Baru dulu sodara, tidak ada satu Mall pun saudara yang mengizinkan lokasinya digunakan Kampanye Politik, calon dari partai politik manapun tidak pernah diizinkan, tapi sekarang anda liat saudara bagaimana Mall-mall tersebut dijadikan sebagai alat politik, dijadikan tempat kampanye politik, artinya yang punya Mall tersebut dimana-mana mendukung daripada si calon yang mereka dukung saudara dan kita bisa bayangkan kalau yang punya Mall-Mall tersebut mendukung berarti uang mereka, kekayaan mereka, aset mereka itu mengalir untuk mendukung calon mereka tersebut.

Tapi jangan khawatir walaupun Financial mereka lebih banyak dari kita, persatuan kita dan kebersamaan kita, dengan keikhlasan kita, kita akan didukung yang Maha Kaya yang kekayaannya tidak menandinginya sodara

Nah ini saja kepada segenap calon gubernur dan terima kasih atas kepeduliannya, terima kasih atas kebersamaanya

Sebagai penutup pengumuman, ini juga agar dapat diketahui segenap umat dan tamu-tamu kita

Satu saudara, bahwa sejak Ahok menjadi Gubernur, kami dari GMJ selalu melakukan upaya-upaya konstitusional untuk memperkarakan Ahok sesuai dengan prosedur, baik undang-undang etika pejabat, undang-undang pengolahan daripada dana yang ada dalam APBD dan sebagainya sodara, ini semua sudah diperjuangkan sejak awal dan Alhamdulillah perjuangan kita membuahkan Hasil sampai DPRD menggelar Hak Angket dan putusan Hak Angket adalah dinyatakan bahwa Ahok terbukti bersalah melanggar sejumlah perundang-undangan dan dalam putusan Angket diputuskan bahwa DPRD mem rekomendasikan untuk menggelar sidang paripurna Hak menyampaikan pendapat dimana setiap Anggota DPRD untuk menyampaikan pendapatnya apakah Ahok lengser atau tidak lengser, tapi sayang sejuta sayang sampai hari ini saudara sidang Hak menyatakan pendapat belum digelar oleh DPRD, nah maka itu sodara kami dari GMJ Muzakarah sepakat akan datang ke DPRD untuk mendorong mereka melanjutkan langkah konstitusional dari putusan Hak angket yang menyatakan bahwa Ahok telah terbukti bersalah supaya digelar sidang paripurna untuk Hak menyatakan pendapat

Yang kedua sodara, selain itu sodara kami juga diundang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPK telah memaparkan dihadapan Kiyai para ulama dan berani menjamin, bahwa data mereka ini bukan data fiktif, bukan data fitnah, bukan upaya mereka untuk memojokan

Ahok, tapi apa adanya yaitu ada tiga kasus yang melibatkan Ahok yang nilainya merugikan negara sebesar Rp 1,8 Triliun sodara, dan sudah dipelajari oleh tim kami ternyata dari tiga kasus tersebut, kasus yang paling mencolok, kasus yang data-datanya sudah sangat kuat adalah kasus RS Sumber Waras sodara, dari data tersebut kami sudah buat laporan ke KPK, kita ke KPK pada bulan September dan di bulan Desember kami datang lagi ke KPK untuk menanyakan bagaimana proses dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ahok kenapa berhenti sampai disini? Dan dua minggu yang lalu kami mendengar kabar bahwa lima dari komisioner KPK yang 4 sudah setuju kalau Ahok untuk dijadikan tersangka, tapi ada satu yang masih belum setuju sampai saat ini, karna itu kami berencana akan datang ke KPK, akan menemui seluruh komisioner KPK untuk minta konfirmasi untuk bertanya untuk minta penjelasan kenapa kasus ini sampai hari ini tidak dilaksanakan sebagaimana harapan kita semua

## LAMPIRAN

### Keberpihakan FPI Melalui GMJ Mendukung Pasangan Calon Gubernur



Sumber : Arsip GMJ, 2016

### Foto-foto Dengan Informan



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016

### Posko Gubernur Muslim untuk Jakarta



Sumber : Arsip Pribadi, 2016

## RIWAYAT PENULIS



Saya Muhammad Fadli Agniandi akrab dengan panggilan fadli dilahirkan oleh pasangan dari Bapak Sujiran dan Ibu Dwi Nurmaningsih pada tanggal 9 Maret 1995. Saat ini saya adalah anak pertama dari tiga bersaudara dan berumur 21 tahun dan sedang menjalani kuliah di Universitas Negeri Jakarta jurusan Sosiologi angkatan 2012. Saya sedikit mempunyai hobi yaitu main futsal, badminton dan nongkrong bersama teman-teman disaat saya sedang punya waktu luang. Riwayat pendidikan saya yang pertama adalah bersekolah di Taman Kanak-Kanak Nur Huda, lalu dilanjutkan di SDN 06 Cipinang Melayu Jakarta Timur. Saat setelah kelulusan SD saya kurang beruntung karena saya masuk SMP swasta yaitu SMP Muhammadiyah 4 Cawang, tetapi saya dapat bangkit lagi dan berhasil mendapatkan SMAN 76 Cakung Jakarta Timur.

Di dalam organisasi saya mempunyai sedikit pengalaman yaitu menjadi ketika menjadi anggota Osis Di SMAN 76 Cakung Jakarta Timur diamanatkan sebagai kepala divisi PMR (Palang Merah Remaja). Lalu pengalaman saya dalam berorganisasi didalam kampus, saya menjadi anggota BLMJ (Badan Legislatif Mahasiswa Jurusan) Sosiologi dan menjadi anggota BEM FIS UNJ. Pengalaman melakukan penelitian saya adalah melakukan penelitian Sosiologi Perkotaan di Kota Tua, lalu penelitian Sosiologi Pedesaan di daerah Sukabumi, Parakansalak serta penelitian di Lembaga Masyarakat Magelang dalam mengikuti kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang. Selain itu saya pernah melakukan penelitian melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif antara lain pada mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Pada tahun terakhir saya memiliki pengalaman melakukan penelitian pada masyarakat pesisir Lampung pada mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan atau biasa disingkat KKL.